

MGR. ALBERTUS SUGIYOPRANOTO

OLEH : DRS. ANHAR GONGGONG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

MGR. ALBERTUS SUGIYOPRANOTO

OLEH : DRS. ANHAR GONGGONG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1983/1984

COPYRIGHT PADA :

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

Cetakan I, tahun 1980

Cetakan II, tahun 1983

Penyunting :

Sutrisno Kutoyo

Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

Gambar kulit oleh :
Iswar K.S.

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Desember 1980
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Pahlawan Nasional, yang sudah memperoleh pengesahan dari Pemerintah. Adapun ketentuan umum bagi Pahlawan Nasional, ialah seseorang yang pada masa hidupnya, karena ter dorong oleh rasa cinta tanah air, sangat berjasa dalam memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di Indonesia, melawan musuh dari luar negeri atau pun sangat berjasa baik dalam lapangan politik, ketatanegaraan, sosial-ekonomi, kebudayaan, maupun dalam lapangan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan dan perkembangan Indonesia.

Tujuan utama dari penulisan biografi Pahlawan Nasional ini ialah membina persatuan dan kesatuan bangsa, membangkitkan kebanggaan nasional, mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, dan melestarikan jiwa dan semangat, kepahlawanan dalam kehidupan bangsa dan negara.

Di samping itu penulisan biografi Pahlawan Nasional juga bertujuan untuk mengungkapkan kisah kehidupan para Pahlawan Nasional yang berguna sebagai suri-tauladan bagi generasi penerus dan masyarakat pada umumnya. Penulisan itu sendiri merupakan kegiatan memelihara kenangan tentang para Pahlawan Nasional yang telah memberikan dharma baktinya kepada nusa dan bangsa. Sekaligus juga bermakna sebagai ikhtiar untuk meningkatkan kesadaran dan minta akan sejarah bangsa dan tanah air.

Selanjutnya penulisan biografi Pahlawan Nasional merupakan usaha dan kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan pribadi warga negara, serta bermanfaat bagi pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Desember 1980

PROYEK INVENTARISASI DAN
DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

KATA PENGANTAR

CETAKAN KEDUA

Mengingat besarnya perhatian serta banyaknya permintaan masyarakat atas buku-buku hasil terbitan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN), maka pada tahun anggaran 1983/1984 Proyek melaksanakan penerbitan/pencetakan ulang atas beberapa buku yang sudah tidak ada persediaan.

Pada cetakan ulang ini telah dilakukan beberapa perubahan redaksional maupun penambahan data dan gambar yang diperlukan.

Semoga tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai.

Jakarta, Mei 1983
Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vi
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PASTOR FRANS van LITH PEMBUKA JALAN BAGI PEMUDA SUGIYO	9
BAB III : MENERIMA TANGGUNG JAWAB	25
BAB IV : DI MASA PENDUDUKAN JEPANG	37
BAB V : DARI SEMARANG KE YOGYAKARTA	51
BAB VI : KEMBALI KE SEMARANG	87
BAB VII : PENUTUP	111
DAFTAR LAMPIRAN	115

BAB I

PENDAHULUAN.

Menulis biografi seseorang tentulah karena orang itu menarik dan mempunyai sesuatu atau pelbagai perbuatan yang patut diketengahkan. Peranan orang itu mungkin menarik kita, baik dia sebagai seorang politikus maupun cendekiawan/pemikir, sehingga merasa tertarik untuk menulis biografinya. Di dalam kenyataannya peranan perseorangan dalam suatu zaman di dalam proses perkembangan sejarah nampak selalu ada, bahkan tidak jarang sangat menentukan perkembangan yang terjadi di dalam zamannya atau juga zaman-zaman sebelumnya. Karena itu tidaklah mengherankan jika Thomas Carlyle, sejarawan yang cukup memiliki otoritas dalam bidangnya, menyatakan bahwa sejarah dunia tidak lebih dari serangkaian ceritera tentang riwayat hidup orang-orang besar.¹⁾ Pandangan yang demikian ini tentulah sangat bersifat deterministik dan dengan sendirinya mengandung kebenaran di balik kelemahannya. Penonjolan peranan orang besar cenderung melupakan faktor-faktor lain yang dengan sendirinya mempunyai kaitannya yang erat dengan si orang besar itu, sebutlah misalnya massa rakyat.

Munculnya seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat tidaklah dapat dipisahkan dengan situasi di dalam masyarakatnya. Sebagai contoh di dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami krisis, biasanya memang mendambakan adanya seorang pemimpin yang kuat akan memberikan jalan kepada massa rakyat untuk keluar dari krisis yang sedang dialaminya. Karena itu seorang pemimpin yang berhasil muncul di tengah-tengah mereka itu, akan diterima dengan penuh harapan; pemimpin yang muncul itu akan disebut "penyelamat" dan akan diikuti oleh massa rakyat yang bersangkutan. Akan tetapi jika kita berpendapat bahwa masalah

¹⁾ H. Ruslan Abdulgani, *Penggunaan Ilmu Sejarah*, Prapantja nama tempat, tanpa angka tahun, hal. 21.

yang paling menentukan perjalanan sejarah umat manusia, maka pendapat itupun berat sebelah, juga bersifat deterministik. Sebab "bangkit, bergeraknya" kelompok massa dapat dipastikan adalah karena "kepandaian" dari seorang/beberapa orang pemimpin yang mampu menggerakkan mereka. Ide untuk melakukan "sesuatu" biasanya pastilah berasal dari seseorang pemimpin. Hal yang demikian ini juga tak dapat disangkal merupakan kejadian yang sangat banyak tergambar di dalam proses perkembangan umat manusia.

Keterangan tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa suatu kejadian di dalam perkembangan sejarah dan munculnya seorang di atas panggung sejarah sangatlah ditentukan oleh pelbagai faktor yang telah dan sedang terjadi di dalam masyarakatnya. Sebaliknya mungkin sekali terjadi suatu perubahan di dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan dari seseorang pemimpin di dalam masyarakat tersebut.

Demikianlah, keterangan Thomas Carlyle yang dikutip di atas tidaklah benar sepenuhnya, tetapi tidaklah juga salah seluruhnya. Pemimpin dengan massa rakyatnya dan rakyat dengan pemimpin mempunyai hubungan yang saling menentukan di dalam perkembangan sejarah kehidupan masyarakat mereka.

Kemunculan seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakatnya tidaklah mudah; untuk itu diperlukan pelbagai persyaratan yang seharusnya terdapat di dalam diri seseorang yang akan menjadi pemimpinnya. Persyaratan yang dimaksud antara lain ialah kejujuran dan keberanian moral dan ini haruslah berkaitan dengan pelbagai hal lainnya seperti kesungguhan yang meyakinan, kesadaran yang dalam atas prinsip, keterus-terangan dan tekad.²⁾ Juga tidaklah dapat dilupakan bahwa seseorang pemimpin seharusnya seorang yang cerdas, yang mampu memperhitungkan pelbagai kejadian yang sedang dihadapi dengan kecerdasan itu.

^{2).} John F. Kennedy; Riwayat² Keberanian, Kartika, Jakarta, 1964, hal. 13.

Keterangan yang diuraikan di atas itu dimaksudkan untuk mengawali uraian-uraian kita selanjutnya yang menyangkut dengan biografi seorang pahlawan nasional kita, yaitu Mgr. Sugiyoprana SJ, uskup agung Semarang yang juga sekaligus adalah uskup pribumi yang pertama di Indonesia. Sebagaimana diketahui Mgr. Sugiyoprana telah diangkat oleh Presiden sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia; ini merupakan perwujudan daripada pengakuan akan "ada dan besarnya" jasa beliau kepada bangsa Indonesia selama hidupnya.

Pengakuan atas jasa-jasa yang seperti diperoleh Mgr. Sugiyoprana yang diwujudkan dalam bentuk seperti di atas itu merupakan kebiasaan yang baik, akan tetapi melalui penyaringan berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian penghargaan semacam itu tidaklah diberikan kepada setiap pemimpin dan atau kepada setiap orang besar. Sebab tidak semua pemimpin mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Jika kita berbicara tentang Mgr. Sugiyoprana maka diri beliau memang cukup dapat memancing perhatian, karena liku-liku hidupnya memang cukup menarik. Kegiatannya sejak memasuki sekolah guru di bawah bimbingan pastor van Lith sudah menunjukkan keuletannya tetapi sekaligus juga keterbukaan dan keterus-terangan di dalam mengemukakan pandangan di dalam sesuatu atau pelbagai hal. Juga setelah menduduki bangku pendidikan imamat, beliau telah menunjukkan minatnya yang sangat besar, tidak hanya yang menyangkut pada agama Katolik yang dianutnya akan tetapi juga terhadap pelbagai hal seperti pendidikan, seni-budaya dan lain-lain sebagainya.

Setelah melalui liku-liku kehidupannya sebagai imam untuk beberapa waktu lamanya, akhirnya beliau berhasil mencapai salah satu puncak di dalam hirarki pemerintahan gereja, yaitu sebagai uskup pribumi yang pertama di Indonesia. Beliau diangkat sebagai Uskup untuk daerah vikariat Semarang pada tahun 1940. Sebuah jabatan yang pastilah memiliki nilainya yang tersendiri sekaligus juga pada dirinya mengandung konsekuensi yang tidak ringan.

Sejak awal pengangkatannya sebagai Uskup beliau telah menghadapi pelbagai permasalahan yang rumit, tidak hanya yang menyangkut permasalahan agama tetapi juga pelbagai hal yang bersifat politis dan sosial. Hal ini juga tidak hanya yang menyangkut keadaan di dalam negeri akan tetapi juga tidak jarang oleh karena situasi internasional ketika itu. Berkuasanya Hitler-Mussolini di Jerman dan Italia yang telah menyebabkan pecahnya Perang Dunia II; juga kemudian pecahnya Perang Pasifik yang lahir oleh ambisi Jepang untuk muncul sebagai penguasa tunggal di wilayah ini adalah hal-hal yang sedikit banyak membawa akibat terhadap karya missi di Indonesia ketika itu. Bahkan selama masa penjajahan Jepang yang singkat itu (1942–1945), karya missi telah mengalami pelbagai cobaan yang tidak ringan; sekian banyak pastor yang menderita karena penangkapan bahkan juga pembunuhan terhadap mereka. Demikian pula tidak sedikit peralatan-peralatan, seperti sekolah, asrama dan lain-lain, telah disita oleh penguasa pendudukan Jepang.

Pada tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia, yang dibacakan oleh Bung Karno (yang didampingi oleh Bung Hatta) telah memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa asing dari mana pun. Namun di dalam kenyataannya Belanda yang pernah menjajah bangsa/wilayah Indonesia tidak bersedia mengakui pernyataan bangsa Indonesia itu. Mereka rupanya tetap merasa mempunyai hak untuk kembali menjajah bangsa Indonesia setelah Jepang berhasil dikalahkan. Mereka lupa bahwa pada saat-saat yang kritis akibat penyerbuan Jepang, justru pada saat itu mereka (bangsa Belanda) menyerah kepada Jepang dengan tiada perlawan yang berarti sama sekali. Hal yang cukup memalukan di mata kemanusiaan. Adanya usaha Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya itu, terpaksalah kita mengalami apa yang disebut "revolusi phisik" perang kemerdekaan (1945 – 1949).

Selama periode ini Mgr. Sugiyopranata pun telah menunjukkan nilai kepemimpinannya di balik kecintaan kepada bangsanya.

Beliau memihak kepada bangsanya dan karena itu beliau telah ikut menentang keinginan Belanda untuk mengembalikan penjajahannya di bumi Indonesia. Ini dibuktikannya dengan berpindahnya beliau ke Yogyakarta pada tahun 1946 yang pada tahun itu juga telah menjadi ibukota Republik Indonesia, karena suasana Jakarta yang "gawat" tidak memungkinkan untuk dipertahankan sebagai ibukota. Selama berada di Yogyakarta beliau telah banyak berhubungan dengan pemimpin-pemimpin negara seperti Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta, Sultan Hamengku Buwono dan lain-lain. Di dalam masa yang "krisis" itu beliau tampil sebagai seorang pemimpin yang sering cukup "mencengangkan" lawan; seperti ketika beliau menembus blokade Belanda dengan mengirimkan berita keluar negeri dan ini dapat membuka situasi Indonesia bagi bangsa-bangsa di negara lain seperti Amerika Serikat dan lain-lain.

Pada akhir tahun 1949 pertikaian "phisik" di antara bangsa Indonesia dan Belanda telah berakhir berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, pengakuan kedaulatan oleh Belanda ditanda-tangani pada tanggal 27 Desember 1949. Akan tetapi di balik itu masih tersisa persoalan yang pada gilirannya menimbulkan pertikaian di antara kedua belah pihak, yang nyaris membawa kedua bangsa ke dalam peperangan terbuka; masalah itu ialah yang menyangkut daerah Irian Barat. Sejak tahun 1950 persoalan ini telah dirundingkan di antara kedua belah pihak, akan tetapi selalu tidak membawa hasil. Nanti pada tahun 1962, masalah ini berhasil diselesaikan dengan turut campurnya Amerika Serikat dan PBB sebagai pihak ketiga yang menengah.

Pertikaian Belanda – Indonesia tentang Irian Barat ini mau tidak mau juga melibatkan Mgr. Sugiyopranata baik dalam keduukannya sebagai uskup maupun sebagai warganegara Republik Indonesia. Bagi Mgr. Sugiyopranata adanya pertikaian itu cukup menimbulkan kerumitan. Sebagai seorang Uskup yang memimpin masyarakat gerejani untuk Vikariat Apostolik Semarang beliau banyak mempunyai tenaga-tenaga bangsa Belanda yang bekerja untuk karya missi; di lain pihak sebagai warga negara Republik

Indonesia dan sebagai patriot, beliau menuntut hak bangsanya atas wilayah Irian Barat itu. Sehubungan dengan itu beliau telah melakukan pelbagai usaha untuk mengembalikan wilayah itu. Beliau berusaha untuk melakukan pendekatan dengan Partai Katolik Belanda, walaupun hasilnya terkadang mengecewakan beliau sendiri. Di samping beliau tidak jarang juga melakukan kecamannya terhadap Partai Katolik Belanda ini, karena sikap mereka terhadap bangsa Indonesia. Sampai saat adanya titik cerah untuk penyelesaian Irian Barat ini, beliau juga tetap berusaha yaitu dengan mendesak kepada Partai Katolik Belanda untuk menerima prinsip-prinsip penyelesaian yang diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keterlibatannya di dalam pelbagai masalah yang berada di luar bidangnya sebagai pemimpin masyarakat gerejani sebenarnya dituntut juga oleh situasi-situasi negaranya yang memang juga masih menghadapi pelbagai masalah yang berat seperti masalah Pancasila sebagai dasar negara, sistem demokrasi di Indonesia dan lain sebagainya. Keterlibatannya itu tidaklah sepi dari kritik-kritik "pedas" yang terkadang menyebabkan "renggangnya" hubungannya dengan rekan-rekan terdekatnya sendiri. Akan tetapi semua itu dihadapinya dengan keluasan pandangan dan kelapangan dada.

Kaitan-kaitan dari pelbagai hal yang disebutkan di atas akan dicoba digambarkan di dalam uraian-uraian selanjutnya yang tertera pada bab-bab selanjutnya.

Selanjutnya sebagai pertanggungjawaban, penulis akan menyatakan pula di sini bahwa tulisan ini bukanlah tulisan yang pertama kalinya yang menyangkut diri beliau; karena telah ada tulisan/buku yang telah ditulis tentang dirinya baik setelah beliau mangkat maupun semasih beliau hidup. Tulisan atau buku-buku itu antara lain: Buku *Peringatan Pesta Perak 25 Tahun Mgr. A. Sugiyoprana S.J. Ditasbihkan Menjadi Imam 15 Agustus 1931 – 15 Agustus 1956*; buku ini ditulis semasih beliau hidup. Buku ini telah memberikan secara singkat tentang riwayat hidup, karya

beliau selama 25 tahun ditasbihkan sebagai Imam; ketika beliau telah mangkat maka majalah *Inter Nos*, yaitu majalah intern Syarekat Yesus telah pula terbit secara khusus dengan isi tentang pelbagai hal yang menyangkut diri beliau semasih hidupnya. Penulisnya adalah orang-orang yang telah mengenal beliau secara dekat. Juga di IKIP Sanata Dharma telah ada mahasiswa yang memilih riwayat hidup beliau sebagai obyek penulisan skripsi sarjananya, yaitu Sr. M. Henricia dan judulnya ialah *Peranan Monsignore Albertus Soegiyoprana S.J. Dalam Rangka Usaha Membina Kehidupan Gereja Di Vikariat Apostolik Semarang Antara 1950 – 1960*. Skripsi ini kemudian diperbaiki dan diperluas permasalahannya untuk kemudian diterbitkan oleh Nusa Indah dengan Dr. Weitjens yang berjudul "Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Semarang" yang terdapat di dalam *Sejarah Gereja Indonesia Wilayah-Wilayah Keuskupan dan Majelis Wali-gereja Indonesia Abad ke 20* (jilid 3^b). Dalam tulisan ini dapat diperoleh gambaran perkembangan karya missi di daerah Vikariat Semarang secara cukup jelas dan cukup "kaya" dengan data-data sejarah di dalamnya.

Semua tulisan/buku yang disebutkan itu telah dijadikan sumber yang berharga untuk penyusunan biografi Mgr. Sugiyoprana yang penulis kerjakan ini.

Kemudian perlu pula penulis terangkan bahwa mendaftarkan suatu jalur gambaran perkembangan yang "agak" jelas, maka uraian ini dibagi dalam beberapa bab, jelasnya tujuh bab. Bab-bab itu ialah: Bab I : Pendahuluan isinya sebagaimana yang telah penulis sajikan pada uraian-uraian seperti di atas tadi. Bab II : Pastor van Lith Pembuka jalan Bagi Pemuda Sugiyo; isinya antara lain ialah gambaran kehidupan pemuda Sugiyo ketika dia masih kanak-kanak, pemuda yang kemudian bertemu dengan pastor van Lith. Selanjutnya kita akan melihat peranan pastor ini yang telah membuka jalan bagi pemuda Sugiyo untuk menjalani kehidupannya sebagai salah seorang tokoh agama Katolik yang terkemuka. Bab III : Menerima Tanggung Jawab; isinya antara lain ialah gambaran perkembangan agama Katolik

yang telah mengalami perkembangan pasang-surutnya yaitu sejak masa gelap di jaman VOC dan kemudian berhasil mencapai kemajuan di balik kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Kemudian digambarkan pula proses pertumbuhan agama Katolik (secara singkat) di daerah Jawa Tengah yang kemudian membawa titik terang untuk dijadikan sebagai suatu daerah dengan masyarakat gerejani, yaitu daerah Vikariat Semarang di mana Mgr. Sugiyoprana sebagai uskup yang pertama. Bab IV : Di Masa Pendudukan Jepang Awal Pekerjaan di Dalam Keadaan Yang Sulit; isinya antara lain gambaran tentang awal pengangkatan Mgr. Sugiyoprana sebagai uskup yang ada kaitannya dengan kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Bab V : Dari Semarang ke Yogyakarta; isinya ialah gambaran tentang perjuangan bangsa Indonesia di dalam menentang kembalinya penjajahan bangsa Indonesia di wilayah negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bab VI : Kembali ke Semarang; Melanjutkan Kerja Di Dalam Negara Yang Merdeka: isinya antara lain ialah kegiatan-kegiatan beliau setelah kembali ke Semarang sebagai kepala masyarakat gerejani di Vikariat Semarang, baik itu di dalam bidang agama, sosial maupun politik. Bab VII : Penutup; isinya antara lain tentang kegiatan beliau yang terakhir sebagai Uskup Agung sampai kepada kemangkatannya. Juga beberapa kesimpulan yang lahir dari kegiatan-kegiatan beliau selama hidupnya.

BAB II

PASTOR FRANS van LITH PEMBUKA JALAN BAGI PEMUDA SUGIYO

Di dalam pengamatan kami yang berdasarkan atas pembacaan buku riwayat hidupnya, dapatlah kami menarik kesimpulan bahwa Monsignore (Mgr) Sugiyopranata S.J. sejak kecil telah memiliki sifat-sifat yang berani, jujur dan tabah, demikian pula di dalam dirinya terdapat bakat-bakat kuat yang ditunjang oleh kecerdasan otaknya.³⁾ Namun demikian, tentulah keberanian, kecerdasan dan bakat-bakat yang terdapat di dalam diri seseorang itu perlu untuk dikembangkan agar tidak hanya terpendam sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan. Untuk mengembangkan dirinya itu biasanya seseorang memerlukan bimbingan-bimbingan dari orang lain yang lebih dewasa. Sehubungan dengan itu, agaknya pemuda Sugiyo lebih beruntung jika dibandingkan dengan pemuda-pemuda sebayanya yang lain. Keberuntungannya yang pertama ialah bahwa sebagai anak pribumi dia telah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan; suatu hal yang tidak mudah diperoleh di masa penjajahan waktu itu. Keberuntungannya yang kedua ialah pertemuan dan perkenalannya dengan seorang pastor yang ketika itu sedang giat mencari murid untuk dididik di sekolah guru yang sedang didirikannya di Muntilan. Pastor yang dimaksud ialah Frans van Lith. Perkenalannya dengan penyebar agama Katolik di Jawa Tengah itu agaknya telah sangat menentukan perjalanan hidup pemuda Sugiyo di masa-masa yang akan datang.

Perkenalan di antara kedua makhluk Tuhan itu bermula ketika pastor van Lith mendatangi beberapa sekolah di Yogyakarta

3). Tentang hal-hal ini lihat Buku *Peringatan Pesta Perak 25 tahun Mgr. A. Sugiyopranata S.J. Ditambahkan Menjadi Imam 15 Agust. 1931 – 15 Agust. 1956*, Panitia Pusat Peringatan Pesta Perak Uskup Agung Semarang, Semarang, 1956, hal. 8; lihat juga G. Vriens S.J. "Riwayat hidup Alb. Sugiyopranata" di dalam *Inter Nos*, September, 1963, hal. 2–5.

untuk mencari murid-murid bagi sekolah guru yang didirikannya di Muntilan. Pada waktu pastor van Lith mendatangi sekolah tempat belajar pemuda Sugiyo dan memberitahukan maksudnya, maka pemuda Sugiyo pun bersedia untuk menjadi calon murid sekolah guru yang didirikan oleh van Lith itu. Keputusannya itu diambilnya sendiri dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Dan setelah kemudian dia memberitahukan keputusannya itu, bahwa ia memasuki sekolah Kristen, kepada ayahnya, maka ayahnya cukup heran akan hal itu.⁴⁾

Keherenan Pak Kariyosudarmo, demikian nama ayahnya, mungkin sekali karena ayahnya itu menganut agama Islam walau-pun mungkin yang bersifat *abangan*. Dan memang di dalam diri anaknya itu masih mengalir darah keturunan *kyai*, yaitu kyai Supa yang cukup terkenal di daerah kerajaan Mataram dan sekitarnya⁵⁾. Mungkin juga karena anaknya yang cukup nakal itu termasuk anak yang senang mengganggu anak-anak Kristen, sehingga tidak ada seorang anak Kristen pun yang luput dari gangguan dan ejekan bila berani mendekati Sugiyo.⁶⁾

Keluarga Sugiyo memang masih memegang teguh tradisi yang diterimanya dari leluhurnya, sebagaimana terjadi juga pada anggota masyarakat lainnya pada waktu itu. Lingkungan seperti ini makin terasa bagi pemuda Sugiyo karena di dalam dirinya masih ada tetesan ningrat Jawa. Ayahnya berasal dari Yogyakarta Adiningrat dan ibunya Supiah, berasal dari Surakarta Adiningrat⁷⁾. Ketika Sugiyo lahir, yaitu pada tanggal 25 Nopember 1896, maka dia disambut dengan pelbagai upacara yang bersifat tradisional Jawa. Pemberian nama pun dilakukan dan untuk bayinya itu telah dipilihkan nama *Sugiyono*, sebuah nama yang berasal dari kata *sugih* dan berarti kaya.⁸⁾ Pemberian nama untuk seorang bayi pun mengandung makna yang tersendiri. Karena itu

4). M. Henricia Murjantini CB, *Mgr. Sugiyopranata S.J.* Nusa Indah, Ende Flores, 1975, hal. 14.

5). Buku Peringatan Pesta Perak. *loc. cit.*

6). M. Henricia Murjantini CB. *loc. cit.*

7). Buku Peringatan Pesta Perak *loc. cit.*

8). M. Henricia Murjantini CB. *op. cit.*, hal. 13.

bagi keluarga yang kedatangan bayi, yang tentu saja memerlukan nama, pastilah akan memilih sebuah nama yang dianggapnya sesuai dengan bayinya itu. Nama bagi anaknya itu mengandung makna berupa harapan terhadap anak itu kelak jika dia sudah dewasa. Harapan itu berupa adanya keselamatan dan kesejahteraan bagi anak itu dalam mengarungi kehidupannya di kemudian hari. Demikian pulalah agaknya dengan ayah dari bayi yang dinamakan Sugiyo itu. Pak Kariyosudarmo berharap agar anaknya (yang ke lima) itu nantinya akan menjadi orang yang "kaya". Harapan yang demikian itu memang patut didambakannya karena Pak Kariyosudarmo memang hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Keadaannya yang demikian ini agaknya selalu dialaminya walaupun Pak Kariyosudarmo pernah menjadi abdi dalem di kraton Surakarta. Demikian sulitnya keadaan hidup keluarga Pak Kariyosudarmo, ini akan nampak juga dengan ikut sertaanya isterinya untuk berusaha memperoleh biaya hidup keluarganya; waktu itu, bukanlah suatu kebiasaan. Kedudukan wanita bukan untuk mencari uang, itu sepenuhnya berada di tangan laki-laki, suami. Jadi jelas sangat berbeda dengan keadaan sekarang.

Pendidikan pemuda Sugiyo, yang diperolehnya dari lingkungan keluarganya, tentulah tidak dapat dilepaskan dengan situasi dari keluarganya itu sendiri. Sebagaimana keadaan hidup keluarganya, maka Sugiyo pun dididik untuk menjalani hidupnya secara sederhana. Oleh ayahnya dia sering diajar untuk melakukan tirakat, puasa Senen - Kemis; bahkan juga melakukan puasa *pati-geni* selama tujuh hari tujuh malam.⁹⁾ Dan ini semua dilakukannya dengan tekun dan patuh.

Demikianlah gambaran tentang keluarga pemuda Sugiyo yang kelak akan berjumpa dengan seorang pastor yang giat, tabah, dan sedang melaksanakan panggilannya untuk menyebarkan agama Katolik yang diyakininya, yaitu pastor van Lith.

Pastor van Lith tiba di Semarang pada tahun 1896 bersama dengan pastor Petrus Hovenaars. Kedua pastor ini dimaksudkan untuk menambah tenaga missionaris di Jawa Tengah yang ketika

^{9).} *Ibid.*

itu hanya berjumlah dua orang, masing-masing Helings dan Hebrans.

Setelah beberapa waktu tinggal di Semarang, kemudian pastor van Lith ditugaskan di Muntilan. Kepindahannya ke Muntilan ini akan sangat memberikan pengaruh bagi pertumbuhan agama Katolik di Jawa Tengah. Sejak awal kedatangannya di Muntilan itu pastor ini telah menunjukkan kegiatannya yang bersegi banyak; dia tidak hanya mengurus soal agama akan tetapi juga persoalan persoalan sosial, ekonomi, bahkan juga persoalan politik. Usahanya di dalam pelbagai bidang itu ditunjang oleh pandangan yang luas di dalam menilai persoalan yang dihadapinya.

Pandangan yang jauh ke depan itu agaknya menjadi dorongan untuk mendahulukan bidang pendidikan di dalam rangka kegiatan-kegiatannya. Pada tahun 1904 pastor van Lith telah berhasil mendirikan sebuah sekolah guru di Muntilan. Tujuannya untuk mendirikan sekolah guru itu ialah untuk membina guru-guru yang sungguh-sungguh beragama Katolik; juga diharapkannya murid-muridnya itu kelak akan mampu mengajar dengan baik di sekolah-sekolah negeri.¹⁰⁾

Pada tahun itu juga (1904) pastor van Lith telah menerima utusan dari penduduk daerah pedesaan Kalibawang. Utusan ini meminta pastor van Lith untuk memberikan pelajaran agama kepada penduduk desa mereka. Keinginan penduduk desa itu diterima dengan baik dan dia pun diantar dari desa ke desa untuk mengajarkan pengetahuan agama sebagaimana yang dikehendaki oleh penduduk desa itu sendiri. Hasil perjalanan itu ialah dipermandikannya sebanyak 168 orang yang telah menerima bimbingan dari pastor van Lith.¹¹⁾

Suatu hal yang perlu dicatat di sini ialah bahwa pada sekolah yang didirikannya itu, pastor van Lith tidak hanya menerima murid-murid yang sudah beragama Katolik. Kenyataan yang demikian ini menunjukkan ketajaman pandangannya dan keluhuran jiwanya. Agaknya pastor van Lith menyadari sepenuhnya

10). Sejarah Gereja Katolik di Indonesia, Kursus Kader Katolik Sekretariat Nasional KM/CLC. Djakarta, 1971, hal. 66.

11). *Ibid.*, hal. 65.

bahwa yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran tidak hanya anak-anak yang beragama Katolik, tetapi juga anak-anak yang bukan Katolik. Dalam usahanya untuk mengembangkan sekolah guru yang didirikannya itu, pastor van Lith selalu berikhtiar untuk meningkatkan mutu dan berusaha agar murid-murid lulusan sekolah guru Muntilan dapat disederajatkan dengan lulusan sekolah negeri. Pelbagai rintangan telah dihadapinya, namun karena kegigihannya, akhirnya usaha itu berhasil juga. Sekolah guru yang didirikannya pada tahun 1904 itu adalah untuk tingkat guru bantu yang dapat mengajar di sekolah negeri tingkat dua dan sekolah rakyat latihan. Pada tahun 1906 sekolah ini ditambah dengan sekolah guru yang lulusannya berhak menjadi kepala sekolah negeri tingkat I. Tahun berikutnya, 1907, dibukanya pula *Hollands Inlandse Kweekschool* (HIK). Pada tahun 1909 sudah terdapat 107 orang calon guru dan di antaranya (hanya) terdapat 75 orang yang beragama Katolik.¹²⁾

Selama menjalankan tugas-tugas missinya itu, pastor van Lith selalu melakukan pendekatan-pendekatan dengan pelbagai pihak dan golongan, termasuk dengan golongan ningrat Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Salah seorang kenalannya yang akrab dari golongan ningrat Yogyakarta ialah Pangeran Sasraningrat. Sebenarnya pangeran ini tidak pernah menyatakan diri sebagai penganut agama Katolik, namun dia sangat bersimpati kepada karya misi Katolik. Dia berusaha untuk membuka peluang bagi kelangsungan karya misi Katolik dengan mempergunakan pengaruhnya. Karena itu kelak cukup banyak putera-puteri dari keluarga terkemuka yang bersekolah di Muntilan dan Mendut.¹³⁾

Pendidikan yang terdapat di Muntilan itu hanya khusus untuk pria, karena itu di dalam pendidikan kader-kader misi nampak adanya kepincangan, ketika itu pendidikan untuk wanita belum tersedia. Kekurangan ini disadari pula oleh pastor van Lith. Atas

¹²⁾ *Ibid.*, hal. 104.

¹³⁾ Y. Weitjens SJ, "Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Agung Semarang" di dalam *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Wilayah Keuskupan Dan Majelis Agung Waligereja Indonesia Abad ke 20*, Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 856.

usahaanya maka pada tanggal 14 Februari 1908 datanglah empat orang suster Fransiskanes dari Heythuizen. Keempat suster ini ditempatkan di Mendut. Pada tanggal 1 Mei ada dua murid yang pertama diterima di asrama, masing-masing anak dari Wedana Muntilan dan anak dari kusirnya. Sehubungan dengan perkembangan pendidikan puteri di Mendut ini, nampak lagi jasa dari pangeran Sasraningrat. Pangeran ini telah menyekolahkan empat orang puterinya sekaligus di Mendut.¹⁴⁾

Untuk mendapatkan murid-murid bagi sekolah-sekolah yang dibukanya itu, pastor van Lith tidak menunggu akan tetapi dia sendiri berkeliling ke pelbagai tempat untuk mendapatkan murid-murid. Untuk maksud itulah maka pada suatu hari dia ke Yogyakarta dan datang ke sekolah tempat belajar pemuda Sugiyo. Ketika itulah pertama kalinya pemuda Sugiyo bertemu dengan pastor van Lith. Sebagaimana telah dikatakan terdahulu, pada saat itu juga pemuda Sugiyo mendaftarkan diri sebagai calon murid di sekolah guru asuhan pastor van Lith itu. Pertemuan antara kedua "gembala" ini pada waktu yang akan datang sangat berarti bagi perkembangan agama Katolik di Jawa Tengah. Keduanya telah memberikan corak tersendiri di dalam sumbangannya bagi kelangsungan perkembangan agama kepercayaan mereka di Jawa Tengah ini.

Sejalan dengan pendaftaran dirinya sebagai calon murid pada sekolah guru di Muntilan, maka pada tahun 1909 pemuda Sugiyo berpindah dari Yogyakarta ke Muntilan. Dengan itu jalan untuk menjadi "guru" baginya makin dekat. Akan tetapi agaknya keinginan untuk menjadi guru bukanlah cita-citanya yang semula. Hal itu mungkin sekali disebabkan oleh karena situasi kehidupan masyarakatnya ketika itu. Sebagai akibat dari sistem feodalisme dan penjajahan di Indonesia ketika itu, maka dengan keadaan masyarakat kita mempunyai ciri-ciri seperti: (1) petani yang miskin; (2) kesehatan rakyat yang sangat menye dihikan dan (3) butahuruf yang mengakibatkan ketidak-mampuan

14). *Ibid.*

masyarakat untuk memperluas horizon penglihatannya tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Keadaan-keadaan seperti itu mengenai sebagian terbesar rakyat Indonesia. Melihat kenyataan yang dihadapi bangsanya itu, maka pada mulanya pemuda Sugiyo bercita-cita untuk menjadi *landbouwconsulent*; juga sering timbul di dalam pikirannya untuk menjadi dokter.¹⁵⁾ Akan tetapi di dalam kenyataannya kedua cita-citanya yang semula itu ditinggalkannya. Akhirnya pemuda Sugiyo memilih bidang lain yang tidak kurang pentingnya, yaitu bidang keguruan. Di dalam anggapannya keburukan keadaan masyarakat yang sedang dihadapinya itu, salah satu sebabnya ialah karena tidak tersedianya lembaga-lembaga pendidikan yang teratur baik, apa yang tersedia ketika itu masih sangat sedikit dan hanya terbuka untuk golongan tertentu. Karena itu ia tertarik oleh keadaan anak-anak dan orang dewasa yang belum pandai membaca.¹⁶⁾

Sejak awal masuknya ke sekolah guru di Muntilan hubungannya antara pemuda Sugiyo dengan gurunya, pastor van Lith memang sudah akrab. Hubungan itu agaknya tidak dihalangi oleh adanya perbedaan agama di antara keduanya. Sebagaimana diketahui, ketika itu pemuda Sugiyo belum beragama Katolik, tetapi masih tetap pada keyakinannya semula, yaitu agama Islam. Hal ini sejalan dengan pernyataannya ketika akan mencalonkan diri untuk menjadi murid sekolah guru di Muntilan. Dikatakannya bahwa kedatangannya di Muntilan dan masuknya ke sekolah guru Muntilan itu bukanlah untuk masuk agama Katolik, tetapi semata-mata hanya untuk menuntut ilmu.¹⁷⁾ Penolakan untuk menjadi penganut agama Katolik tidak sekali dua kali dinyatakan, tetapi berkali-kali. Ini dikatakannya kepada ayahnya, juga

15). Buku Peringatan Pesta Perak . . . , *loc. cit.*

16). *Ibid.*

17). Sr. Henricia CB. *Peranan Monsignore Albertus Soegiyopranata S.J.* Dalam rangka Usaha Membina Kehidupan Gereja di Vikariat Apostolik Semarang Antara 1950 – 1960, "Sekripsi" Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Keguruan dalam Ilmu Sejarah Pada IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1973, hal. 4.

kepada pastor v. Rijckeversel S.J., demikian pula kepada pastor van Lith.¹⁸⁾ Ketika sudah berada di Muntilan, pemuda Sugiyo sering terlibat dalam perdebatan dengan beberapa pastor tentang pelbagai permasalahan agama, misalnya perdebatan dengan pastor v. Rijckeversel S.J. Bahkan ketika itu pemuda Sugiyo agaknya menaruh curiga terhadap pastor dan dia sering melakukan kritik-kritik pedas terhadap mereka. Secara terbuka pemuda Sugiyo mengatakan bahwa para romo datang ke Indonesia hanya untuk memperkaya diri.¹⁹⁾

Ketegasan pemuda Sugiyo untuk tetap mempertahankan keyakinan agamanya yang semula, yaitu Islam, tidak berlangsung lama, karena pada akhirnya dia bersedia dipermandikan untuk menganut agama Katolik, ini terjadi pada tanggal 24 Desember 1909 ketika dia berusia 13 tahun. Tentulah banyak faktor yang mendorongnya untuk menerima kepercayaan barunya itu. Lingkungan tempat tinggalnya di asrama tentulah salah satu faktor. Juga dia tidak dapat melepaskan diri dari suasana yang diciptakan oleh pastor van Lith dan Mertens di Muntilan.²⁰⁾ Setelah melalui pendidikannya di sekolah guru Muntilan itu, maka akhirnya dia berhasil meraih ijazahnya pada tahun 1915. Setamatnya dari sekolah gurunya itu, pemuda Sugiyo tetap tinggal di Muntilan untuk menjalani tugasnya sebagai guru. Akan tetapi tugasnya sebagai guru itu hanya dijalankannya selama satu tahun. Hal ini disebabkan oleh karena pernyataannya untuk melanjutkan pelajarannya pada sekolah imamat yang ketika itu juga telah dibuka. Sebagaimana diketahui pendidikan untuk menjadi imam ini sejak tahun 1911 telah dibuka dan ini juga adalah karena kegigihan dari pastor van Lith. Usaha membuka sekolah pendidikan imanat ini dimaksudkan untuk melahirkan imam-imam bumiputera yang diharapkan akan menjadi penyebar-penyebar agama mereka di kemudian hari. Karena memang sejak semula, sebenarnya, gereja sudah bermaksud untuk menyerahkan kekuasaan dan pimpinan kegerejaan kepada imam-imam bumiputera jika keca-

¹⁸⁾ Buku Pergatan Pesta Perak . . . *loc. cit.*

¹⁹⁾ *Ibid.*

²⁰⁾ G. Vriens S.J., *op. cit.*, hal. 3.

kapan dan jumlah mereka sudah mampu dan memadai untuk hal tersebut. Akan tetapi untuk melaksanakan maksud itu tidaklah mudah. Ini antara lain disebabkan karena persyaratan-persyaratan untuk memasuki pendidikan itu tidaklah ringan. Persyaratan itu tidak hanya menyangkut moral dan budi pekerti yang teruji akan tetapi memerlukan pendidikan formal tingkat universiter sedikitnya enam tahun. Karena lamanya pendidikan dan juga biasanya hanya 1/3 dari jumlah muridnya yang akan berhasil menyelesaikan pendidikannya, maka lahirnya pastor-pastor bumiputera cukup lambat. Pastor Indonesia yang pertama ditabihkan pada tahun 1927. Sedang sampai pada awal 1942, baru terdapat 16 orang imam bumiputera.²¹⁾

Pada tahun 1916 guru Sugiyo memulai pendidikan imamatnya di Muntilan. Tetapi perlu dicatat di sini bahwa guru Sugiyo bukan angkatan pertama untuk pendidikan imamat ini, karena pada tahun 1911 itu empat orang lulusan sekolah guru berhasil dengan baik dan dua di antaranya telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi imam. Ketika itu Mgr. Luypen belum berani memulai pendidikan imamat bagi mereka. Akan tetapi pastor jendral F.K. Wernz memberikan izin untuk mendidik mereka menjadi Jesuit dengan tanggung jawab Sarikat Jesuit sendiri.²²⁾ Untuk menjadi imam agaknya guru Sugiyo telah berusaha mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika masih siswa sekolah guru dia sudah menempuh pelajaran pagi dan sore. Selanjutnya dia pun belajar humaniora, khususnya bahasa-bahasa Latin dan Yunani dengan pengajarnya pastor J.A.A. Mertens.²³⁾ Pendidikan imamatnya di Muntilan berlangsung sampai pada tahun 1919 karena pada tahun itu guru Sugiyo akhirnya dikirimkan ke negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikan imamatnya itu. Di negeri Belanda

²¹⁾. N. Drijarkoro S.J. "Gereja Katolik Dalam Indonesia Merdeka Selama Dua Windu" di dalam *Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1961 di Yogyakarta*, Koordinator Urusan Penerangan, Jogjakarta, 1961, hal. 96.

²²⁾. G. Vriens S.J., *op.cit.*

²³⁾. M. Henricia Moeryantini CB. *op. cit.*, hal. 16.

ini Sugiyo masih harus menempuh pelajaran bahasa Latin dan Yunani selama satu tahun, pelajaran bahasa-bahasa ini ditempuhnya di gimnasium Ordo Salib Suci. Setelah itu, yaitu pada waktu tanggal 27 September 1920 dia diperkenankan untuk memasuki *noviciat* Sarekat Jesuit di Mariendaal, Grave. Waktu itu yang menjadi pemimpin *noviciat* di sana ialah pastor P. Willekens yang kelak diangkat sebagai Vikaris Aposto Jakarta pada tahun 1934.²⁴⁾

Pada tahun 1922 selesailah masa percobaannya dan mengucapkan kaul-kaulnya yang pertama. Dari tahun 1922–1923 dia menyelesaikan masa yunioratnya. Sebagai langkah selanjutnya dari pendidikan imamatnya, maka frater Sugiyo masih harus melanjutkan pelajarannya, khususnya pada bidang ilmu filsafat. Pelajaran ini ditempuhnya pada *Berchmans College* di Oudenbosch; bidang ilmu ini pun berhasil diselesaikannya dengan baik. Dengan demikian frater Sugiyo sudah akan menjalani kerja pelayanannya yang pertama. Sebagai di dalam Ordo Jesuit terdapat suatu kebiasaan atau ketentuan bahwa seseorang calon imam setelah menyelesaikan pendidikannya itu, maka dia harus menjalani pekerjaan praktis, secara langsung, di dalam masyarakat.

Untuk menjalani tugas-tugas pelayanannya itu, frater Sugiyo ditempatkan di Muntilan dengan mendapatkan tugas sebagai pengajar pada sekolah guru; mata-mata pelajaran yang dipercayaikan kepadanya ialah ilmu pasti, bahasa Jawa dan agama.²⁵⁾ Tugas pengajar di Muntilan itu dijalankan selama dua tahun, yaitu sampai pada tahun 1928.

Pada tahun 1928 frater Sugiyo kembali dikirimkan ke negeri Belanda guna menyelesaikan pendidikan imamatnya pada fase yang terakhir. Pendidikan lanjutannya ini di kota Maastricht. Ketika menjalani pendidikan theologinya ini, terjadilah suatu peristiwa penting baginya, yaitu ia untuk pertama kalinya mengin-

^{24).} *Ibid.*

^{25).} Mgr. Sugiyopranata SJ (1896–1963), di dalam *Seri Pahlawan Nasional Pembela Kemerdekaan*, Departemen Sosial RI. Badan Pembina Pahlawan Pusat, 1972, hal. 100.

jakkan kakinya di Roma. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1929; bersama dengan beberapa frater bangsa Asia lainnya, dia diutus ke Roma untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Paus Pius XI.²⁶⁾ Tentu saja kedatangannya ke Roma dan Vatikan itu membawa arti tersendiri baginya, karena kota ini mempunyai jalinan sejarah yang sangat erat dengan pertumbuhan agama Katolik yang dianutnya itu.

Pada tahun 1931, setelah menempuh pendidikan theologinya selama empat tahun, maka frater Sugiyo pun berhasil mencapai cita-citanya untuk menjadi imam. Dia menerima sakramen imamatnya pada tahun itu, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1931; yang menerima sakramennya ialah Mgr. Schrijnen, Uskup Roemond. Pada waktu itu ada juga orang Jawa lainnya ditasbihkan sebagai imam bersama dengan frater Sugiyo, yaitu frater Reksaatmaja SJ.²⁷⁾

Penyelesaian pendidikan imamatnya pada tahun 1931 itu, tidaklah berarti bahwa pastor Sugiyo dengan segera akan kembali ke tanah airnya. Sebagai pastor justru dia harus menjalankan tugasnya di luar negeri, yaitu di Belgia. Untuk itu dia harus menunggu selama dua tahun, karena baru pada tanggal 8 Agustus 1933 pastor Sugiyo kembali ke tanah airnya.

Setelah mendapatkan gambaran seperti di atas, yaitu sekitar usaha-usaha pastor van Lith untuk mengembangkan karya missi, dan kaitannya dengan awal dari masuknya pemuda Sugiyo menjadi penganut Katolik, maka di bawah ini kita akan memberikan gambaran tentang pelbagai hal dari tindakan-tindakan pemuda Sugiyo. Seperti yang telah dikatakan pada awal tulisan ini, pemuda Sugiyo adalah seorang anak yang memiliki keberanian, kecerdasan dan bakat-bakat yang beragam termasuk bakat kepemimpinan.

Sejak kecil Sugiyo telah memiliki keberanian yang dapat dikatakan agak melebihi teman-temannya yang sebaya. Dia adalah tukang berkelahi tetapi sekaligus juga olahragawan karena dia sangat "pandai" main bola, "Si nakal" Sugiyo paling sering berkelahi dengan sinyo-sinyo Belanda yang ketika itu selalu mendapat

²⁶⁾ M. Henricia Moeryantini CB, *op. cit.*, hal. 17.

²⁷⁾ *Ibid.*

perlakuan istimewa. Agaknya kehendaknya untuk mengadu kekuatan dengan sinyo-sinyo Belanda ini, dilatar-belakangi oleh perasaan tidak senang terhadap perbedaan perlakuan antara anak-anak pribumi dan sinyo-sinyo Belanda itu. Adanya perbedaan perlakuan itu agaknya dirasakannya sebagai suatu tindakan yang tidak adil. Untuk menunjukkan tantangannya terhadap ketidak-adilan itu, Sugiyo mengambil jalan "berkelahi". Dengan berkelahi nampak adanya kesamaan, karena dengan melawan sinyo-sinyo yang mendapat perlakuan istimewa itu, tentulah dapat menunjukkan bahwa sinyo-sinyo Belanda itu tidak lebih istimewa daripadanya. Apalagi jika sinyo-sinyo Belanda dapat dikalahkannya. Untuk menghadapi sinyo-sinyo Belanda ini, Sugiyo tidak hanya secara perorangan. Kalau sekiranya dia kalah secara perorangan, maka ditempuhnya lahan *kroyokan*.²⁸⁾

Di dalam perkelahian-perkelahiannya itu tentu saja Sugiyo baik secara perorangan maupun secara bergerombol, tidak selalu menang. Kalau di dalam perkelahian itu ternyata dia kalah, maka Sugiyo tidak kehabisan akal untuk mengalahkan lawannya itu. Cara lain yang ditempuhnya untuk mencari kemungkinan mengalahkan lawannya ialah dengan bermain bola. Dengan main bola dia akan membala kekalahannya, karena olahraga ini memang sangat disukainya.²⁹⁾

Kenakalannya agaknya dilatarbelakangi pula oleh pelbagai bakat yang ditunjang oleh kecerdasan otaknya. Hal ini makin nampak baik ketika menjadi guru di Muntilan maupun ketika masih sebagai mahasiswa di negeri Belanda. Bakat mengajarnya nampak dengan caranya yang menarik murid-muridnya untuk dengan cepat menangkap pelajaran yang diajarkannya. Dengan contoh yang jelas dengan humor yang segar tetapi disiplin yang kuat. Muridnya tidak hanya menyenanginya kalau dia berada di depan kelas, tetapi juga di luar sekolah. Kesukaan murid-muridnya itu tidak lain oleh karena kegiatan pembimbingnya terhadap murid-muridnya di luar jam pelajaran resminya. Dia

^{28).} *Ibid.*, hal. 14

^{29).} *Ibid.*

mengajar murid-muridnya untuk menanam pelbagai macam tumbuh-tumbuhan di pekarangan sekolahnya. Dia menanamkan kepada murid-muridnya rasa cinta kepada tumbuh-tumbuhan termasuk bunga-bungaan. Hampir setiap sore ada saja sekelompok murid-muridnya yang bekerja untuk memperindah kebun sekolah dengan bimbingannya. Murid-muridnya makin tertarik, sehingga pada waktu mereka pulang dari libur, tidak sedikit di antara mereka yang membawa tumbuh-tumbuhan untuk ditanam di kebun sekolah.³⁰⁾

Darah seni di dalam tubuhnya pun nampak dengan jelas. Kepada murid-muridnya juga digiatkan untuk mempelajari tarian, menabuh gamelan dan perwayangan. Juga dia terkenal sebagai seorang yang pandai berdeklamasi dan mempunyai perhatian di dalam bidang drama.

Bakat menulis pun ada pada dirinya. Sehubungan dengan itu dia diangkat sebagai pemimpin redaksi mingguan berbahasa Jawa *Swara Tama*. Minatnya pun pelbagai macam, ini nampak dalam tulisan-tulisannya yang tertuju pada pelbagai masalah, seperti tari Jawa, pakaian adat, tentang sifat orang Jawa dengan agamanya, juga tentang masalah hubungan Timur dan Barat.³¹⁾

Watak kepemimpinannya pun nampak dan agaknya kharisma kepemimpinan ada pada dirinya. Tanpa disadari orang dia merupakan tokoh pimpinan yang disegani teman-temannya, dia mempesona kawan-kawannya.³²⁾

Pada tahun 1914, ketika pemuda Sugiyo masih menjadi murid sekolah guru di Muntilan, didirikanlah *Kongregasi Maria* bagi murid-murid sekolah guru dan dia diangkat sebagai prefeknya yang pertama.³³⁾

^{30).} Seri Pahlawan Nasional, *loc. cit.*

^{31).} *Ibid.*

^{32).} Y. Weitjens SJ, *op. cit.*, hal. 888.

^{33).} "Anak Sala jang Djadi Uskup Pertama Kita Tidak Ada lagi Mengenang Ramaagung Sugiyopranaata", di dalam *Hidup Katolik*, No. 30, Thn. ke 17, 28 Juli 1963, hal. 406.

Sekembalinya dari Belgia ke Indonesia pastor Sugiyo ditempatkan di gereja Bintaran. Setelah sampai di Indonesia, maka suatu hal yang dilakukannya ialah mengganti namanya dengan nama "tua", yaitu dari Sugiyo menjadi Sugiyoprana. Kebiasaan penggantian nama yang dilakukan itu adalah sesuai dengan adat Jawa.³⁴⁾ Sejak itu namanya pun berganti menjadi pastor Sugiyoprano S.J. Penempatannya di Bintaran adalah sebagai pastor pembantu. Tetapi sebelum itu sebenarnya untuk beberapa waktu pastor muda ini pernah ditempatkan di gereja jalan Senopati sebagai pastor pembantu dan berada di bawah pimpinan pastor van Driessche.³⁵⁾ Pemindahannya ke gereja Bintaran agaknya oleh karena tenaganya memang sangat diperlukan. Ketika itu gereja Bintaran baru saja selesai dibangun dan memang diperuntukkan bagi orang-orang bumiputera.³⁶⁾ Sejak tahun 1936 itu dia terus bertugas di Bintaran; di samping itu pastor muda ini masih mendapat tambahan tugas di Ganjuran. Sejak kepulangannya di Indonesia itu, pelbagai tugas telah dibebankan kepadanya. Tidak hanya sebagai pengkhottbah. Pastor muda ini juga menjadi kategis, penasehat rohani pelbagai organisasi, direktur *Kongregasi*. Demikian pula pimpinan redaksi *Swara Tama*, yang sementara itu tempat penerbitnya telah dipindahkan dari Muntilan ke Yogyakarta, diserahkan kembali kepadanya.³⁷⁾ Juga aktif dalam usaha mendirikan koperasi simpan pinjam untuk warga wilayah kegerejaan³⁸⁾ dengan tujuan untuk meringankan beban pembiayaan hidup anggotanya. Pada tahun 1938 dia diangkat sebagai konsultor untuk missi Sarekat Jesuit seluruh Jawa; pengangkatan jabatan yang mempunyai nilai "kehormatan" ini merupakan pengangkatan yang pertama terhadap diri seorang bumiputera.³⁹⁾

34). *Seri Pahlawan Nasional*, loc. cit.

35). G. Vriens SJ, op. cit., hal. 4.

36). M. Henricia Moeryantini CB. op. cit. hal. 18.

37). G. Vriens SJ, loc. cit.

38). Y. Weitjens SJ, op. cit. hal. 887.

39). "Hidup Katolik", loc. cit.

Kejujuran, keberanian, ketabahannya di dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya pada akhirnya membawanya ke keberhasilan mencapai puncak kariernya sebagai imam. Ini terjadi pada tahun 1940, yaitu ketika beliau diangkat sebagai Uskup Agung untuk daerah Vikariat Apostolik Semarang.

Di balik keberhasilan beliau itu, pastilah kita tidak dapat melupakan jasa-jasa dari para pendidiknya dan salah seorang di antaranya yang terpenting ialah pastor van Lith. Ketika dia masih frater, Mgr. Sugiyoprana pernah memberikan penilaianya terhadap gurunya ini dalam kata-kata, "Seorang bapak yang tajam matanya, yang melihat ke depan amat lebih jauh daripada hampir semua orang Katolik lain jaman itu."⁴⁰⁾ Barangkali memang sangat tepat penilaian itu. Juga ketajaman mata pastor van Lith itu sanggup melihat diri si "Anak nakal" Sugiyo, dan karena itu membimbingnya dengan sepenuh hati. Dan andaikata pastor van Lith dapat menyaksikan pengangkatan muridnya untuk menduduki jabatan itu, maka pastilah bahwa beliaulah orang yang pertama akan menundukkan kepala sambil mengucap terima kasih kepada Tuhan. Sebuah tanda gembira yang tak dapat dinilai dengan ungkapan dunia yang sebanyak apa pun.

⁴⁰⁾ Y. Weitjens SJ, *loc. cit.*

BAB III

MENERIMA TANGGUNG JAWAB

Liku-liku pertumbuhan karya misi di wilayah yang kini disebut negara Republik Indonesia telah berlangsung dengan disertai oleh pelbagai rintangan; baik rintangan itu bersumber dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Demikian pula rintangan itu sering berwujud dalam bentuk yang berat dan ringan. Sehubungan dengan hal itu di sini penulis akan mencoba memberikan gambaran selintas tentang kesulitan-kesulitan yang dimaksud dengan memulainya dari zaman kekuasaan perusahaan dagang Belanda, *Verenigde Oost Indische Compagnie* atau yang lebih terkenal dengan nama singkatannya : VOC, dalam sejarah perkembangan karya misi, masa ini dikenal sebagai masa "gelap"¹⁾. Berlangsungnya situasi seperti itu sebenarnya tidaklah dapat dilepaskan dengan situasi yang sedang berkembang ketika itu, dan waktu-waktu sebelumnya.

Sebagaimana diketahui bangsa Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang telah datang terlebih dahulu di Indonesia, sebelum kedatangan bangsa Belanda. Kedatangannya dilatar-belakangi oleh motif-motif ekonomis, agama dan juga oleh sifat petualangannya.²⁾ Mereka datang untuk mendapatkan bahan-bahan perdagangan yang ketika itu sedang laris di pasaran Eropa, terutama rempah-rempah. Demikian pula api perang salib, yaitu perang antara orang-orang Islam dengan orang-orang Kristen. Demikianlah bangsa-bangsa Portugis dan Spanyol ini telah datang dengan tujuan dagang, tetapi yang disertai pula oleh usaha misi, yaitu penyebaran agama Katolik.³⁾

- 1). *Sejarah Katolik di Indonesia*, Kursus Kader Katolik Sekretariat Nasional. KMCLC. Djakarta, 1971, hal. 36–38.
- 2). Sarsono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia* (jilid III), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975, hal. 327.
- 3). D.H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (jilid III), PN. Pradnya Parmita, Djakarta, 1960, hal. 49; lihat juga Bernard H.M. Vlekke, Nusantara (*Sejarah Indonesia*) Dewan Bahasa Dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1961, hal. 91.

Akan tetapi di dalam perkembangan sejarah selanjutnya, kekuasaan Portugis dan Spanyol secara berangsur-angsur digantikan oleh pendatang baru serta ajaran agama yang berbeda, yaitu bangsa Belanda. Sebagaimana diketahui sejak awal abad ke-17 bangsa Belanda secara berangsur-angsur menanamkan kekuasaannya di wilayah Indonesia, yang kemudian bernama Hindia Belanda, melalui usaha dagangnya, VOC. Pembentukan VOC pada tahun 1602, dalam waktu yang demikian cepat itu agaknya dapat dimengerti karena, sebagaimana halnya dengan bangsa Portugis dan Spanyol, motif kedatangannya ke Indonesia ini tidak lain daripada motif ekonomis di samping sifat petualangannya.⁴⁾

Lahirnya persaingan yang pada saatnya menimbulkan pertentangan di antara bangsa-bangsa asing ini, agaknya memberikan pula pengaruh yang tidak kecil artinya bagi kelangsungan hidup karya misi di wilayah ini. Pengaruh yang dimaksud adalah bersifat menghambat. Sehubungan dengan itu, nampak terlihat bahwa penyebab hambatan itu agaknya juga "berbau" agama. Portugis dan Spanyol merupakan bangsa yang beragama Katolik sedang bangsa Belanda mayoritas pengikut agama Protestan. Tentu saja sedikit banyak penguasa Belanda ini memberikan peluang-peluang istimewa bagi perkembangan *zending*, sebaliknya menghambat usaha-usaha karya *missi*.

Setelah berkuasa selama sekian waktu, akhirnya VOC tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya; ia mengalami kebangkrutan. Faktor penyebabnya tentu saja bermacam-macam. Pegawai yang tidak cakap lagi curang sehingga melahirkan suasana korup di dalam tubuhnya.⁵⁾ Akibat dari semua ini ialah VOC harus menanggung risiko yang akan sangat menentukan kelangsungan hidupnya. Hutangnya pun setiap waktu makin besar. Untuk mengatasi persoalan-persoalan ini, maka pemerintah kerajaan Belanda turut campur untuk kemudian mengambil alih semua

4). Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, (jilid III) hal. 332.

5). Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, (jilid IV) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975, hal. 1.

persoalan ke tangannya. Pada tahun 1799 VOC pun dibubarkan.

Berakhirnya kekuasaan VOC di Hindia Belanda agaknya memberikan pengaruh yang lebih baik bagi kelangsungan hidup karya misi; setidak-tidaknya untuk beberapa waktu. Kemungkinan baik itu juga disebabkan oleh karena perubahan yang terjadi di Eropa, yaitu didudukinya negeri Belanda oleh Perancis. Sehubungan dengan itu pada tahun 1806, tepatnya 7 Agustus, raja Lodewijk Napoleon menetapkan suatu peraturan yang menyatakan bahwa semua agama dinilai sama. Dengan demikian pengistimewaan terhadap Protestantisme sedikit banyak ditidakan.⁶⁾

Peluang yang mulai terbuka kembali untuk karya misi itu agaknya masih harus dilewati dengan pelbagai rintangan. Salah satu di antara rintangan itu adalah masih sangat kurangnya tenaga-tenaga mereka sendiri; jumlahnya sangat sedikit. Jika diperhatikan maka sampai pada pertengahan abad ke-19, tenaga yang bekerja hampir tak pernah lebih dari tujuh orang imam untuk seluruh wilayah Hindia Belanda. Kadang-kadang hanya dua, bahkan hanya satu tenaga saja yang sempat bekerja.⁷⁾ Walaupun demikian karya misi tetap berusaha melanjutkan pelayanannya dengan segala kekurangan yang ada padanya. Untuk itu pada tanggal 4 April 1808 datanglah dua orang imam praja ke Indonesia dan bekerja atas izin pemerintah. Salah seorang di antaranya ialah pastor J. Prinzen. Hanya beberapa bulan setelah berada di Indonesia pastor itu telah menunjukkan hasilnya yang merupakan dasar perkembangan karya misi untuk tahun-tahun selanjutnya. Pada tanggal 27 Desember 1808, pastor J. Prinzen telah ditetapkan sebagai pastor di stasi Semarang dan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal Daendels. Dalam surat pengangkatannya itu disebutkan bahwa selama gereja Katolik di Semarang belum memiliki

6). Pipitseputro, *Beberapa Aspek dari Sejarah Indonesia Aliran Nasionalis, Islam, Katolik Sampai Akhir Zaman Perbedaan Paham*, Nusa Indah Ende Flores, 1973, hal. 64.

7). "Sejarah Gereja Katolik" op. cit. hal. 41.

gedung ibadatnya sendiri, mereka dapat menggunakan gereja *Gerefomeerd*.⁸⁾

Selama beberapa tahun agaknya karya missi dapat berjalan tanpa kesulitan di dalam hubungannya dengan pemerintah. Tetapi situasi yang demikian itu tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi. Hal ini bersumber pada adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah berganti lagi, yaitu ke tangan bangsa Belanda. Peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1830 itu menetapkan bahwa kebebasan beragama dapat dijalankan tetapi disertai syarat: "asal pelaksanaannya tidak mengancam ketenangan dan ketertiban umum"⁹⁾. Jika kelak terjadi perbedaan pendapat yang menyangkut dengan interpretasi terhadap pengertian kata-kata tersebut di atas itu, hal itu tentu dilatar-belakangi oleh sikap mereka serta kepentingan mereka masing-masing. Di dalam kenyataannya perbedaan pendapat itu pun tidaklah dapat dihindari lagi. Pastor H.H. Scholten yang ketika itu menjabat *Prefek Apostolik*¹⁰⁾ tidak menyetujui beberapa tindakan Gubernur Jenderal yang menyangkut dengan pengikut agama Katolik. Antara lain tindakan yang tidak disetujui oleh pastor J.H. Scholten ialah diperkenankannya orang-orang Katolik memasuki organisasi *Freemasonry*, yaitu organisasi yang anti Gereja, dan bahkan bergiat untuk menghalang-halangi pertumbuhan gereja di beberapa tempat di Hindia Belanda. Pastor Scholten juga tidak setuju terhadap diperkenankannya perkawinan campuran di antara orang-orang Katolik tanpa memenuhi persyaratan hukum gereja.¹¹⁾ Penolakan pastor J.H. Scholten terhadap tindakan-tindakan itu mendorong Gubernur Jenderal menuduhnya sebagai orang yang "kurang kerjasama". Atas dasar itu maka Gubernur Jenderal mengancam kepadanya untuk mengajukannya ke pengadilan.¹²⁾

8). "1½ Abad Gereja Katolik Gedangan Semarang", di dalam *Suara Merdeka*, Semarang, 29 Desember 1958.

9). "Sejarah Gereja Katolik di Indonesia" *op. cit.*, hal. 42–43.

10). *Prefek Apostolik*, merupakan jabatan di dalam pemerintahan gereja Katolik yang mengelapai suatu wilayah tertentu. Sebenarnya orang yang menduduki jabatan ini tidaklah berkedudukan uskup, namun secara administratif dapat bertindak sebagai uskup.

11). "Sejarah Gereja Katolik di Indonesia", *op. cit.*, hal. 43.

12). *Ibid.*

Pertentangan ini tentu saja tidak dapat dibiarkan berlangsung secara berlarut-larut karena pasti akan merugikan pertumbuhan karya missi itu sendiri. Agaknya hal ini disadari benar oleh pastor J.H. Scholten, karena itu dia berusaha untuk mencari penyelesaian; untuk itulah maka dia berangkat ke Roma dan negeri Belanda. Hasil usaha konsultasinya itu membawa persetujuan antara Paus dengan Raja Belanda yang antara lain menetapkan bahwa wilayah gereja di Hindia Belanda akan dilepaskan dari kekuasaan gereja di Negeri Belanda. Berdasarkan itu di wilayah ini akan dibentuk suatu hirarki (pemerintahan gereja), yang berupa suatu daerah *Vikariat Apostolik*¹³⁾ tersendiri. Ini berarti bahwa daerah ini akan dipimpin oleh seorang Uskup. Sebagai realisasi dari persetujuan itu, pada tanggal 19 April 1845 tiba lah pastor J. Grooff di Batavia untuk menduduki jabatannya sebagai uskup di daerah *Vikariat Apostolik* yang baru ini. Dia adalah uskup yang pertama untuk wilayah pemerintahan gereja di Hindia Belanda. Ketika tiba di pelabuhan tak seorang pun yang datang untuk menjemputnya. Tetapi hal semacam itu bukanlah hal yang menjadi penghambat baginya untuk menjalankan tugasnya. Mgr. J. Grooff adalah seorang imam yang memiliki keberanian moril dan kejujuran sehingga bersedia untuk menghadapi segala kesulitan yang menghadangnya.

Beberapa waktu setelah menduduki jabatannya itu, maka timbulah pertentangan baru antara Mgr. J. Grooff dengan pihak pemerintah. Ini berpangkal pada adanya peraturan yang menyatakan bahwa "hanya imam yang diangkat dan mendapat keputusan dari pemerintah akan diakui sah dan diperkenankan mengadakan upacara keagamaan di muka umum".¹⁴⁾ Dengan berpedoman pada peraturan itu Mgr. J. Grooff melakukan beberapa tindakan yang bertujuan untuk membersihkan gereja dari segala kekurangan dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum gereja sendiri. Untuk maksud itu Mgr. J. Grooff telah memerintahkan kepada wakilnya untuk melakukan pembersihan sebagaimana yang dikehendakinya. Tindakan ini mendapat

¹³⁾. *Vikariat Apostolik* suatu daerah di dalam pemerintahan gereja yang dipimpin oleh seorang uskup.

¹⁴⁾. "Suara Merdeka, 29 Desember 1958, loc. cit.

tantangan dari pastor Grube yang akhirnya telah mendapat persetujuan dari pihak pemerintah. Atas tindakannya yang tidak mengindahkan keputusan Uskup itu, maka pastor Grube dipecat dari jabatannya. Namun pemecatan pastor Grube itu mendapat tantangan dari pihak pemerintah waktu itu. Sebagai tanda penolakan pemerintah terhadap tindakan Mgr. J. Grooff itu, maka pemerintah mengeluarkan sebuah surat edaran yang menyatakan tidak setuju terhadap tindakan Mgr. J. Grooff itu. Selanjutnya pastor Grube tetap diperkenankan bekerja sebagai pastor untuk gereja Katolik. Gereja yang semula ditutup oleh pemerintah dibuka kembali dengan pastor Grube sebagai imamnya.¹⁵⁾ Pertentangan antara pemerintah dengan Mgr. Grooff akhirnya makin meruncing sehingga tidak dapat diselesaikan secara damai. Pemerintah kolonial akhirnya menempuh jalan penyelesaian yang cukup dramatis yaitu berupa pengusiran terhadap Mgr. J. Grooff dari Hindia Belanda. Alasan pengusirannya antara lain karena J. Grooff dianggap sebagai bersikap *onkolonial*.¹⁶⁾ Tuduhan terhadapnya itu mungkin sekali dilatar-belakangi juga oleh sikapnya terhadap sistem kolonial waktu itu. Karena memang Mgr. Grooff termasuk orang yang telah berani mengajukan kecaman-kecamannya terhadap tindakan-tindakan pemerintah kolonial waktu itu. Sebagai contoh ialah bahwa beliau telah mengecam keadaan kehidupan rakyat yang menyedihkan sebagai akibat dari pelaksanaan sistem tanam paksa.¹⁷⁾ Pengusiran Mgr. J. Grooff sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan misi di Hindia Belanda, khususnya di pulau Jawa. Dengan itu terjadi krisis kelangsungan hidupnya.

Pertentangan yang melahirkan krisis-krisis itu tidaklah dapat dibiarkan berlangsung begitu saja dan harus segera diakhiri.

15). *Ibid.*

16). N. Driarkoro, "Gereja Katolik Dalam Indonesia Merdeka Selama Dua Windu" di dalam Kenang-kenangan Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1960 di Yogyakarta. Panitia Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia, Yogyakarta, 1961, hal. 95.

17). Suara Merdeka, 29 Desember 1958, *loc. cit.*

Kontak-kontak antara Paus dengan Raja Belanda terus dilakukan guna mendapatkan bentuk-bentuk penyelesaian di antara kedua pihak. Hasil kontak dan pembicaraan antara Paus dengan Raja Belanda dituangkan di dalam persetujuan *Nota der Punten*. Di dalam perjanjian itu antara lain disebutkan bahwa jumlah rokhaniawan yang didatangkan ke Hindia Belanda akan ditentukan sendiri oleh pembesar gereja. Di samping itu ditetapkan pula bahwa tak seorang rokhaniawan pun dapat memasuki wilayah Hindia Belanda tanpa *radikal*, yaitu surat izin yang dikeluarkan dan disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya pada 1854 kembali pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa "para guru agama Kristen, imam dan pendeta haruslah mempunyai izin khusus yang diberikan oleh dan atau atas nama Gubernur Jenderal agar dapat bertugas di salah satu wilayah Hindia Belanda. Namun izin ini dapat dicabut jika ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁸⁾

Adanya perjanjian itu, agaknya dapat memberikan peluang gerak kembali kepada karya missi. Pada tahun 1848 Mgr. P.M. Vrancken telah diangkat sebagai *Vikaris Apostolik* di Hindia Belanda. Dengan dibantu oleh lima orang imam praja yang ditempatkan di Jakarta, Semarang dan Padang, Mgr. P.M. Vrancken berusaha mengembangkan kembali karya missi. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebenarnya karya missi masih memerlukan tenaga-tenaga yang makin banyak. Dengan maksud untuk memperoleh tambahan tenaga lagi, maka Mgr. Vrancken berangkat ke Roma dan negeri Belanda. Usahanya ini agaknya dapat berjalan dengan baik dan karena itu datanglah beberapa orang tenaga karya missi ke Hindia Belanda. Dengan usahanya itu Mgr. Vrancken telah meletakkan kembali dasar-dasar untuk perkembangan bagi karya missi secara lebih kokoh.¹⁹⁾

Setelah itu pertumbuhan karya missi dapat berlangsung lagi walaupun dengan tetap disertai oleh pelbagai rintangan yang tidak ringan. Untuk memperlancar jalannya karya missi di Hindia

18). Pipitseputro, *loc. cit.*

19). "Sejarah Gereja Katolik di Indonesia", *op. cit.*, hal. 47.

Belanda, maka pastor Y.B. Palinckx pada tahun 1880 telah mengirimkan laporannya ke Roma yang antara lain berisi pelbagai pertimbangan yang mungkin dapat memperlancar jalannya karya missi di Hindia Belanda. Pertimbangan-pertimbangan itu antara lain ialah:

1. pihak pemerintah Belanda tidak akan merintangi karya missi ini asal dilakukan secara hati-hati.
2. missionaris-missionaris yang dikirim ke Hindia Belanda haruslah yang waspada, sabar, dan bersedia mempelajari bahasa Jawa sampai sungguh mahir.
3. dia harus bersedia menetap di pedusunan yang jauh dari pusat pengaruh-pengaruh Barat.
4. penyelenggaraan karya missi sebaiknya dimulai dengan memberikan bantuan-bantuan yang bersifat non agama, seperti bantuan medis, ekonomi dan pendidikan.
5. harus berusaha untuk melakukan hubungan-hubungan baik dengan pejabat-pejabat birokrasi mulai dari pejabat yang tinggi sampai yang terendah, misalnya dengan bupati, wedana, lurah setempat;
6. pada tahun-tahun awal tibanya para imam di tempat tugasnya, sebaiknya para imam tidak membicarakan masalah-masalah agama sambil menanti datangnya saat-saat yang baik.²⁰⁾

Selanjutnya Palinckx memberikan gambaran tentang jenis orang-orang yang akan datang ke missi, yaitu terdiri dari orang-orang yang tidak puas di dalam pelbagai hal, orang-orang yang mencari keuntungan material, kemudian barulah orang-orang yang memang haus akan ajaran agama.²¹⁾

Saran serta pertimbangan yang dikemukakan oleh pastor Palinckx SJ itu cukup realistik dan di dalam kenyataannya apa yang dikerjakan oleh karya missi sangat sesuai dengan apa yang

20). Y. Wietjens SJ, "Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Agung Semarang" di dalam *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Wilayah-wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Waligereja Indonesia abad ke-20*, (jilid 3B), Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Jakarta, hal. 843.

21). *Ibid.*

dikemukakannya. Sejak itu karya missi sangat memperhatikan lapangan pendidikan. Kita melihat misalnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pastor van Lith di Muntilan. Bidang medis pun tidak kurang pentingnya bagi karya missi. Sebagai realisasi nya kita melihat pesatnya pembukaan rumah sakit di seantero wilayah Hindia Belanda. Agar karya missi dapat berjalan sebagaimana mestinya dan agar para imam dapat berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat, maka para imam yang diterjunkan adalah orang-orang yang cukup memiliki kemampuan bahasa yang baik. Sebelum mereka terjun, dengan tekun mereka mempelajari bahasa setempat. Untuk penyebaran agama Katolik secara tertulis, tentu saja diperlukan tulisan-tulisan dalam bahasa-bahasa setempat. Hal ini pun agaknya disadari oleh karya missi.

Khususnya untuk daerah Jawa Tengah perkembangan karya missi dapat berlangsung pula walaupun dengan pelbagai rintangan. Demikian pula, walaupun stasi Semarang telah mendapat pukulan yang berat dengan pertentangan Mgr. J. Grooff dengan Gubernur Jenderal – pastor Grube, namun missi tetap berusaha untuk melanjutkan pelayanannya. Untuk daerah ini, pusat perkembangan karya missi terdapat di dua tempat, yaitu Bedono (dekat Ambarawa) dan Semarang. Perkembangan selanjutnya tentu saja tidak dapat dilayani oleh satu orang saja yaitu oleh pastor Keyzer. Apalagi ketika itu telah dibuka dua buah sekolah, masing-masing di Mlaten dan Lamper. Guna memperoleh tenaga tambahan, maka pastor W. Hellings dipanggil untuk datang ke Semarang dari tempat tugasnya semula di Kasiwi (Maluku), dia tiba di Semarang pada bulan Januari 1895. Setibanya di Semarang, dia dengan giat mempelajari bahasa Jawa. Tidak berapa lama kemudian pastor W. Hellings sudah mampu untuk menerbitkan sebuah buku berbahasa Jawa yaitu *Kitab Sembahyang Tjilik Kanggo Para Wong Room Katolika*. Kegiatan-kegiatan dalam waktu yang singkat itu telah membawa hasil berupa dipermandikannya puluhan orang di Magelang dan Muntilan.²²⁾

^{22).} *Ibid*, hal. 844–847.

Sementara itu gejala perkembangan maju dari karya missi di Jawa Tengah semakin nampak. Tenaga yang terdiri dari dua orang, yaitu pastor W. Hellings dan Hebrans, jelas tidak cukup. Karena itu provinsial SJ di negeri Belanda berusaha untuk menambah tenaga dan setiap tahun dia bertanya kepada beberapa orang imam-imam SJ yang sedang menyelesaikan pelajarannya tentang kesediaannya ditempatkan di Hindia Belanda atau pulau Jawa. Ketika itu salah seorang imam memberikan jawaban yang berupa pernyataan kesediaannya untuk ditempatkan di mana pun yang dianggap lebih penting; pastor yang dimaksud ialah Frans van Lith.²³⁾ Pada bulan Oktober 1896 Pastor van Lith bersama dengan pastor Hoevenaars tiba di Semarang. Ternyata di dalam perjalanan karya missi selama van Lith berada dan berkarya, nampak telah menunjukkan gejala yang sangat menguntungkan. Pastor ini ternyata memiliki ketabahan, kecerdasan, keberanian dan sikap toleransi yang bernilai tinggi, sehingga di dalam berkarya dia telah menampakkan sikap-sikapnya itu. Di dalam sejarah pertumbuhan kehidupan karya missi di Jawa Tengah, pastor van Lith jelas mempunyai jasa yang agak sulit mendapatkan duanya.²⁴⁾

Pertumbuhan karya missi di Jawa Tengah ini tentu saja memperoleh perhatian khusus dari Roma dan Batavia. Perhatian itu pada saatnya menghasilkan rencana pembukaan sebuah daerah *Vikaris Apostolik* di wilayah gereja ini. Pada tahun 1940 rencana tersebut telah terwujud dengan disahkannya daerah Vikaris Apostolik Semarang pada tahun itu. Pada waktu itu hanya terdapat dua daerah Vikaris Apostolik, masing-masing Vikaris Apostolik Batavia dan Malang.

Pembukaan Vikaris Apostolik Semarang itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan pastor Sugiyopranata SJ. karena peristiwa itu telah pula membawa dirinya ke suatu puncak karya imamatnya. Sebagaimana diketahui, sebuah daerah Vikaris Apostolik haruslah dipimpin oleh seorang uskup agung. Sehubungan dengan itu, maka agaknya Paus di Vatikan berkehendak untuk

²³⁾. *Ibid*, hal. 847.

²⁴⁾. Keterangan selanjutnya tentang karya beliau, lihat kembali uraian pada bab II.

mengangkat seorang uskup agung asal penduduk asli. Untuk maksud mendapatkan calon dari penduduk asli itu beberapa waktu sebelum pembukaan daerah Vikaris Apostolik Semarang, pihak Paus telah meminta advis dari Sarekat Jesus di Hindia Belanda. Sarekat Jesus memenuhi permintaan itu dengan mengirimkan riwayat hidup dua orang pastor penduduk asli ke Roma, masing-masing riwayat hidup pastor Sugiyopranata SJ. dan A. Jayaseputro SJ.²⁵⁾

Kehendak Paus untuk mengangkat uskup agung asal penduduk asli itu tentu saja dilatar-belakangi oleh pelbagai faktor, baik itu faktor di dalam negeri maupun di luar negeri. Faktor dalam negeri ialah makin nampaknya pertumbuhan karya missi, dan ini jelas nampak di dalam ungkapan Mgr. Willekens yang dengan nada pasti menyatakan bahwa Jawa Tengah adalah salah satu dari daerah-daerah missi yang amat subur.²⁶⁾ Situasi di luar negeri, yaitu pecahnya Perang Dunia II yang jelas akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan karya missi di Hindia Belanda. Untuk menghadapi keadaan yang pasti sulit itu, diperlukan seorang uskup yang mampu berdedikasi secara penuh. Agaknya pihak Vatikan menilai pastor Albertus Sugiyopranata SJ lebih tepat untuk menerima tanggung jawab yang jelas membawa pelbagai tantangan di dalam dirinya itu.

Demikianlah pada tanggal 1 Agustus 1940, pastor Albertus Sugiyopranata SJ diangkat sebagai Uskup agung untuk daerah Vikariat Apostolik Semarang. Dengan itu beliau adalah orang pribumi pertama yang menduduki jabatan tinggi di dalam hierarki gerejani ini.

Ketika Mgr. Sugiyopranata diangkat sebagai uskup agung, keadaan daerah keuskupan Semarang dapat digambarkan sebagai berikut. Orang Katolik berbangsa Eropa pada tahun 1940 adalah sebanyak 15.824 orang dan orang Katolik pribumi ditambah dengan orang Cina adalah berjumlah 25.278 orang. Dua tahun

²⁵⁾. P. Willenkens SJ. "Asal Mula Berdirinya Vikariat Semarang" *Inter Nos*, Edisi Istimewa, September, 1963, hal. 8.

²⁶⁾. *Ibid.*, hal. 7.

kemudian, yaitu tahun 1942 jumlah orang Eropa sebanyak 14.934 orang, sedang yang pribumi dan Cina berjumlah 30.460 orang.²⁷⁾ Dari jumlah tersebut di atas nampak bahwa untuk orang Eropa pengaruhnya menurun, sedang untuk penduduk pribumi meningkat jumlahnya. Tentu saja ada beberapa faktor penyebabnya; antara lain faktor itu adalah karena situasi Perang Pasifik yang menjadikan Hindia Belanda sebagai daerah pendudukan Jepang pada tahun 1942. Dengan itu banyak orang Eropa meninggalkan wilayah Hindia Belanda.

Sebaliknya, meningkatnya jumlah pengikut agama Katolik di kalangan penduduk pribumi adalah karena selama dua tahun itu karya missi, walaupun dengan pelbagai kesulitan, dapat berkarya. Dapat dipastikan bahwa meningkatnya jumlah itu tentulah karena ketekunan daripada Mgr. Sugiyoprana yang ketika itu telah menduduki jabatannya selama dua tahun pertama.

Adapun jumlah tenaga karya missi ketika pengangkatan pastor Sugiyoprana sebagai Vikaris Apostolik di Semarang ialah: 73 imam yang berkebangsaan Eropa, 11 imam pribumi, 103 bruder berkebangsaan Eropa, 34 bruder pribumi; sedang suster 251 berkebangsaan Eropa dan 79 yang pribumi.²⁸⁾

Demikianlah dengan pengangkatannya sebagai uskup agung, itu berarti bahwa Mgr. Sugiyoprana SJ telah bersedia menerima tanggung jawab yang akan membawanya ke pergulatan permasalahan yang ruwet. Semua itu memerlukan kejujuran, ketabahan, keberanian dan kecerdasan agar hasil yang diperolehnya membawa manfaat bagi kelangsungan kemanusiaan.

27). Y. Weintjens SJ, *op. cit.*, hal. 886.

28). Sr. M. Henricia SB, *Peranan Monsignore Albertus Soegiyoprana SJ. Dalam Rangka Usaha Membina Kehidupan Gereja di Vikariat Apostolik Semarang Antara 1950–1960*, Skripsi Untuk Memperoleh Sarjana Keguruan Dalam Ilmu Sejarah pada IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1973, hal. 14.

BAB IV

DI MASA PENDUDUKAN JEPANG : AWAL PEKERJAAN DI DALAM KEADAAN YANG SULIT

Di dalam usahanya untuk mendapatkan dan memperluas daerah-daerah pendudukannya, kerajaan Jepang telah memecahkan Perang Pasifik. Pemecahan perang itu diawali dengan penyerangan pasukan-pasukan Jepang ke Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawaii. Setelah mendengar tindakan penyerangan pasukan Jepang ke Pearl Harbour itu, maka Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, mengumumkan pernyataan perangnya terhadap Jepang.¹⁾ Pengumuman pernyataan perang yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal itu tidaklah mempengaruhi menderasnya kemajuan invasi Jepang ke Indonesia. Kemajuan invasi pasukan Jepang ke daerah-daerah Asia Tenggara setelah penyerangan ke Pearl Harbour memang cukup cepat. Kurang lebih tiga bulan setelah penyerangannya ke Pearl Harbour itu, pasukan Jepang pun sudah dapat menduduki seluruh wilayah Hindia Belanda.

Usahanya untuk menduduki wilayah Hindia Belanda dengan secepatnya dapat dimengerti, karena di wilayah ini terdapat pelbagai sumber alam yang sangat diperlukan, baik di masa yang akan datang, tetapi terutama sekali di masa perang seperti keadaannya waktu itu. Tetapi jika dikaji lebih jauh tujuan pendudukan Jepang untuk menduduki wilayah Hindia Belanda ketika itu, maka dapatlah diketahui bahwa Jepang memang bermaksud untuk menduduki Indonesia (nama ini diperkenankan oleh Jepang untuk dipergunakan sebagai pengganti nama Hindia Belanda) sebagai wilayah jajahannya. Sebagai negara industri maju, maka Jepang memerlukan daerah yang akan dijadikannya sebagai tempat pelemparan/pemasaran bagi hasil-hasil industrinya. Di

1). Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1975, hal.1.

samping itu sebagai negara industri Jepang memerlukan pelbagai macam bahan mentah untuk kelangsungan hidup industrinya itu. Penduduknya yang padat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong Jepang untuk mencari daerah koloni di kawasan lainnya. Kenyataan seperti di atas itu tercermin dengan jelas di dalam tuntutan Jepang melalui missi Kobayashi terhadap pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Tuntutan itu antara lain ialah:

1. Hak tidak terbatas untuk imigrasi orang-orang Jepang ke Hindia Belanda.
2. Konsesi untuk sebuah kabel-telegrap dari pulau Yap ke Batavia, dan ini harus berada di tangan orang-orang Jepang;
3. Hak tidak terbatas Jepang di dalam bidang perikanan di Hindia Belanda.
4. Hak tidak terbatas bagi Jepang untuk mengadakan pelayaran pantai antar pelabuhan-pelabuhan di dalam wilayah Hindia Belanda,
5. Hak tidak terbatas bagi Jepang di dalam melakukan eksplorasi bumi Hindia Belanda dan membuka tambang-tambang serta mengembangkan produksi minyak di wilayah ini.
6. Pemerintah Hindia Belanda akan tetap bersedia memberikan kepada Jepang sebagian dari ekspor karet, timah, kina dan bahan-bahan mentah lainnya yang sangat diperlukan di dalam peperangan,
7. Pembangunan industri akan dilakukan dan dikuasai bersama antara Jepang dengan pemerintah Hindia Belanda.²⁾

Setelah pengumuman Gubernur Jeneral yang menyatakan perang kepada Jepang itu, maka dilakukanlah pelbagai langkah untuk menghadapi kemungkinan invasi Jepang ke Hindia Belanda. Salah satu di antara usaha itu dilakukan secara bersama oleh pemimpin-pemimpin Sekutu, yaitu dengan membentuk: *Australian British Dutch American Command* (ABDACOM). Komando pasukan-pasukan di dalam organisasi ini diserahkan kepada panglima pasukan-pasukan Kerajaan Belanda(KNIL) di Hindia Belanda.

2). M.E. Diredja & Redaksi Analisa, *Perang Dunia I dan II dan Latar Belakangnya*, Analisa CV, Jakarta, 1960, hal. 165–166.

Letnan Jenderal H. Ter Poorten. Tujuan ABDACOM ialah mengawasi daerah barrier Malaya, Sumatra dan Jawa dari serangan Jepang. Akan tetapi sebelum pasukan-pasukan ABDACOM dapat bertindak sebagaimana yang diharapkan, pasukan-pasukan Jepang telah berhasil menduduki wilayah-wilayah Hindia Belanda. Demikianlah sejak 8 Maret 1942 Hindia Belanda telah berpindah tangan, dari penjajah Belanda ke tangan penjajah Jepang.

Ketika Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda (Indonesia) di sini sudah ada gerakan untuk memerdekakan diri dari penjajah Belanda. Usaha semacam ini sebagaimana diketahui sudah berlangsung secara teratur sejak tahun 1908.

Sehubungan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan ini, agaknya pemerintah pendudukan Jepang telah mempelajarinya sebelum menduduki wilayah ini. Mereka tahu tentang situasi pergerakan itu beserta pemimpinnya yang terkemuka. Dengan itu, ketika mereka tiba di Indonesia mereka dengan segera melakukan pendekatan-pendekatan terhadap diri pemimpin-pemimpin pergerakan bangsa Indonesia waktu itu.

Dalam menyambut kedatangan Jepang di negerinya, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda. Ada di antara mereka yang menyambut kedatangan penjajah baru sebagai "teman karena propaganda Jepang yang menyatakan dirinya sebagai penyelamat bangsa-bangsa Asia. Ada juga di antara mereka yang menerima Jepang dan bersedia untuk bekerja sama dengan Jepang tetapi itu hanya merupakan "taktik" untuk mencapai cita-citanya yang semula, yaitu kemerdekaan bangsanya. Di lain pihak terdapat pula golongan yang sama sekali menolak kedatangan Jepang di Indonesia. Di antara mereka yang bersedia bekerja sama dengan Jepang, tetapi itu hanya merupakan taktik antara lain adalah Sukarno dan Hatta. Sedang yang sama sekali menolak kerja sama itu dan bergerak secara rahasia (di bawah tanah) antara lain ialah Sutan Syahrir dan Amir Syarifuddin.

Akan tetapi agaknya antara mereka yang bersedia bekerja sama dengan Jepang karena alasan taktik perjuangan, dengan

mereka yang bergerak di bawah tanah terdapat kerja sama yang erat. Hal yang demikian ini jelas di dalam penuturan Bung Karno, sebagai berikut:

"Untuk memperoleh konsesi-konsesi politik yang berkenaan dengan pendidikan militer dan jabatan-jabatan pemerintahan bagi orang-orang kita, kita harus memperlihatkan diri dengan cara collaborasi, kataku."

Jelaslah bahwa kekuatan Bung Karno adalah untuk menggerakkan massa, Hatta menegaskan. Jadi Bung Karno khusus bekerja secara terang-terangan.

Betul Bung Hatتا membantu saya. Karena Bung Hatta terlalu terkenal untuk bekerja di bawah tanah. Biarlah saya, Sjahrir untuk mengadakan gerakan bawah tanah dan menyusun bagian penyadap dan gerakan rahasia lainnya."³⁾

Keterangan tersebut di atas menunjukkan kepada kita bahwa hubungan antara mereka yang bekerja sama dengan Jepang dengan mereka yang bergerak di bawah tanah, jelas sangat erat.

Guna menanamkan kekuasaannya di Indonesia, maka sejak awal kedatangannya di wilayah ini, pemerintahan pendudukan Jepang telah melakukan tindakan, antara lain dengan mengadakan penggantian personalia terhadap jabatan-jabatan tinggi pemerintahan. Sehubungan dengan itu, Jepang agaknya berusaha menarik perhatian bangsa Indonesia dengan cara mendudukkan beberapa orang bangsa Indonesia untuk jabatan-jabatan tinggi. Hal ini dapat kita lihat di Jawa Barat, pendamping gubernur ialah R. Pandu Suradiningrat dan dia dibantu oleh Atik Suardi. Akan tetapi sebagai gubernurnya, tetap dipegang oleh bangsa Jepang, yaitu Kolonel Matsui. Di Batavia juga telah diangkat H. Dahlan Abdullah untuk memegang jabatan kepala pemerintahan, sedang Kepala Polisi diserahkan kepada Mas Sutandoko. Di Jawa Tengah telah diangkat Rd. Muhammad Kholil sebagai wakil gubernur dan Salaman sebagai Residen. Akan tetapi untuk jabatan gubernur tetap dipegang oleh perwira tentara pendudukan Jepang, yaitu Letnan Kolonel Tugu.⁴⁾

3). Cyndy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Gunung Agung, Djakarta, 1966, hal. 265–266.

4). Sartono Kartodirdjo dkk, *op. cit.* hal. 8.

Pembentukan pelbagai badan yang akan digunakan untuk menggerakkan massa rakyat juga dilakukan oleh pemerintah pendudukan. Salah satu badan seperti itu ialah PETA. Pembentukannya juga berdasarkan atas permintaan dari seorang pemimpin bangsa Indonesia waktu itu, yaitu R. Gatot Mangkupraja yang dikirimkannya kepada *Gunseikan* pada tanggal 7 September 1943. Pemimpin Indonesia ini meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah pendudukan Jepang tidak hanya di garis belakang tetapi juga di garis depan, di dalam per-tempuran.⁵⁾ Agaknya permintaan itu sejalan dengan kebutuhan dari pemerintahan pendudukan Jepang waktu itu, yang memang memerlukan tenaga. Karena itulah pada tanggal 3 Oktober 1943 Panglima Tentara ke-16, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengeluarkan suatu peraturan tentang pembentukan Peta ini.⁶⁾ Ketuanya ditunjuk Sukarno, seorang nasionalis yang ketika itu mempunyai pengaruh yang besar di negerinya.

Sementara itu mengikut-sertakan pemimpin bangsa Indonesia di bidang-bidang pemerintahan pendudukan Jepang makin diperluas. Hal ini sejalan dengan isi pidato Perdana Menterinya itu, pada tanggal 1 Agustus 1943, Panglima Tentara ke-16 mengeluarkan penetapan yang mengatur pengikut-sertaan pemimpin-pemimpin Indonesia di dalam lembaga-lembaga pemerintahan militer Jepang. Karena itu orang-orang seperti Husain Jayadiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, Mr. Suwandi, Dr. Abdul Majid, Prof. Dr. Supomo dan sudah barang tentu Ir. Sukarno, telah diangkat sebagai penasehat-penasehat pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

Akan tetapi kerjasama yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia itu agaknya tidaklah mampu membendung tindakan-tindakan kejam yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan pendudukan. Propaganda Jepang yang menyatakan dirinya sebagai "penyelamat" Asia secara berangsur-angsur nampak hanya sebagai siasat yang dilandasi oleh kebohongan belaka.

5). *Ibid*, hal. 14.

6). *Ibid*.

Kempeitai melaksanakan terorinya terhadap pemimpin dan bangsa Indonesia, sehingga orang hidup di dalam tekanan ketakutan. Jepang ternyata hanya berpura-pura sangat antusias terhadap gagasan kemerdekaan Indonesia.⁷⁾ Penderitaan pun makin bertambah-tambah, kekurangan makanan, pakaian dan rasa takut untuk ditangkap menyelubungi rakyat. Rakyat pun dipaksa untuk bekerja secara paksa, sebagai *romusha*. Teror dan tindakan menakut-nakuti itu tidak hanya dilakukan terhadap rakyat biasa atau pemimpin rendahan, tetapi juga terhadap pemimpin-pemimpin yang disegani waktu itu. Bung Karno malah pernah ditempeleng hanya oleh karena beliau terlambat mematikan lampu pijarnya ketika saat penggelapan tiba.⁸⁾ Bung Hatta juga pernah mau dijebak untuk diasingkan ke Jepang dengan alasan agar dia mempelajari semangat Jepang. Beliau dianggap sebagai cendekiawan yang harus mempelajari semangat Jepang agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan kehendak Jepang. Tetapi jebakan ini tidak berhasil. Kisah tentang niat jahat pihak pendudukan Jepang ini telah diungkapkan sendiri oleh Miyoshi, seorang bangsa Jepang yang merupakan juru bahasa pemerintah Jepang pada waktu itu. Dia menerangkan dalam kata-kata sebagai berikut:

Saya berniat menulis memoir. Di dalamnya akan saya tulis juga bahwa ada niatan dari *Ken Pei Tai* untuk mengajak Hatta-san berpiknik ke daerah Puncak. Kemudian di sana *Hatta-san* akan dilemparkan ke jurang dan akan disiarkan dalam surat kabar bahwa *Hatta-san* tewas karena kecelakaan sedang plesir-plesir di daerah Puncak.⁹⁾

Kekangan pemerintah pendudukan Jepang menyangkut pada semua lapangan kehidupan, tidak hanya pada pembubaran partai politik dan pembekuan surat-surat kabar, akan tetapi juga

7). Datus C. Smith Jr. *Indonesia Negeri dan Rakyatnya*, Usaha Penerbit Djaja Sakti, Djakarta, 1964, hal. 75.

8). Cindy Adams, *op. cit.* hal. 275.

9). Haji Soebagijo I.N. "Bung Hatta Kita (Sekilas Kehidupan dari Seorang Pejuang Kemerdekaan, Seorang Patriot, Seorang Demokrat) di dalam "Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke 70". *Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-tjita Perjoangan Bangsa Beberapa Lukisan Pribadi Dan Perjoangan Pada Peringatan Ulang Tahunnya ke 70*, Djakarta, 1972, hal. 37.

pada bidang-bidang pendidikan. Hal ini juga dialami oleh lembaga pendidikan swasta, baik yang diasuh oleh golongan agama maupun oleh golongan nasionalis, termasuk perguruan Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantoro. Hal ini memang cukup kontradiktif sifatnya, karena seperti diketahui Ki Hadjar Dewantoro termasuk di antara pemimpin Indonesia ketika itu yang dikenal dengan empat serangkai, yaitu Bung Karno, Bung Hatta Ki Hajar Dewantara dan Kyai Haji Mas Mansur.

Sejalan dengan keadaan serba sulit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa pendudukan Jepang itu, maka karya missi pun telah mengalami perlakuan-perlakuan buruk dan kejam. Teror dan bahkan pembunuhan terhadap diri penyebar karya missi telah dilakukan oleh para penguasa pemerintahan pendudukan Jepang. Keadaan yang demikian terjadi di seluruh Indonesia.

Di dalam suatu situasi yang sulit, nilai kepemimpinan seseorang justru menjadi ukuran. Karena di dalam situasi itu seorang pemimpin justru menghadapi ujian yang akan sangat menentukan bagi dirinya sebagai seorang pemimpin. Ketabahan, kejujuran, keberanian dan kecerdasannya akan menjadi taruhan untuk menghadapi situasi yang sulit itu.

Ketika Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda, maka hampir semua kegiatan-kegiatan karya missi mengalami pula kesulitan oleh karena tindakan keras dan kejam dari pasukan-pasukan pendudukan Jepang ini. Ketika itu di pulau Jawa hanya ada dua uskup yang dapat berkarya, yaitu uskup Willekens dari Batavia dan uskup Sugiyopranata dari Semarang. Sedang uskup-uskup dari Bandung, Surabaya dan Purwokerto ditawan oleh pemerintah pendudukan, demikian pula pembantu-pembantunya. Ketika para pastor ditawan dengan penuh keberanian Mgr. Willenkens menolak untuk turut serta. Bahkan beliau menulis surat kepada pemerintah pendudukan Jepang yang di dalamnya dikatakan bahwa beliau tidak akan meninggalkan kedudukan dan tugas yang diserahkan kepadanya oleh Bapak Suci di Roma,

10). N. Drijarkoro SJ, "Gereja Katolik Dalam Indonesia Merdeka Selama Dua Windu" di dalam kenang-kenangan: *Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1961 di Jogjakarta 6 Juli – 24 Agustus 1961. Panitia Pekan Raya Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia* Jogjakarta, 1961, hal. 97.

kecuali jika beliau dipaksa dengan kekerasan.¹⁰⁾ Kemampuan Mgr. Willenkens menghadapi penguasa pendudukan Jepang itu agaknya dapat dilakukannya karena beliau memang telah mempunyai pengetahuan yang luas tentang situasi agama dan sifat-sifat bangsa Jepang; hal itu telah dipelajarinya jauh sebelum pecahnya perang. Di dalam menghadapi penguasa pendudukan Jepang itu beliau telah menggunakan pelbagai cara, antara lain dengan melakukan adu domba di antara instansi-instansi pemerintahan pendudukan Jepang pada waktu itu. Juga beliau telah mengambil tindakan yang cukup "unik" yaitu dengan mengangkat dirinya sebagai wakil "resmi" takhta suci Vatikan. Dengan jabatan "diplomatiknya" itu beliau telah berusaha agar karya missi tetap berjalan. Dengan penuh wibawa beliau telah menyelamatkan alat-alat karva missi dari usaha-usaha buruk Jepang; misalnya beliau berhasil mengusahakan agar ruman sakit St. Carolus di Jakarta dapat berjalan terus. Beliau juga berhasil menggagalkan maksud penguasa pendudukan Jepang untuk mengubah gereja Theresia (di Menteng) menjadi gudang perbekalan. Di samping itu beliau juga telah berhasil menolong ratusan orang yang berada dalam kesulitan ekonomis dan orang-orang yang ditahan.¹¹⁾ Hasil yang demikian itu bukan tanpa melalui kesulitan, bahkan beliau pernah juga "merasakan" tempelungan penguasa Jepang.¹²⁾ Namun agaknya hal itu tidaklah menyebabkan kendurnya semangatnya untuk berkarya bagi Yesus.

Mgr. Sugiyopranata tetap dapat menyelenggarakan pelayanan karya missi di vikariatnya, yaitu di wilayah Semarang; juga di Purwokerto karena para pekerja karya missi di daerah ini telah ditangkap oleh penguasa pendudukan Jepang. Tentu saja di dalam usahanya agar supaya pelayanan karya missi tetap berlangsung beliau telah menempuh pelbagai cara dan menjalankan pelbagai siasat. Tetapi dengan cara dan siasat saja tentulah tidak cukup. Semua ini haruslah dilandasi oleh faktor penunjang utama, yaitu

11). *Sejarah Gereja Katolik di Indonesia*, Kursus Kader Katolik Sekretariat Nasional KM/CLC Djakarta, 1971, hal. 128.

12). *Ibid.*

yang berupa kejujuran, ketabahan dan keberanian moril yang bernilai tinggi. Dan semua ini agaknya memang terpadu di dalam diri beliau.

Di dalam menghadapi penguasa pendudukan Jepang itu beliau telah menempuh siasat yang sejauh mungkin menghindari bentrokan langsung dengan pihak penguasa tersebut. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa beliau tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang menentang penguasa pendudukan waktu itu.

Oleh penguasa pendudukan Jepang Mgr. Sugiyopranata agaknya memang termasuk di antara pemimpin yang cukup disegani waktu itu di Semarang. Ini terbukti dengan diundangnya beliau untuk menghadiri pelbagai upacara/resepsi penting yang diadakan oleh penguasa Jepang. Akan tetapi uniknya tak satu pun undangan itu dihadirinya. Sebagai cara untuk tidak menimbulkan amarah penguasa Jepang, tetapi juga tidak merugikan beliau dan keduakannya, maka kepada setiap resepsi di mana beliau diundang dikirimlah sebuah karangan bunga. Cara ini agaknya cukup memuaskan pihak penguasa. Karena itu kepada penjual karangan bunga langganannya, beliau memerintahkan untuk selalu mengirim karangan bunga pada resepsi di mana beliau diundang. Demikianlah, pada setiap resepsi yang diadakan oleh penguasa pendudukan karangan bunga dari beliau selalu nampak, bahkan tidak jarang beliau sendiri tidak tahu akan adanya resepsi itu.¹³⁾

Cara beliau untuk menyelamatkan gereja Atmodirono yang pada suatu ketika akan diambil oleh penguasa pendudukan Jepang untuk digunakan sebagai rumah penginapan, lain lagi. Kepada penguasa yang menjumpainya beliau mengatakan bahwa gereja itu sama sekali tidaklah mungkin/kosong sebagaimana yang diketahui oleh penguasa itu. Setelah mengatakan hal itu, maka segera beliau memerintahkan untuk mengisi kamar-kamar yang masih kosong. Setiap orang diperbolehkan untuk menempati kamar satu, walaupun kamar itu cukup besar. Celakanya walau-

13). *Buku Peringatan Pesta Perak 25 Tahun Mgr. A. Sugiyopranata SJ Ditasbihkan Menjadi Imam 15 Agust, 1931 – 15 Agust 1956*, Panitia Pusat Peringatan Pesta Perak Uskup Semarang, Semarang, 1956, hal. 13.

pun demikian masih juga terdapat beberapa buah kamar yang belum terisi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, beliau menempuh cara yang cukup "unik" yaitu dengan cara menempeli nama-nama imam Semarang di depan pintu kamar yang masih kosong itu. Dan bahkan nama beliau pun tertera di papan di depan salah sebuah kamar yang masih kosong itu. Mungkin sekali bahwa beliau belum pernah memasuki kamar itu.¹⁴⁾ Namun cara itu telah berhasil menyelamatkan gereja tersebut dari penyitaan pasukan pendudukan Jepang.

Di samping tindakan-tindakan di atas, yang mungkin oleh sementara orang dianggap "lucu", beliau juga tidak jarang melakukan tindakan-tindakan yang menentang kepada penguasa pendudukan Jepang tersebut. Salah satu di antaranya bahkan dengan menentang kepada penguasa Jepang untuk memenggal lehernya. Hal ini dilakukannya ketika *Syuchookan* menjumpai beliau dengan maksud untuk meminta gereja Kathedral Randusari agar dapat dijadikan sebagai kantor penguasa pendudukan waktu itu. Mendengar maksud penguasa Jepang itu, yang jelas sangat menyinggung perasaan beliau sebagai pimpinan umat Katolik, maka dengan tegas dikatakannya penolakannya untuk menyerahkan gereja, rumah suci Randusari itu. Agaknya penguasa Jepang itu tetap menghendaki untuk mengambil alih gereja Randusari itu. Karena itu beliau pun menentang dengan kata-kata:

"Itu barang dan tempat yang disucikan. Saya tidak akan memberi izin. Penggal dulu kepala saya, baru tuan boleh memakainya."

Ketika Jepang mengajukan alasan bahwa tidak ada lagi gedung yang pantas digunakan sebagai kantor yang besar, maka beliau menjawab:

"Ada saja. Gedung bioskop itu kan cukup luas dan tempatnya pun tentu pasti cukup strategis."¹⁵⁾

^{14).} *Ibid*, hal. 15.

^{15).} *Ibid*.

Agaknya penguasa Jepang tidak berani melaksanakan maksudnya karena adanya tantangan dan sikap keras dari beliau.

Di masa pendudukan Jepang Gereja Katolik di Indonesia memang mengalami penderitaan dan krisis yang berat sekali sebagai akibat dari tindakan-tindakan kejam dari penguasa pendudukan waktu itu. Pastor-pastor, bruder dan suster-suster asal luar negeri (asing) pada umumnya atau hampir semuanya dimasukkan ke dalam kamp tahanan. Mgr. Aerts, Uksup Maluku-Irian Barat, bersama duabelas orang pastor dan bruder tanpa diperiksa terlebih dahulu telah ditembak mati. Demikian pula delapan belas orang pastor meninggal ketika kapal yang ditumpangi mereka tenggelam ketika dibom. Antara tahun 1942 – 1945 telah meninggal dunia sebanyak 74 orang pastor, 47 orang bruder dan 160 orang suster. Mereka adalah korban daripada kekejaman pihak penguasa pendudukan Jepang.¹⁶⁾

Di masa pendudukan itu juga semua sekolah missi telah diambil oleh pasukan pendudukan Jepang. Kolese di Muntilan, Ambarawa dan Jakarta terpaksa ditutup. Seminari-seminari tingkat menengah terpaksa dibubarkan dan karena itu banyak anak-anak didik terpaksa pulang ke rumahnya, tetapi sebagian lagi dapat diberi pelajaran di pastoran-pastoran. Seluruh pekerjaan yang berat itu dibebankan kepada 12 imam praja dan 11 orang imam dari empat kongregasi.¹⁷⁾

Di dalam menghadapi keadaan yang sulit seperti waktu itu, tentu rakyat khususnya umat Katolik, memerlukan perlindungan atau setidak-tidaknya ada orang yang dapat dijadikan sebagai tempat "mengadu". Sehubungan dengan itu, agaknya mereka menemukan kebutuhan seperti itu di dalam diri Mgr. Sugiyoprana, uskup Semarang. Karena itu tidaklah mengherankan jika beliau banyak sekali menerima surat-surat yang memberi-

16). Pipitsepuro, *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia Aliran Nasionalis, Islam, Katolik Sampai Akhir Zaman Perbedaan Faham*, Nusa Indah, Ende Flores, 1973, hal. 289.

17). "Sejarah Gereja Katolik di Indonesia", *op. cit.*, hal. 127.

tahukan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Baik itu yang berupa pemberitahuan tentang disitanya gedung-gedung missi¹⁸⁾ dan lain sebagainya.

Selama pendudukan Jepang itu, sebagaimana kita ketahui, telah dilakukan penangkapan terhadap diri banyak orang, termasuk para imam. Mereka yang ditangkap itu ditempatkan di dalam kamp-kamp tawanan yang dijaga ketat oleh penguasa pendudukan. Keadaan kamp-kamp tawanan itu tentulah sangat buruk karena itu sungguh menyiksa mereka yang berada di dalamnya. Sungguh, keadaan yang demikian itu tentulah akan sangat sedih melihatnya; karena ikut merasakan kepedihannya hidup yang dialami oleh mereka yang ditawan itu. Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, maka Mgr. Sugiyoprana telah mengambil langkah-langkah yang diharapkannya akan dapat meringankan penderitaan mereka yang telah menjadi penghuni kamp-kamp tawanan Jepang

Untuk maksud itu beliau telah mengajukan usul perbaikan keadaan dari mereka yang ditahan. Pemeliharaan keadaan dan jiwa sangat perlu dijamin dengan sebaik-baiknya. Dimintakannya kepada penguasa agar para imam yang sudah berusia sekitar 60 tahun diperbolehkan untuk ditawan bersama-sama dengan tawanan-tawanan perempuan dan anak-anak; jadi mereka ditahan di dalam satu kamp-kamp secara bersama. Tentulah usul beliau itu tidak serta-merta diterima oleh penguasa pendudukan. Tentu saja demi nama baik penguasa dan untuk menghindari penilaian buruk dari luar. Akan tetapi di dalam kenyataannya, kemudian usul-usul beliau itu dijalankan oleh penguasa pendudukan. Hanya saja pelaksanaan itu seakan-akan memang direncanakan oleh penguasa pendudukan dan bukan karena prakarsa dari Pastoran Gedangan. Karena itulah maka orang luar tidak mengira kalau pengaturan yang demikian itu justru datangnya dari Mgr. Sugiyoprana, penghuni Pastoran Gedangan.¹⁹⁾

Sesuai dengan keadaan yang serba sulit waktu itu, maka keadaan hidup dari Mgr. Sugiyoprana sangat sederhana dan prihatin. Di dalam menjalankan tugas-tugasnya beliau tidak

18). "Buku Peringatan Pesta Perak Op. cit, hal. 13.

19). *Ibid*, hal. 15.

menaiki mobil-mobil yang mengkilap karena mobilnya ini memang telah disita. Kalau beliau mengunjungi suatu tempat, beliau jalan kaki atau naik kuda dan paling-paling naik andong. Beliau memang mempunyai dua ekor kuda tunggangan yang selalu siap untuk mengantarkan beliau, baik pagi, sore dan malam hari, ke tempat tujuannya. Akan halnya dengan kedua ekor binatang ini, beliau bangga dan menyebutnya dengan "temanku Max dan Slamet". Sedang di Klaten telah tersedia sebuah andong beserta lima ekor kuda yang siap mengantarkan beliau untuk menjalankan tugasnya dan melakukan kunjungan ke daerah-dareah Solo dan Yogyakarta. Sedangkan jarak-jarak yang lebih jauh akan dikunjunginya dengan naik kereta api, yang jelas ketika itu bukan kendaraan mewah karena sesaknya dan kutu busuk yang bertebaran pada tempat duduknya.²⁰⁾

Penderitaan yang dialami oleh Ummat Katolik di masa pendudukan Jepang itu, tidaklah dapat mematahkan semangat gembala-gembala karya missi. Malah persatuan mereka bertambah kokoh dan tetap akan melanjutkan pekerjaannya untuk menebarluaskan "terang Yesus" di bumi Indonesia. Sikap tabah ummat Katolik ini pada saatnya memancing perasaan kagum dari orang-orang lainnya, bahkan juga dari mereka yang memusuhiya waktu itu, yaitu pasukan pendudukan Jepang. Hal yang demikian ini terbukti dengan sikap salah seorang perwira tinggi Jepang yang berbalik memeluk agama Katolik sebagai keyakinannya. Dia demikian kagum terhadap ketabahan dan persatuan ummat Katolik dan bersedia untuk menjadi salah seorang warganya. Dia bertobat menjadi penganut Katolik, malah kemudian menulis buku yang menggambarkan pengalaman-pengalamannya di pulau bunga.²¹⁾

Sebagaimana halnya dengan keadaan sesamanya ummat Katolik, maka Mgr. Sugiyopranata pun tetap tabah menghadapi semua kesulitan-kesulitan ini. Semua ini tidak mempengaruhi sikap ramahnya dan wataknya yang penggembira. Setiap kesulitan

20). *Ibid*, hal. 11.

21). Pipitseputro, *op. cit.*, hal. 290.

yang dihadapinya akan selalu dijawabnya dengan memohon kebesaran Tuhan Yesus dan selalu atas namaNYA, *In Nomine Iesu*. Dan agaknya itulah kunci keberhasilan di dalam menjawab kesulitan dan tantangan yang dihadapinya.

BAB V

DARI SEMARANG KE YOGYAKARTA

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Sukarno – Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia dan kedua pemimpin bangsa Indonesia ini melakukan hal itu atas nama bangsa Indonesia. Demikianlah, sejak hari itu bangsa Indonesia telah mengumumkan kepada ummat manusia di dunia dan kepada dirinya sendiri, bahwa mereka telah merdeka, lepas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Sejak hari itu juga bangsa Indonesia memberitahukan kepada dunia, bahwa negara yang mereka dirikan atas dasar persetujuan bersama dari mereka yang mendiaminya adalah sebuah negara republik, yaitu Republik Indonesia. Dan bangsa Indonesialah yang akan mengatur diri dan kelangsungan hidup negaranya itu berdasar atas kehendak mereka. Hal yang sebenarnya sudah berpuluhan tahun yang lalu diimpikannya.

Berita pengumuman proklamasi itu segera dengan cepat meluas ke seluruh kota Jakarta dan seluruh Indonesia, bahkan juga ke seluruh jagad. Meluasnya berita itu tidak lain adalah karena jasa dari pemuda-pemuda republikan yang bekerja di kantor berita Jepang, *Domei*. Dalam hal ini jasa Adam Malik dan Syafrudin tidaklah dapat dilupakan. Karena dengan tidak menghiraukan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin akan menimpanya, keduanya telah menyiaran berita melalui kantor berita Jepang itu yang kebetulan memang merupakan tempat mereka bekerja.

Pernyataan kemerdekaan saja tentulah tidak cukup. Karena negara yang baru saja kita umumkan pendiriannya itu tentulah memerlukan peralatan untuk menatanya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya sejalan apa yang dikatakan di dalam proklamasi itu sendiri. Untuk maksud itulah, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 para pemimpin kita yang tergabung di dalam

Panitia Persiapan Kemerdekaan mengadakan rapatnya. Dari rapat itu telah diambil pelbagai keputusan penting yang antara lain ialah:

1. mengesahkan undang-undang dasar Republik Indonesia,
2. mengangkat Ir. Sukarno dan Drs. Muhammad Hatta, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional;
4. mengadakan 12 kementerian,
5. wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi delapan buah provinsi,
6. menjalankan politik perdamaian,
7. presiden selekasnya membentuk partai nasional Indonesia.

Tindakan ini disusul oleh tindakan-tindakan lainnya, seperti pembentukan kabinet yang pertama dan bersifat kabinet presidensial karena presiden langsung memimpin kabinet, pembentukan kabinet ini dilakukan pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang pelantikan anggota-anggotanya dilakukan pada tanggal 29 Agustus. Anggota-anggota KNIP ini terdiri dari wakil-wakil daerah di seluruh Indonesia akan tetapi karena situasi ketika itu belum memungkinkan pemilihan di daerah-daerah maka wakil-wakil daerah itu hanyalah mereka yang berada di Jakarta pada waktu itu.¹⁾

Guna menyambut dan menunjukkan akan adanya dukungan kuat dan luas terhadap proklamasi oleh rakyat, pada tanggal 19 September 1945 diadakanlah suatu rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta. Rapat raksasa itu dihadiri oleh puluhan ribu rakyat yang berdiam di Jakarta dan sekitarnya. Acara rapat raksasa itu ialah mengibarkan bendera negara Republik Indonesia, Sang Merah Putih dan mendengarkan pidato Presiden. Di dalam pidato-

1). *Indonesia Album Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 Dari Negara Kesatuan*, Badan Pimpinan Harian Pusat Corps Cacab Veteran dan Badan Penerbit Alda CV, Jakarta, 1975, hal. 11-13.

nya yang hanya diucapkannya selama lima menit itu, Presiden Sukarno menganjurkan agar rakyat tetap tenang, tetapi tetap siap sedia menerima perintah untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu.²⁾

Sebuah negara yang merdeka haruslah mempunyai alat pengaman dan pertahanan dan agaknya hal ini disadari juga oleh para pemuda, terutama para bekas *PETA* dan *Heiho*. Mereka ini telah mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat, yaitu dengan melalui Badan Pembantu Prajurit (BPP) dan keputusannya yang utama ialah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini dimaksudkan untuk menampung anggota-anggota Peta dan *Heiho*. Akan tetapi menurut Jenderal Nasution pembentukan BKR ini tidaklah dimaksudkan untuk membentuk suatu organisasi ketentaraan, karena badan ini hanyalah sekedar badan untuk menampung anggota-anggota Peta dan *Heiho* dengan tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.³⁾ Ketika itu BKR adalah merupakan korps bantuan di daerah-daerah setempat guna menjamin tetap berlangsungnya ketenteraman umum.

Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan kita akhirnya juga sampai di Yogyakarta dan Semarang, yaitu kota-kota terpenting di Jawa Tengah. Reaksi rakyat dan pemimpin di kedua kota itu adalah menyokong penuh terhadap proklamasi itu. Hal ini nampak dengan tindakan dari Sultan Hamenok II Buwono dan Paku Alam yang dengan segera mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta atas tindakan beliau untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia; ucapan selamat itu dikirimkan oleh Sultan pada tanggal 19 Agustus 1945. Keesokan harinya, yaitu tanggal 20 Agustus, Sri Sultan memberikan sambutannya atas proklamasi kemerdekaan itu yang dimuat pada harian *Sinar Matahari*; beliau antara lain berkata bahwa lahirnya Indonesia merdeka itu dalam masa yang genting. Karena itu beliau menganjurkan agar kita semua sanggup mengorbankan

2). *Ibid.*, hal. 18.

3). A.H. Nasution, *Sejarah perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata*, Mega Bookstore, Djakarta, 1966, hal. 58.

kepentingan masing-masing untuk menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa.⁴⁾ Seperti halnya di Yogyakarta, di Semarang pun proklamasi disambut dengan memberikan dukungan penuh terhadapnya. Bahkan dengan tegas Mr. Wongsonegoro telah mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa hanya bendera Merah Putih yang boleh dikibarkan di daerah Semarang.⁵⁾

Proklamasi, pembentukan peralatan-peralatan pengaturan kehidupan bangsa dan negara, seperti Kabinet, KNIP, BKR, agaknya belumlah cukup. Hal ini tidak disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk mengatur negara yang baru saja kita nyatakan pendiriannya, akan tetapi itu semua disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak mau menerima pernyataan kemerdekaan itu, dalam hal ini terutama bangsa Belanda yang memang telah sekian lama menikmati hasil kekayaan alam negara itu.

Demikian pula halnya dengan Jepang, mereka juga tidak bersedia menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Karena itu ketika pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan pemuda-pemuda akan mengambil alih pemerintahan dan senjata-senjata dari mereka, mereka tidak bersedia menyerahkannya; bahkan mereka mengancam akan melakukan tindakan kekerasan jika para pemimpin dan pemuda bangsa Indonesia akan melanjutkan niatnya. Keadaan yang demikian itu dengan sendirinya melahirkan situasi tegang antara kedua belah pihak. Walaupun demikian, hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia para pemuda dan para pemimpin, terutama pemuda-pemudanya tetap berusaha merebut kekuasaan dan persenjataan dari tangan penguasa pemerintahan Jepang. Dengan itu dapat dimengerti jika sering terjadi pertentangan "berdarah" di antara kedua belah pihak.

-
- 4). *Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, Kementerian Penerangan, tanpa nama tempat, 1953, hal. 35.
 - 5). *Republik Indonesia Propinsi Djawa Tengah*, Kementerian Penerangan, tanpa nama dan tempat, 1953, hal. 22.

Jika kita meninjau lebih jauh, maka penolakan Jepang untuk tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada pihak pemerintah Republik Indonesia mempunyai landasan "hukum". Karena sebagai negara yang kalah dalam perang, maka mereka harus tunduk kepada "peraturan" yang telah ditentukan oleh pihak pemenang, yaitu pihak Sekutu. Sehubungan dengan itu, oleh pihak Sekutu telah diberikan ketentuan bahwa selama pasukan-pasukan Sekutu belum tiba di Indonesia untuk mengambil-alih kekuasaan dari mereka, mereka lah yang menjalankan tugas-tugas untuk tetap mempertahankan ketertiban umum. Agaknya pihak Jepang yang kalah perang itu mau mentaati ketentuan yang dikeluarkan oleh Sekutu itu. Dan ini pulalah rupanya yang menyebabkan penolakan pemerintah Jepang untuk segera menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah negara Republik Indonesia yang baru dinyatakan kemerdekaannya itu.

Pada bulan September 1945 pasukan-pasukan Sekutu secara berangsur-angsur mulai tiba di Republik Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang. Di dalam melaksanakan tugas pendudukannya itu pasukan-pasukan Inggris yang mewakili Sekutu, membagi dua wilayah republik yang masing-masing diserahkan kepada pasukan-pasukan Inggris dan Australia; dalam hal ini, Jawa, Madura dan Sumatera diserahkan kepada pasukan-pasukan Inggris, yang sebagian berbangsa India-Gurkha sedang untuk Indonesia Timur diserahkan kepada pasukan-pasukan Australia.⁶⁾ Kedatangan Sekutu yang datang untuk mengambil alih kekuasaan dari Jepang itu mengembangkan tugas yang telah ditentukan, seperti: (1) membebaskan para tawanan perang, (2) melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk kemudian dipulangkan, (3) menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.⁷⁾

6). A.H. Nasution, "Sejarah Perjuangan Nasional, *op. cit.*, hal. 67.

7). Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, (jilid VI) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa nama tempat, 1975, hal. 31.

Oleh bangsa Indonesia kedatangan pasukan Sekutu pada mulanya disambut dengan sikap yang cukup tenang; tidak ada reaksi yang bersifat menentang. Mereka agaknya beranggapan bahwa adanya Sekutu di Indonesia itu hanya bersifat sementara karena tentunya setelah menyelesaikan tugasnya akan kembali dengan segera ke negerinya masing-masing. Dengan itu mereka memerlukan suatu situasi yang tenang agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara baik dan cepat. Akan tetapi agaknya sikap "ramah" bangsa Indonesia di dalam menyambut kedatangan Sekutu tidak dapat berlangsung lama dan berubah menjadi rasa curiga terhadap tindakan-tindakan dari pasukan pendudukan Sekutu itu. Namun suatu hal perlu dicatat ialah bahwa perubahan sikap yang demikian itu tidaklah bersumber dari bangsa Indonesia, tetapi justru dari sikap pasukan Sekutu sendiri. Tindakan-tindakan Sekutu sangat merugikan kemungkinan kelangsungan bangsa Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya dan penjajahan asing dan kini telah mendirikan sebuah negara, yaitu negara Republik Indonesia. Tindakan itu nampaknya tidak menghargai kehendak bangsa Indonesia untuk mengatur kehidupannya sendiri. Tindakan yang demikian terwujud dengan adanya kesempatan yang diberikan oleh Sekutu terhadap pasukan-pasukan Belanda yang ikut mendarat di bumi Indonesia. Yang dimaksud dengan itu ialah adanya orang-orang Belanda yang tergabung di dalam: *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA). Sikap Sekutu yang demikian itu rupanya hanyalah perwujudan dari usaha untuk memenuhi isi dari suatu persetujuan khusus yang telah dilakukan antara Sekutu/Inggris dengan Belanda, yaitu *Civil Affair Agreement*. Di dalam perjanjian khusus ini telah ditentukan bahwa "Inggris akan menggunakan organisasi sipil Belanda di Indonesia.⁸⁾ Ketentuan yang demikian itu jelas sangat bertentangan dengan kehendak bangsa Indonesia yang sudah tidak menghendaki lagi adanya bangsa lainnya menjadi *tuan* di negerinya, juga tidak untuk bangsa Belanda. Akan tetapi agaknya Inggris harus memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam *Civil Affair Agreement*

8). A.H. Nasution, "Sejarah Perjuangan Nasional . . . op. cit. hal. 65.

itu, dan karena mereka pun membuka kesempatan bebas bagi NICA untuk ikut mendarat di bumi Indonesia.

Oleh bangsa Indonesia sikap Sekutu yang demikian itu tidak dapat lagi ditolerir, karena mereka mengetahui dengan pasti bahwa kedatangan Belanda/NICA mempunyai latar belakang keinginan untuk berusaha mengembalikan kekuasaan penjajahannya di Indonesia. Dan dengan demikian dapatlah dimengerti jika antara pasukan-pasukan Sekutu dengan pemimpin/rakyat Indonesia telah timbul ketegangan yang pada saatnya dapat melahirkan sengketa "berdarah". Salah satu di antara sengketa yang dimaksud ialah pertempuran 10 Nopember 45 yang kini tetap dikenang sebagai Hari Pahlawan, yang setiap tahun diperangi sebagai hari besar bangsa Indonesia.

Setibanya di Indonesia, segeralah pasukan-pasukan Sekutu menguasai kota-kota penting di Indonesia seperti Bandung, Semarang, Surabaya dan lain-lainnya. Dengan sendirinya NICA pun ikut pula mendarat di tempat-tempat tersebut. Mereka pun sangat giat untuk memperkuat kedudukannya. NICA dengan giat berusaha untuk mengambil alih pemerintahan sipil dan mengaturnya sesuai dengan rencana mereka. Untuk itu pulalah maka mereka segera pula membangun kembali kekuatan militernya dengan cara mempersenjatai kembali orang-orang KNIL yang baru saja dilepaskan dari kamp-kamp tawanan Jepang. Untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia itu Belanda bersedia menempuh jalan "kotor" sekalipun. Karena itulah dapat pula dimengerti jika NICA yang telah berusaha mengambil alih kekuasaan sipil di Indonesia itu, melakukan tindakan-tindakanan propokasi-propokasi dengan tujuan untuk memperlincin jalannya rencana mereka. Tindakan-tindakan propokasi mereka antara lain dalam bentuk memancing kerusuhan di tempat-tempat di mana mereka berada: karena itu terjadilah pelbagai bentuk kerusuhan di kota-kota Jakarta, Bandung, Surabaya⁹⁾ dan di kota-kota lainnya di Indonesia.

9). Sartono Kartodirdjo dkk, "Sejarah Nasional . . . , (jilid VI) op. cit., hal. 32.

Sejalan dengan tugasnya di pulau Jawa maka pasukan-pasukan Inggris pun memperlebar kekuasaannya ke seluruh Jawa dan pada tanggal 20 Oktober mereka pun mendarat di kota Semarang, kota terpenting di Jawa Tengah dan tempat dari pusat pemerintahan Vikariat Semarang yang dipimpin oleh Mgr. Sugiyopranata. Ketika itu situasi di Semarang memang sudah sangat genting karena sebelum kedatangan pasukan Inggris di kota itu, memang telah terjadi pertentangan yang kemudian melahirkan pertempuran berdarah antara pasukan-pasukan Jepang dengan pemuda/rakyat Semarang.

Sebagaimana halnya di tempat lain kedatangan pasukan Inggris di Semarang itu diboncengi pula oleh orang-orang Belanda NICA. Pemboncengan NICA itu akhirnya diketahui juga oleh para pemuda pejuang/rakyat kota Semarang. Karena itu mereka tidak bersedia menerima kedatangan NICA dan berbalik memerangi pasukan-pasukan Sekutu. Karena itu pasukan-pasukan Sekutu yang tiba di Semarang dan kemudian sebagian akan menuju Ambarawa dan Magelang tidak dibiarkan lewat begitu saja. Sekutu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan para pejuang/rakyat Semarang, Ambarawa dan Magelang. Mereka dengan ketat mengawasi pasukan-pasukan pendudukan Sekutu yang berada di daerah mereka masing-masing. Sehubungan dengan itu, maka untuk menghindari kemungkinan yang tidak dikehendaki, mengalirlah kekuatan-kekuatan pemuda/rakyat yang tergabung di dalam TKR dan badan-badan kelasykaran Jawa Tengah ke jalur-jalur daerah Semarang-Ambarawa-Magelang.¹⁰⁾ Suasana tegang pun terjelma dan ini pada akhirnya melahirkan pertempuran di antara kedua belah pihak. Demikianlah, ketika pasukan Inggris yang berasal dari Semarang menuju Magelang, mereka telah mendapat perlawanan dari pemuda-pemuda/rakyat pejuang. Di dalam menghadapi para pejuang ini, Sekutu telah menggunakan pula tenaga-tenaga dari pasukan-pasukan Jepang yang ketika itu memang

¹⁰⁾. Mohammad Oemar; *Pahlawan Nasional Jenderal Gatot Subroto*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 1976.

sudah berada di bawah komando Sekutu. Dengan itu Inggris menghadapi suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarinya, yaitu bahwa kekuatan perlawanan rakyat agaknya tidak dapat dipatahkan ketika itu; karena itu mereka mengurungkan maksudnya untuk menduduki Magelang. Dan ketika mereka sampai di Magelang mereka hanya mengambil tawanan-tawanan berbangsa Belanda yang ada di kota itu. Demikian dahsyatnya perlawanan rakyat terhadap pasukan pendudukan Inggris itu, nampak oleh adanya tindakan Jenderal Christison, panglima Sekutu yang terpaksa meminta bantuan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mempergunakan pengaruhnya guna meredakan situasi yang gawat itu. Sehubungan dengan itu maka Presiden Sukarno menyatakan bahwa perlawanan-perlawanan terhadap pasukan-pasukan Inggris sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah kegiatan-kegiatan untuk mengusir NICA dari Indonesia. Guna membuktikan penegasannya itu Presiden Sukarno, yang disertai oleh Wakil Presiden Hatta dan Menteri Pertahanan datang ke Magelang; setibanya di Magelang Presiden memerintahkan kepada pasukan-pasukan Republik untuk menghentikan tembak menembak. Tetapi untuk itu Inggris harus mengundurkan diri dari Magelang. Peristiwa ini terjadi pada akhir Oktober.¹¹⁾

Dalam situasi yang serba sulit, penuh dengan hal yang menegangkan itu, Mgr. Sugiyoprana, baik sebagai warganegara Republik Indonesia maupun sebagai kepala hierarki gereja untuk daerah Vikariat Semarang, telah berusaha untuk mengambil bagian guna menciptakan suasana yang menguntungkan perjuangan bangsanya. Hal ini akan nampak kita lihat pada uraian di bawah ini.

Setelah mendengar berita bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, yang kemudian dipertegas dengan maklumat dari Mr. Wongsonegoro, maka dengan segera beliau memerintahkan untuk membuat bendera Merah Putih yang besar. Bendera negara Republik Indonesia itu kemudian

11). A.H. Nasution, Sejarah Perjuangan Nasional, . . op. cit. hal. 37.

dipasang di depan gedung Pastoran Gedangan; sejak itu pastoran Gedangan selalu "dihiasi" oleh bendera Republik Indonesia itu berkibar dengan megahnya setiap hari. Dengan sendirinya tindakan Mgr. Sugiyoprana itu sangat tidak menyenangkan hati pihak penjajah Belanda/NICA. Karena itu beliau pernah mendapat teguran dari pimpinan NICA atas pengibaran bendera Merah Putih itu. Akan tetapi teguran NICA dijawab bahwa pihak Sekutu tidak pernah mengeluarkan larangan pengibaran bendera Merah Putih itu. Dikatakannya bahwa pengibaran bendera itu merupakan pertanda kepatuhannya kepada pemerintah di sini. Selanjutnya malah beliau menantang kepada pimpinan Belanda/NICA dengan berkata, "Kalau kamu ingin bendera itu turun, coba datanglah kembali dan rebutlah kekuasaan di sini." ¹²⁾

Sebagaimana dikatakan di atas bahwa antara pasukan-pasukan pendudukan Jepang dengan pasukan pemuda/rakyat Semarang telah terjadi pertempuran yang berlangsung selama lima hari. Di dalam pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Lima Hari itu, Mgr. Sugiyoprana telah terlibat langsung untuk menyelesaiannya. Terjadinya Pertempuran Lima Hari itu agaknya karena adanya tindakan-tindakan balas dendam. ¹³⁾ Dengan tindakan-tindakan pemuda-pemuda kita itu, maka timbulah kemarahan di pihak Jepang dan karena itu mereka melakukan penyerangan terhadap kota Semarang. Penyerangan Jepang itu dipimpin oleh Mayor Kido. ¹⁴⁾ Sehubungan dengan itu, tentulah Mgr. Sugiyoprana tidak tinggal diam melihat pertempuran yang pasti menimbulkan korban yang tidak sedikit. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 20 Oktober 1945, yaitu pada hari pertama pendaratan pasukan Sekutu di Semarang, datanglah

12). Buku Peringatan Pesta Perak 25 Tahun Mgr. Sugiyoprana SJ Ditabihkan Menjadi Imam 15 Agust. 1931 – 15 Agust. 1956, Panitia Pusat Peringatan Pesta Perak Uskup Agung Semarang, Semarang, 1956, hal. 17.

13). *Ibid.*

14). H. Rosihan Anwar. *Kisah-kisah Zaman Revolusi Kenang-Kenangan Seorang Wartawan 1946–1949* Pustaka Jaya, Jakarta, 1974, hal.22.

beberapa orang komandan pasukan Sekutu/Inggris ke Pastoran Gedangan dengan tujuan, tentunya untuk mengadakan pembicaraan dengan Mgr. Sugiyoprana. Kesempatan kunjungan komandan-komandan pasukan Inggris ini digunakan oleh beliau untuk mendesak Sekutu agar segera berusaha menghentikan pertempuran itu. Akan tetapi bagi Inggris pelaksanaan desakan Mgr. Sugiyoprana itu mengalami kesulitan karena mereka belum mengenal pimpinan pasukan Jepang di Semarang itu. Alasan Sekutu itu agaknya memungkinkan lagi bagi Mgr. Sugiyoprana untuk mengambil tindakan lebih lanjut, yaitu dengan memanggil komandan pasukan Jepang ke pastoran Gedangan. Namun agaknya pertemuan pemimpin-pemimpin kedua pasukan itu belum juga dapat melicinkan jalan pengakhiran pertempuran itu. Di dalam saat-saat yang genting itu pada jam dua siang, datanglah beberapa orang dari medan pertempuran guna melaporkan situasi yang dihadapi oleh rakyat di daerah pertempuran itu kepada beliau. Dengan nada sedih mereka melaporkan kepada beliau tentang situasi penderitaan rakyat, antara lain diceriterakan bahwa ada bayi-bayi yang menderita karena air susu ibunya sudah mengering; mereka sudah beberapa hari tidak makan.

Keadaan penderitaan yang demikian itu oleh Mgr. Sugiyoprana diceriterakan pula kepada komandan-komandan pasukan yang hadir di pastoran Gedangan itu. Beliau kembali mendesak kepada kedua belah pihak, Inggris dan Jepang, untuk segera bertindak guna mengakhiri pertempuran yang telah menimbulkan penderitaan kepada rakyat yang tidak tahu apa-apa itu. Karena itu kedua kelompok pimpinan pasukan Inggris dan Jepang, melakukan perundingan di dalam suasana tegang. Setelah itu akhirnya kedua belah pihak akan berusaha mengakhiri pertempuran itu dan pada jam lima sore dilaksanakanlah penghentian tembak menembak di antara pasukan Jepang dengan para pemuda pejuang. Dengan itu berarti usaha Mgr. Sugiyoprana telah berhasil.¹⁵⁾ Dengan itu berarti pula beliau telah menyelamatkan sekian banyak jiwa manusia dan mengakhiri penderitaan mereka.

15). "Buku Peringatan Pesta Perak . . . loc. cit.

Keterlibatannya dalam penyelesaian Pertempuran Lima Hari itu tidaklah dengan tanpa resiko. Salah satu di antaranya hampir saja terjadi oleh karena kesalah-pahaman dari pihak pemuda-pemuda pejuang kita. Ceriteranya adalah sebagai berikut: Ketika pimpinan Sekutu dengan pimpinan Jepang sedang melakukan perundingan di pastoran Gedangan, dan ini sebagaimana dikatakan tadi adalah inisiatif dari beliau sendiri, para pemuda pejuang menyangka bahwa pastoran itu sedang berada dalam kepungan pihak Jepang. Sangkaan itu terjadi karena mereka melihat adanya pasukan-pasukan di sekeliling pastoran Gedangan itu, yang mirip dengan pasukan Jepang. Tetapi sebenarnya mereka itu bukan pasukan Jepang tetapi adalah pasukan-pasukan Sekutu dan memang mereka adalah bangsa Asia, yaitu India Gurkha. Perawakan mereka dari jauh agaknya mirip dengan Jepang. Para pemuda mengira bahwa mereka itu sedang mengepung pastoran Gedangan dan akan menangkap Mgr. Sugiyoprana. Karena itu para pemuda pun melakukan tindakan, yaitu dengan melakukan tembakantembakan ke arah pasukan-pasukan India-Gurkha itu. Namun insiden segera dapat diatasi, yaitu dengan mengibarkan bendera Sekutu di depan pastoran Gedangan.¹⁶⁾ Tentu saja tindakan pemuda-pemuda itu tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena mereka melakukan itu demi keselamatan dari Mgr. Sugiyoprana, yaitu orang yang selama ini dianggapnya sebagai "tetua" dan pemimpin mereka. Keterlibatan beliau untuk menyelesaikan peristiwa Pertempuran Lima Hari itu berarti juga menyelamatkan jiwa dari ratusan pemuda pejuang yang hampir saja masuk jebakan pihak Jepang. Tentang rencana penjebakan oleh Jepang ini diketahui sendiri oleh beliau, karena beliau berhasil memancing pimpinan pasukan Jepang yang datang ke pastoran Gedangan untuk memberitahukan rencana mereka itu. Pimpinan pasukan itu memberitahukan bahwa mereka akan membinasakan ratusan pemuda pejuang kita pada malam hari (20 Oktober) itu juga, terutama yang berada di sebelah timur. Pemuda-pemuda itu akan dipancing dan ditarik untuk memasuki perangkap yang telah

16). *Suara Merdeka*, 29 September 1950, Semarang.

dipasang; caranya ialah dengan memancing mereka melewati Karang Tempel. Sebaliknya di daerah sebelah Utara, Selatan telah ditempatkan satuan-satuan Jepang yang kuat dan bersiap untuk menghadang pasukan-pasukan pemuda yang memasuki daerah Karang Tempel tadi. Dan daerah perangkap yang terakhir ialah stasiun Jurnatan; dari sinilah pemuda-pemuda pejuang kita akan dihadang dengan senjata-senjata berat yang dipasang di segala penjuru di atas atap/loteng rumah.¹⁷⁾ Kita dapat membayangkan betapa banyaknya korban jiwa pemuda-pemuda pejuang kita sekiranya Mgr. Sugiyoprana gagal di dalam usahanya untuk mengakhiri Pertempuran Lima Hari itu.

Sebuah pertempuran berdarah tentulah selalu membawa akibat-akibat berat bagi kehidupan masyarakat, baik langsung maupun tidak; baik korban jiwa maupun korban harta benda. Demikian pula halnya dengan Pertempuran Lima Hari. Di dalam suasana yang sangat buruk itu terjadilah kekurangan bahan makanan, bahkan kehabisan makanan; demikian pula muncullah orang-orang jahat dan melakukan perampokan dan pelbagai hal yang semacam ini. Hal-hal seperti itu diceriterakan sendiri oleh Komandan Brigade ke-49 kepada seorang wartawan kita, yaitu Rosihan Anwar yang ketika itu mengunjungi Semarang, yang baru saja reda dari peristiwa Pertempuran Lima Hari. Tentang ini ada juga gunanya kita mengikuti keterangan Rosihan Anwar sebagai berikut ini.

"Semarang menderita. Pada tanggal 15 Oktober 1945 pecah pertempuran antara pemuda-pemuda dengan pasukan Jepang di bawah Mayor Kido. Lebih kurang 2.000 orang penduduk menjadi korban. Pada tanggal 17 Nopember, meletus pertempuran dengan tentara Sekutu dan sebagian besar pemerintahan kota menyingkir keluar. Sejak itu segala alat pengatur kehidupan rakyat menjadi ambruk. Polisi Indonesia masih berantakan, dan tentara Inggris tidak berdaya menjaga keamanan. Perampokan meraja-lela, kekacauan menjadi-jadi. Dalam pertempuran banyak kampung dibakar dan dijelmakan menjadi abu. Lempongsari, Ngaglik, Kintelan hanyalah beberapa contoh.

¹⁷⁾ Buku Peringatan Pesta Perak, . . . op. cit., hal. 17.

Ada sistematikanya dalam cara merampok, kata seorang penduduk kepada saya. Semua jawatan negeri tidak ada yang utuh lagi. Kantor Kejaksanaan Pengadilan Tinggi, Kemakmuran, Polisi, Listrik dan Gas, semua habis dirampok. Gedung Surat Kabar "Warta Indonesia" rusak, huruf-hurufnya bertebaran di pinggir jalan. Gudang-gudang sekitar stasiun Tawang tidak keruan lagi. Ketika lewat Bojong, bisa dilihat banyak toko terbakar, kaca pecah. Barang-barang rampukan kemudian diperjualbelikan di pasar tertentu seperti Gang Warung, Pekojan, Karangutri, Ambengan.

Perjudian pun meraja-lela. Kami hampiri sebuah meja judi di pinggir jalan. Nomor 12. Kena Blokade. Bayar 375. Siapa mau beruntung lagi pasang terus.

Lampu tidak menyala lagi. Hanya di Candi dan Semarang Wetan buat beberapa jam ada tenaga listrik yang diperdapat dari Kalisari. Jam malam berlaku mulai pukul enam sore. Air ledeng tidak mengalir. Penduduk pasti mengandalkan kepada air sumur.

Beras makin sukar, harganya memuncak, harga beras bergerak antara 15 dan 25 rupiah Jepang seliter.”¹⁸⁾

Tentulah keadaan buruk ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus. Agaknya hal ini disadari oleh beberapa orang penduduk seperti R.S. Dwijosewoyo, yaitu seorang penduduk yang dikenal sebagai Wakil Ketua Persatuan Warung Semarang Utara. Dialah yang berinisiatif untuk menghubungi beberapa orang tokoh di Semarang dan kepada mereka ini diajukannya gagasan untuk mendirikan *Komite Penolong Rakyat*. Mereka yang dihubungi itu antara lain termasuk Mgr. Sugiyoprana, telah menyetujui gagasannya itu. Pada tanggal 20 Nopember 1945 dibentuklah *Komite Penolong Rakyat Semarang*, dengan pengurusnya: Dwijosewoyo dan RM. Sadat Kadarisman, masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua, sebagai sekretaris ditunjuk Sudarsono; sedang Bendaharanya dipercayakan masing-masing kepada Go San Hoo dan Muhammad Ikhsan.¹⁹⁾ Segara setelah komite ini terbentuk,

18). Rosihan Anwar, *op. cit.*, hal. 24–25.

19). L. Pudjisirijono, "Komite Penolong Rakyat Muncul Setelah Pertempuran 5 hari, *Suara Merdeka*, 7 Oktober 1960.

bergeraklah para pengurusnya untuk melaksanakan kewajibannya. Dwijosewoyo segera menemui pimpinan pasukan Sekutu dan membentangkan tujuan organisasinya dan sekaligus membentangkan situasi gawat kota Semarang ketika itu. Hasil usahanya itu ialah pimpinan pasukan Sekutu mengerti dan tidak keberatan terhadap usaha-usaha yang akan dikerjakan oleh *Komite Penolong Rakyat Semarang* ini.²⁰⁾

Akan tetapi karena demikian sulitnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi, terutama di bidang persediaan pangan, maka organisasi ini tidaklah dapat berbuat terlalu banyak untuk mengatasinya. Menghadapi kenyataan itu Mgr. Sugiyopranata merasa perlu untuk segera mengirimkan utusannya ke Jakarta guna menjumpai pemerintah Republik Indonesia, termasuk Perdana Menteri Sutan Syahrir. Kepada pemerintah akan dilaporkan situasi gawat yang sedang dihadapi oleh rakyat Semarang. Utusan yang dikirimkan ialah Dwijosewoyo, Ketua *Komite Penolong Rakyat Semarang*.²¹⁾ Pak Dwijosewoyo berangkat ke Jakarta dan berhasil menjumpai Perdana Menteri Syahrir dan melaporkan semua kejadian di Semarang dan memintakan perhatian pemerintah pusat. Perdana Menteri Syahrir menyatakan kesediaannya untuk memberikan bantuan kepada rakyat Semarang dan segera akan mengatur aparat pemerintahan di kota ini, yang sejak beberapa waktu yang lalu telah ambruk dan tidak dapat berfungsi lagi. Janji Perdana Menteri Syahrir sesuai dengan permintaan Pak Dwijosewoyo yang terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat segera mengirimkan Mr. Wongsonegoro ke Jawa Tengah;
2. Mengirimkan beras guna menanggulangi kesulitan bahan makanan yang sedang dihadapi oleh rakyat Semarang.²²⁾

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Mgr. Sugiyopranata itu agaknya membawa hasil karena pada akhirnya pemerintah pusat telah mengirimkan utusannya guna meninjau keadaan kota

^{20).} *Ibid.*

^{21).} *Ibid.*

^{22).} *Ibid.*

Semarang. Juga untuk mengembalikan adanya pemerintahan yang teratur, pemerintah pusat telah mengangkat Mr. Ikhsan menjadi seorang Walikota Semarang. Missi pemerintah pusat ini terdiri dari Menteri Muda Dalam Negeri, yaitu Mr. Hermani dan Dr. Darmasetiawan, Menteri Kesehatan serta juga seorang wartawan, yaitu Rosihan Anwar.²³⁾

Pada awal jabatannya Walikota baru ini berusaha keras untuk membangun kembali aparat pemerintahan yang telah ambruk itu. Dalam usahanya ini dia dibantu sepenuhnya oleh para pengurus *Komite Penolong Rakyat Semarang*. Untuk itu ada di antaranya yang bertugas sebagai pamong praja, antara lain sebagai asisten wedana.²⁴⁾

Akan tetapi walaupun aparat pemerintahan Semarang ini telah bekerja keras, namun masih juga terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasinya, terutama masalah bahan makanan, yaitu beras. Guna mengatasi masalah itu, pada tanggal 19 Desember 1945 telah diadakan suatu permusyawaratan yang dilakukan di Purwodadi. Musyawarah ini dihadiri oleh pelbagai pihak, seperti wakil Pemerintah Pusat, Gubernur Jawa Tengah, TKR, dan pelbagai pihak lainnya. Dari permusyawaratan itu disetujui untuk membantu rakyat Semarang untuk mengatasi kesulitan mereka itu, tetapi untuk itu harus ditempuh cara yang tidak merugikan perjuangan kita waktu itu. Para pejuang mengajukan syarat bahwa hanya jika Inggris meninggalkan Semarang barulah pemasukan beras ke Semarang dapat dilakukan. Tetapi ternyata pasukan Inggris masih menduduki kota Semarang, karena itu pertolongan terhadap rakyat Semarang dilakukan dengan cara lain.²⁵⁾

Dengan sendirinya keputusan itu tidaklah banyak menolong kesulitan yang dihadapi oleh Walikota beserta rakyat Semarang. Di samping kesulitan-kesulitan persediaan makanan, di dalam usahanya untuk mengatur jalannya pemerintahan, Mr. Ikhsan

23). Rosihan Anwar, *op. cit.*, hal. 12.

24). *Suara Merdeka*, 7 Oktober 1960, *loc. cit.*

25). Rosihan Anwar, *op. cit.*, hal. 25.

sebagai Walikota harus pula menghadapi usaha Belanda/NICA untuk merebut kekuasaan pemerintahan di daerah kekuasaannya. Orang-orang Belanda/NICA ini memperalat Sekutu dan berhasil menduduki jabatan-jabatan di Balai Pemerintahan Kota Semarang. Alasan mereka di dalam merobut kedudukan itu ialah bahwa mereka itu menggantikan orang-orang Inggris yang seharusnya menduduki jabatan-jabatan tersebut. Secara berangsur kedudukan mereka di Balai Kota makin kuat dan karena mereka dapat melakukan tindakan-tindakan licik, termasuk tindakan-tindakan penangkapan terhadap diri orang-orang republikein. Demikianlah, pada akhirnya juga mereka berhasil menangkap Walikota Semarang dan selanjutnya Moh. Ihsan ditahan di penjara Mlaten.²⁶⁾

Berhasilnya Belanda/NICA menguasai kota Semarang membuat jalan bagi mereka untuk melakukan penangkapan yang lebih besar terhadap para golongan republikein. Namun terhadap diri Mgr. Sugiyoprana mereka tidak berani melakukan penangkapan. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak mengetahui sikap Mgr. Sugiyoprana sebagai seorang republikein yang terkemuka. Malah sebenarnya Belanda/NICA menuduh kepada beliau sebagai orang yang agak "merah", karena menurut Belanda/NICA, Mgr. Sugiyoprana banyak menerima pemuda-pemuda.²⁷⁾ Tentulah yang dimaksud oleh mereka itu, ialah para pemuda pejuang, karena Mgr. Sugiyoprana sering menerima para pemuda pejuang itu untuk berkonsultasi dengan beliau. Di dalam menanggapi tuduhan Belanda/NICA terhadap dirinya sebagai seorang "agak merah" itu, beliau menjawab dalam nada sinis dalam bentuk kelakar. Beliau berkata,

"Memang benar apa yang dikatakan oleh Belanda itu, sedikit pun tidak salah. Lebih-lebih kalau saya berpakaian secara resmi, saya sungguh-sungguh merah."²⁸⁾

Walaupun para pemimpin kita yang ditunjang oleh rakyat berjuang dengan segala kekuatannya untuk menghalangi maksud jahat Belanda untuk menjajah kembali. agaknya Belanda secara

^{26).} Buku Peringatan Pesta Perak, . . . *op. cit.*, hal. 19.

^{27).} *Ibid.*

berangsur-angsur mereka berhasil juga untuk memperkuat keduakannya. Bahkan nampak pula bahwa kekuatan mereka makin besar dan makin kuat. NICA/KNIL secara berangsur-angsur dapat menguasai pemerintahan dan ini mereka lakukan di seluruh Indonesia. Untuk pengembalian jajahannya di Indonesia, Belanda tidak ragu-ragu untuk melakukan semua bentuk cara, teror, intimidasi dan pembunuhan yang keji dilakukannya untuk mencapai tujuannya itu. Agaknya mereka berprinsip, tujuan yang hendak dicapai dapat menghalalkan semua cara. Kita lihat misalnya yang terjadi di Jakarta, yang ketika awal revolusi, yaitu sampai dengan Januari 1946, mereka melakukan teror terhadap diri beberapa orang pemimpin republik, termasuk terhadap diri Perdana Menteri Sutan Syahrir. Juga terhadap diri Mr. Muhammad Rum, seorang tokoh yang cukup besar peranannya di masa revolusi itu, telah mengalami teror bahkan pernah mengalami usaha pembunuhan atas dirinya, namun usaha itu gagal. Tetapi sebagai akibat dari tindakan teror itu sampai kini beliau tetap cacat pada kakinya dan karena itu kalau berjalan agak pincang.

Situasi yang penuh dengan tindakan teror yang dilakukan oleh pihak Belanda di Jakarta itu, jelas sangat mengganggu usaha pengaturan jalannya pemerintahan di ibukota tersebut. Para pemimpin pemerintahan republik tentu tidak tenteram dan karena itu tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Karena itu Jakarta tidak dapat dipertahankan sebagai ibukota Republik Indonesia. Untuk itulah maka perlu diadakan pemindahan ibukota ke suatu kota/daerah yang lebih memungkinkan jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia yang masih sangat muda itu. Sehubungan dengan itu, Yogyakarta telah dipilih untuk menjadi ibukota Republik Indonesia. Terpilihnya Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia di dalam masa yang genting itu cukup memenuhi syarat. Karena untuk pemilihan itu tentulah diperlukan beberapa syarat yang menunjang kelangsungan perjuangan kemerdekaan kita. Antara lain ialah kondisi masyarakatnya, yaitu sampai seberapa jauh mereka menerima proklamasi kemerdekaan yang baru beberapa bulan dinyatakan

itu. Juga sikap dari pemimpin-pemimpin utama dari daerah itu terhadap proklamasi sangatlah penting untuk sebuah ibukota republik yang muda ini.

Sehubungan dengan itu, baiklah kita lihat hal tersebut di bawah ini: Yogyakarta adalah sebuah daerah yang diperintah oleh seorang Sultan, yaitu Sultan Hamengku Buwono ke IX. Sultan ini mempunyai jiwa patriotis yang tinggi sehingga sejak awal proklamasi kemerdekaan bangsanya, beliau telah memberikan dukungannya yang kuat. Demikian pula wakilnya, yaitu Paku Alam, telah memberikan dukungan terhadap kemerdekaan bangsanya. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 19 Agustus 1945, kedua raja telah mengirimkan telegram kepada Presiden Sukarno dan Wakil Presiden yang menyampaikan ucapan selamat kepada kedua pemimpin itu atas proklamasi yang telah diumumkannya. Demikian pula ucapan selamatnya atas pengangkatan kedua beliau itu sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.²⁹⁾

Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 20 Agustus, Sultan telah memberikan kata sambutannya atas proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dimuat pada harian *Sinar Matahari*; beliau berkata antara lain:

"Sekarang Kemerdekaan telah berada di tangan kita, telah kita genggam, nasib nusa dan bangsa adalah di tangan kita pula, tergantung pada kita sendiri.

Kita harus menginsyafi, bahwa lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam masa kegentingan. Maka semua, tiada kecualinya, harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing, untuk kepentingan kita bersama, ialah menjaga, memelihara dan membela Kemerdekaan nusa dan bangsa. Sekarang bukan waktunya mengemukakan dan memperbesar segala pertentangan dan perselisihan faham. Tiap-tiap golongan harus sanggup menyampingkan kepentingannya, sanggup untuk mencapai persatuan yang baru dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk memperjuangkan Kemerdekaannya, buat menyelesaikan tanggung jawab-

29). Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementrian Penerangan, tanpa nama tempat, 1953, hal. 35.

nya terhadap angkatan-angkatan bangsa Indonesia yang akan datang dan membikin sejarah yang gemilang.”³⁰⁾

Masyarakat Yogyakarta pun menyambut dengan hangat terhadap kemerdekaan yang telah dinyatakan oleh Sukarno – Hatta itu. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Sehubungan dengan itu, telah terjadi pelbagai peristiwa oleh adanya sikap Jepang yang tidak bersedia menyerahkan kekuasaannya kepada pihak republik, antara lain yang terkenal ialah pertempuran Kota Baru. Demikianlah, Yogyakarta telah dipilih untuk menjadi ibukota Republik Indonesia menggantikan kota Jakarta.

Sejalan dengan itu, maka pada tanggal 4 Januari 1946 tiba lah Bung Karno dan Bung Hatta di Yogyakarta dan dari sinilah nantinya beliau mengatur pemerintahan serta perlawanan terhadap usaha Belanda untuk kembali menjajah negara Republik Indonesia. Secara berangsur-angsur aparat-aparat pemerintahan pun dipindahkan ke Yogyakarta. Akan tetapi Perdana Menteri Sutan Syahrir tidak ikut pindah karena agaknya hal itu akan lebih menguntungkan usaha-usaha diplomasi untuk menghadapi pihak Belanda.

Kepindahan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta telah menjadikan kota ini sebagai pusat kegiatan daripada para pemimpin republik dan rakyat yang bersedia mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Dalam waktu yang singkat Yogyakarta telah menjadi sangat ramai oleh karena datangnya penduduk ke kota ini. Mereka mengadakan pengungsian karena tempat-tempat asal mereka tidaklah aman dari rongrongan pihak Belanda.

Sementara itu keadaan di Semarang pun makin genting juga. Banyak penduduknya yang terpaksa meninggalkan kediaman mereka di kota ini dan menyingkir keluar kota untuk menghindari situasi yang makin tidak menentu di kotanya ini. Kekurangan makanan belum juga dapat teratasi, perampokan makin menjadidiri, teror dari pihak Belanda juga makin meningkat, terutama terhadap mereka yang dicurigai sebagai golongan republikein. Perampokan malah juga sering justru diorganisasi oleh Belanda

^{30).} *Ibid.*

sendiri. Menghadapi suasana yang tidak menentu itu, Mgr. Sugiyoprana tidak ikut menyingkir. Malah beliau berusaha bertahan dan berbuat sedapatnya untuk menenteramkan situasi kota atau setidaknya di sekitar daerah kediamannya. Beliau tidak menghiraukan adanya tuduhan "pengkhianat" terhadap mereka yang tidak mau menyingkir. Sebaliknya beliau justru mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan kota itulah yang pengkhianat. Alasan beliau untuk tidak meninggalkan kota Semarang agaknya terutama sekali karena rasa tanggung jawabnya. Dengarkan kata-kata beliau seperti di bawah ini,

"Kalau waktu itu ada yang berkata barang siapa tidak mau mengungsi adalah "pengkhianat", tetapi saya berpendirian sebaliknya, yaitu siapa yang meninggalkan kota serta keluarganya adalah pengkhianat. Sebab dengan meninggalkan kota serta keluarganya itu sama saja dengan membiarkan keluarganya serta negaranya menjadi "rayahan" musuh, sedangkan orang-orang itu sendiri tidak berani melawan musuh yang datang. Maka pada waktu itu saya tidak mau meninggalkan Semarang untuk mengungsi.

Saya akan tetap menjaga tempat tinggal saya dan mempertahankan tanggung jawab saya."³¹⁾

Sampai dengan akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 beliau memang dapat mempertahankan kemauannya untuk tetap berada di Semarang. Dalam keadaan genting itulah malah beliau mengorganisasi pemuda-pemuda yang masih ada di kota Semarang untuk menjaga keamanan daerah kediaman mereka. Beliau mengatur penjagaan kampung-kampung dengan memerintahkan kepada pemuda-pemuda itu untuk mendirikan pos-pos penjagaan. Tenaga laki-laki yang di kampung-kampung itu dibagi rata-rata untuk bertugas pada pos-pos penjagaan yang dibentuk itu.³²⁾

Namun kehendaknya untuk tetap tinggal di kota Semarang yang memang merupakan pusat hierarki kegerejaannya itu,

^{31).} M. Henricia Moeryantini CB. *Mgr. Sugiyoprana SJ*. Nusa Indah, Ende Flores, 1975, hal. 100.

^{32).} "Buku Peringatan Pesta Perak" loc. cit.

tidaklah dapat dipertahankannya. Pada tahun 1946, yaitu tahun kepindahan pusat pemerintahan negara Republik Indonesia ke Yogyakarta, beliau pun berpindah pula ke Yogyakarta. Kepindahannya ke Yogyakarta itu tidaklah dapat dipandang sebagai tidak konsekuennya beliau terhadap apa yang pernah dikatakan-nya. Tentulah kepindahan beliau itu sudah dipikirkannya dengan sebaik-baiknya. Dan pastilah pula dapat dikatakan bahwa kepindahannya ke Yogyakarta yang telah menjadi ibukota negaranya itu adalah karena perhitungannya yang lebih menguntungkan bagi perjuangan bangsanya dan juga bagi kepentingan karya missi sendiri. Sebagai seorang nasionalis/patriotis tentulah beliau harus mengambil suatu keputusan yang menguntungkan bangsa dan tanah airnya. Dan jelas jika beliau berpindah ke Yogyakarta yang telah menjadi pusat pemerintahan itu, akan menguntungkan karena beliau akan dapat berkomunikasi dengan para pemimpin yang pada umumnya berada di Yogyakarta itu. Kepindahannya ke Yogyakarta juga merupakan suatu pertanda yang ditunjukkan kepada Belanda bahwa beliau sama sekali tidak berada di dalam posisi netral, di dalam sengketa antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda itu. Hal yang sebenarnya sangat diharapkan oleh Belanda. Dan sebagai seorang kepala pemerintahan gereja, sikap netral itu dapat saja dilakukannya jika beliau mau.

Kepindahannya ke Yogyakarta memungkinkan beliau untuk berhubungan dengan Presiden Sukarno.³³⁾ Juga beliau selalu berhubungan dengan Sultan dan beliau sering mengirimkan pesan-pesan melalui seorang "kurir"nya yaitu Pak Suwandi.³⁴⁾

Pertentangan antara Republik Indonesia dengan Belanda makin meruncing, bahkan pertentangan berdarah yang lebih besar agaknya tidak dapat dihindari. Demikian meruncingnya, sampai-sampai ada pihak ketiga yang merasa perlu untuk menjadi pihak penengah, yaitu Inggris. Inggris mengirimkan utusannya yang

^{33).} Pipitseputra, Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia, Nusa Indah Flores, 1973, hal. 338.

^{34).} Wawancara dengan *Pastor Sandiwan Brata* pada tanggal 26 Januari 1977 bertempat di Pastoran Pugeran.

bernama Sir Archibald Klark Kerr. Duta istimewa ini berhasil menciptakan kontak antara kedua pihak yang bersengketa. Kontak-kontak itu akhirnya memungkinkan dilakukannya suatu perundingan di antara kedua belah pihak. Perundingan itu berhasil melahirkan beberapa persetujuan, akan tetapi persetujuan itu belum dapat disahkan karena masih akan dibicarakan di dalam suatu perundingan lanjutan yang akan diadakan di Hooge Veluwe, negeri Belanda. Perundingan yang berlangsung selama 11 hari itu (14–25 April 1946) berakhir dengan tidak menghasilkan apa-apa. Karena ternyata di dalam perundingan di Hooge Veluwe itu, pihak Belanda telah menolak beberapa ketentuan yang justru telah disetujuinya di dalam perundingan yang telah diadakan di Jakarta, yaitu suatu hasil yang diperoleh dari perundingan antara Syahrir – Clark Kerr – van Mook. Penolakan Belanda atas usul Clark Kerr, yaitu pengakuan *de facto* atas daerah pulau Jawa dan Sumatera, adalah merupakan penyebab utama dari kegagalan perundingan di Hooge Veluwe itu.

Kegagalan perundingan yang diadakan di Hooge Veluwe itu agaknya tidaklah menutup kemungkinan kelanjutan kontak-kontak di antara pihak yang bersengketa. Perdana Menteri Syahrir masih bersedia untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Sikap Perdana Menteri Syahrir ini agaknya tidak disetujui oleh politisi-politisi terkemuka waktu itu. Sebagai akibatnya timbullah pergolakan yang nyaris menimbulkan pertumpahan darah di antara kita. Pergolakan ini disebabkan oleh Tan Malaka cs yang menculik Perdana Menteri Syahrir yang ketika itu sedang berada di Solo. Kejadian ini terkenal dengan nama *Peristiwa 3 Juli* dan terjadi pada tahun 1946. Dalam peristiwa ini Tan Malaka yang didukung oleh mereka yang tergabung di dalam *Persatuan Perjuangan* menghendaki pergantian pimpinan pemerintahan sebagaimana yang telah ditentukannya terlebih dahulu. Mereka ini mendatangi Presiden/Wakil Presiden dan mendesak kepada kedua pemimpin ini untuk menerima usul yang disodorkannya. Tetapi kedua pemimpin pemerintahan ini menolak kehendak mereka itu. Peristiwa ini akhirnya dapat diselesaikan dengan tidak

menimbulkan pertumpahan darah. Beberapa pelaku Peristiwa 3 Juli ditangkap untuk kemudian diajukan ke depan pengadilan di Yogyakarta. Mereka yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain Tan Malaka, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Iwa Kusuma Sumantri dan Mayor Jenderal Sudarsono. Sutan Syahrir berhasil diselamatkan oleh Bung Karno yang telah menggunakan wibawanya dan berseru kepada penculik agar melepaskan Perdana Menteri. Karena itu Perdana Menteri Syahrir dapat kembali melanjutkan tugasnya sebagai kepala pemerintahan.

Sementara itu pemerintah Inggris tetap melanjutkan usaha penengahannya. Kali ini dikirimnya seorang diplomat kawakaninya, yaitu Lord Killern, untuk menjalankan tugas "pendamai" di antara kedua pihak yang bersengketa. Agaknya usaha ini membuka jalan untuk melanjutkan perundingan yang pernah dirintis oleh Clark Kerr waktu yang lalu.

Untuk menghadapi perundingan-perundingan dengan pihak Republik Indonesia ini, Ratu Wilhelmina merasa perlu untuk membentuk sebuah Komisi Jenderal dengan ketuanya Prof. Ir. W. Schermerhorn. Setibanya di Indonesia, Lord Killern segera menemui Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta; tujuannya tentulah untuk membuka jalan yang lebih licin dari usaha-usaha yang dilakukannya itu. Setelah melalui pelbagai langkah dan perundingan yang sekian kali banyaknya, maka berhasillah dicapai suatu persetujuan, yaitu yang dikenal dengan "*Perjanjian Linggarjati*". Perjanjian ini diparaf oleh kedua belah pihak yang masing-masing diwakili oleh Sutan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia dan Prof. W. Schermerhorn, Ketua Komisi Jenderal; ini dilakukan di kediaman Perdana Menteri Sutan Syahrir pada tanggal 15 Nopember 1946.

Pemarafan yang dilakukan itu belumlah dapat dianggap berlakunya sepenuhnya perjanjian itu, karena sah-tidaknya perjanjian itu masih harus mendapat persetujuan dari lembaga-lembaga legislatif kedua belah pihak. Ketika perjanjian Linggarjati itu diumumkan, maka timbulah pelbagai reaksi baik yang setuju maupun yang menolak. Reaksi yang demikian itu tidak hanya

terjadi di negeri kita tetapi juga di negeri Belanda. Di Indonesia Perjanjian Linggarjati itu mendapat tantangan yang sangat kuat, dan mereka itu tergabung dalam *Banteng Republik Indonesia* (BRI) dan organisasi politik yang tergabung di dalamnya antara lain dua partai politik terkuat waktu itu, yaitu PNI dan MASYUMI. Demikian pula di negeri Belanda terdapat tantangan-tantangan kuat terhadap isi perjanjian ini; mereka terdiri dari Partai Katolik, Partai Anti Revolucioner, Partai Kemerdekaan dan lain-lain.³⁵⁾ Karena itu ketika perjanjian Linggarjati ini dibicarakan di dalam dewan perwakilan rakyat, timbulah perdebatan yang cukup sengit dan karena kedua belah pihak, yang menentang dan yang menyokong, berusaha mempertahankan pendiriannya masing-masing.

Sehubungan dengan itu, seorang tokoh politik Belanda yang sangat menentang perjanjian Linggarjati, yaitu J. Romme, mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan suara terhadap penerimaan naskah persetujuan Linggarjati apabila pada naskah tersebut masih ada suatu kemungkinan pengakuan Republik Indonesia seperti yang dimaksud pada pasal 1, karena pengakuan serupa itu hanya akan membawa konsekuensi internasional.³⁶⁾ Pernyataan dari J. Romme itu jelas menunjukkan bahwa dia tidak menghendaki adanya campur tangan internasional di dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi karena adanya pertentangan di antara kedua bangsa, Indonesia dan Belanda. Agaknya dia berpendapat bahwa persoalan yang sedang terjadi di Indonesia ketika itu "hanyalah persoalan dalam negeri" Belanda. Oposisi terhadap isi persetujuan Linggarjati, baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, memang sangat kuat. Akan tetapi dengan pelbagai cara dan konsesi-konsesi politik yang dilakukan oleh kedua pemerintah terhadap para opposan itu, akhirnya ratifikasi itu yang diharapkan, dapat dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1947

35). Rasad Amidjaja, *Suatu Tinjauan Historis Tentang Adanya Gagasan Persetujuan Linggarjati Sebagai Alternatif Pemerintah Republik Indonesia Dalam Usahanya Berjuang Dibidang Diplomasi*, Panitia Seminar Sejarah Nasional, Yogyakarta, 1970 (No. PIV/68), hal. 34.

36). *Ibid.*

Ratifikasi naskah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Mei 1947 itu rupanya tidaklah menghalangi maksud "jahat" pemerintah kolonial Belanda guna mencapai tujuannya untuk kembali menjajah bangsa dan negara Indonesia. Cara yang ditempuhnya untuk itu ialah dengan melalui penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu yang tercantum di dalam persetujuan Linggarjati. Sehubungan dengan itu pemerintah Belanda mengirimkan nota yang berisikan: (1) membentuk pemerintahan peralihan secara bersama; (2) garis demiliterisasi hendaklah diadakan dan pengacauan-pengacauan di daerah yang bergabung di dalam konperensi Malino seperti di Negara Indonesia Timur (NIT), Kalimantan dan sebagainya harus dihentikan.³⁷⁾

Tuntutan Belanda melalui notanya itu jelas sangat bertentangan dengan maksud yang tercantum di dalam perjanjian Linggarjati itu. Demikian pula jika kita meneliti lebih jauh, sebenarnya isi nota yang disebutkan di atas itu hanyalah merupakan *jebakan* Belanda untuk memperoleh posisi yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan tindakan mereka yang terdahulu, yaitu dengan mengadakan konperensi Malino dan Denpasar yang berhasil mendirikan negara "boneka", yaitu NIT. Tindakan Belanda melalui konperensi Malino dan Denpasar itu sebenarnya sudah merupakan suatu pelanggaran nyata terhadap persetujuan Linggarjati itu sendiri.

Walaupun Belanda telah melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi perjanjian Linggarjati itu, namun pemerintah Republik Indonesia masih saja menempuh jalan damai untuk mencari jalan keluar dari pertentangan di antara kedua bangsa. Usaha damai yang dijalankan oleh pihak pemerintah Indonesia itu bahkan juga dengan memberikan konsesi politik yang tidak kecil resikonya. Sebagai buktinya, Pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk mengakui NIT, negara boneka buatan Belanda itu. Konsesi yang serupa juga dapat kita lihat pada kesediaan Republik menyetujui demiliterisasi daerah demarkasi dengan menyerahkan penjagaan zone bebas militer itu kepada polisi.³⁸⁾

Rupanya semua konsesi seperti yang disebutkan di atas itu,

^{37).} Sartono Kartodirdjo dkk, "Sejarah Nasional . . . (jilid VI) op. cit., hal. 45.

^{38).} *Ibid.*

yang sebenarnya sangat merugikan posisi Republik Indonesia sendiri, tidaklah cukup memuaskan pihak penjajah Belanda. Rupanya mereka berkeinginan untuk segera menguasai kembali sepenuhnya daerah bekas jajahannya itu. Keinginan yang serupa itu nampak dengan tindakan kekerasan yang mereka lakukan. Tindakan itu berupa penyerangan agresif terhadap Republik Indonesia yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947, pada malam hari. Tindakan ini, yaitu *Agresi I*, berbentuk penyerangan militer ke kota-kota besar dan strategis di Jawa dan Sumatera. Pada masa Agresi I itu, Jawa Tengah berhasil diduduki oleh musuh dengan kekuatan 3 brigade.³⁹⁾

Tindakan agresor Belanda itu, yang oleh mereka disebut dengan aksi polisional, menimbulkan reaksi yang sangat keras, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam suasana yang genting itu, kembali Mgr. Sugiyopranata menunjukkan sikap patriotisnya melalui reaksi yang diperlihatkannya. Beliau menentang tindakan agresor Belanda itu. Ini jelas terlihat di dalam pidatonya yang diucapkannya pada RRI di Solo, beliau antara lain berkata,

"Mestinya ummat Katolik harus merasa berterimakasih kepada Republik Indonesia, yang diproklamasikan secara sepihak itu dan bahwa mestinya mereka tidak menolak Republik, tetapi memberikan dukungan dan bantuan mereka kepada-nya. Kami berjanji akan bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat, untuk mewujudkan kemerdekaan teguh dan kemauan merata."⁴⁰⁾

Dari pidato yang dikutip di atas itu, terdapat dua hal utama yang merupakan ajakan dan sekaligus janji, yaitu ajakan kepada bangsa Belanda dan janji kepada bangsanya. Beliau mengajak kepada bangsa Belanda, khususnya mereka yang beragama Katolik dan tergabung dalam Partai Katolik Belanda untuk meninggalkan sikapnya yang bermusuhan kepada bangsa Indonesia.

39). A.H. Nasution, "Sejarah Perjuangan Nasional, . . . op. cit. hal. 105.

40). M.P. Muskens Pr, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Pengintegrasian di Alam Indonesia*, (jilid IV), Bagian Dokumentasi – Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 336.

Kemudian beliau menjanjikan kepada bangsanya untuk bersama dengan mereka, bahu membahu, guna mencapai tujuan yang dicita-citakannya, yaitu kemerdekaan penuh yang di dalamnya akan diciptakan kemakmuran merata bagi seluruh rakyat. Ajakan kepada bangsa Belanda, khususnya golongan Katolik, memang sangat beralasan, karena di dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan bangsanya, golongan Katolik adalah termasuk yang paling kuat dan gigih menentangnya. Mereka menentang perjanjian Linggarjati karena dengan menyetujui perjanjian itu akan tetap mengundang campur tangan pihak lain; sedang mereka tidak menghendaki itu, karena mereka beranggapan masalah Indonesia adalah masalah dalam negeri mereka. Janji Mgr. Sugiyoprana kepada bangsa Indonesia untuk ikut berusaha mewujudkan kemerdekaan dan kemakmuran merata, agaknya merupakan suatu hal yang sangat berguna untuk menanamkan kepercayaan rakyat terhadap arti kemerdekaan yang diperjuangkannya. Dengan itu dukungan rakyat tetap dapat diberikannya, karena para pemimpinnya pun tetap selalu memikirkan nasib mereka, sebagaimana yang ditujukan oleh pidato Mgr. Sugiyoprana.

Sehubungan dengan penolakan ummat Katolik untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia itu, menurut pastor Sandiwan Brata, hal itu dilatar-belakangi oleh perasaan khawatir dari golongan Katolik Belanda terhadap kemungkinan kesulitan perkembangan karya missi di Indonesia di kemudian hari. Menurut mereka bila Indonesia dilepaskan dari lingkungan negeri Belanda maka kemungkinan besar karya missi akan hancur.⁴¹⁾ Alasan seperti itu sebenarnya sama sekali tidak berdasar. Sebab walaupun bangsa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, namun terhadap agama lainnya pun diberikan pula kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan dirinya. Juga adalah suatu kenyataan bahwa selama perjuangan kemerdekaan, mulai dari pergerakan nasional sampai dengan revolusi fisik waktu itu, semua pihak,

^{41).} Wawancara dengan Pastor Sandiwan Brata, *loc. cit.*

baik mereka yang Islam maupun Kristen (Katolik, Protestan), Hindu dan lain-lain telah bahu membahu, bekerja-sama secara erat untuk mencapai tujuan bersama yaitu kemerdekaan bangsanya. Mereka tidak mempersoalkan masalah keyakinan mereka masing-masing (setidaknya waktu itu), karena sibuk menghadapi musuh bersama yaitu bangsa Belanda. Sehubungan dengan mereka yang beragama Katolik, maka mereka pun mendapat tempat untuk ikut menata kehidupan negaranya; I.J. Kasimo misalnya sejak awal perjuangan bangsanya telah muncul sebagai tokoh yang cukup disegani dan pernah menduduki jabatan-jabatan teras di dalam pemerintahan negara, juga kedudukan menteri.

Tindakan Belanda yang berupa tindakan agresinya yang pertama itu telah menimbulkan reaksi yang sangat menguntungkan posisi Republik dan sebaliknya cukup merugikan Belanda sendiri. Beberapa negara telah memberikan reaksinya, termasuk Australia, yang sangat menyesalkan tindakan Belanda itu. Malah tindakan ini telah mendorong India bersama Australia untuk mengajukan masalah Indonesia itu ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna dibicarakan. Tentu saja hal ini cukup ramai diperdebatkan karena adanya perbedaan pendapat di antara para anggotanya. Sebagaimana diketahui di dalam tubuh badan dunia itu memang terdapat dua golongan, yaitu anti penjajahan kolonialisme dan mereka yang justru kolonial atau setidaknya penyokong negara-negara kolonialis. Setelah melalui perdebatan yang cukup hangat, maka Dewan Keamanan PBB pada akhirnya berhasil mencapai suatu hasil persetujuan dan ini adalah karena berkat usaha Amerika Serikat. Negara besar ini mengusulkan: (a) kedua belah pihak yang bersengketa segera menghentikan permusuhan; (b) mereka menyelesaikan sengketa mereka dengan arbitrasi atau cara damai yang lainnya.⁴²⁾ Usul Amerika ini akhirnya dijadikan sebagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Akan tetapi penerimaan Belanda terhadap resolusi itu agaknya tidak dengan sepenuh hati, agaknya secara terpaksa.

^{42).} Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hal. 214.

Karena itu mereka tidak segan melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan isi resolusi itu sendiri; misalnya mereka melakukan tindakan "pembersihan" terhadap unsur-unsur yang dianggap pro/membela Republik. Tindakan-tindakan pelanggaran Belanda itu makin menjadi-jadi juga, karena itu Wakil Perdana Menteri Dr. A.K. Gani mengirimkan telegram kepada Dewan Keamanan PBB yang menyerukan agar lembaga bangsa-bangsa ini segera mengambil tindakan-tindakan terhadap Belanda.⁴³⁾

Jika kita berbicara tentang keterlibatan PBB di dalam usaha mengatasi persengketaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda itu, maka dapat dikatakan bahwa lembaga ini memang telah mengambil pelbagai tindakan, walaupun usaha-usahanya itu tidak jarang yang justru *tidak diindahkan* oleh pihak Belanda. Mereka misalnya telah membentuk apa yang disebut dengan *panitia konsul-konsul* yang mendapat tugas untuk meneliti apakah gencatan senjata telah ditaati oleh kedua belah pihak. Hasil dari penelitian panitia ini ternyata menguntungkan pihak Republik. Hasil usaha dari panitia ini agaknya tidak juga dapat menolong Republik dari rongrongan pihak Belanda. Agaknya Dewan Keamanan PBB tidaklah mampu berbuat banyak, karena lembaga bangsa-bangsa ini, ketika itu masih dikuasai sepenuhnya oleh Amerika Serikat dan negara-negara kolonial lainnya, dan mereka ini masih tetap memberikan dukungan kuat terhadap Belanda.⁴⁴⁾

Kegagalan itu belum menutup kemungkinan usaha lainnya, karena itu lembaga bangsa-bangsa ini kemudian membentuk sebuah komisi yang dikenal dengan nama *Komisi Tiga Negara*, yang anggota-anggotanya terdiri dari Australia, Belgia dan Amerika Serikat. Komisi ini telah mengambil pelbagai langkah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Usaha Komisi ini akhirnya berhasil juga mempertemukan kedua belah pihak di dalam sebuah perundingan, yaitu yang dilakukan di atas kapal milik Amerika Serikat: *Renville*. Isi persetujuan itu antara lain

⁴³⁾. *Ibid*, hal. 215.

⁴⁴⁾. *Ibid*.

ialah: (1) pasukan-pasukan Republik Indonesia yang berjuang di belakang garis daerah pendudukan Belanda harus segera mengundurkan diri dalam waktu 21 hari; (2) semua tentara yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak harus segera mengosongkan daerah masing-masing dan pindah masuk daerahnya sendiri dengan membawa semua senjata dan perlengkapan militer di bawah pengawasan pembantu-pembantu militer KTN.⁴⁵⁾

Jika kita meneliti lebih jauh hasil Renville itu, maka nampaklah bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya sangatlah merugikan langkah-langkah perjuangan bangsa Indonesia. Walaupun demikian, dengan berpegang kepada penjelasan dari Graham, anggota KTN dari Amerika Serikat, pada akhirnya Republik menerima persetujuan Renville itu.

Hasil persetujuan Renville melahirkan pertentangan di antara golongan-golongan politik di dalam negeri. Oposisi terhadap pemerintahan Kabinet Amir Syarifuddin setiap hari bertambah kuat. Dengan itu jelas Kabinet ini tidak akan dapat lagi menjalankan pekerjaannya secara baik, karena itu tiada alasan baginya untuk bertahan. Pada tanggal 23 Januari 1948, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Amir Syarifuddin digantikan oleh Drs. Moh. Hatta. Karena ketika itu Hatta juga adalah Wakil Presiden, maka bentuk kabinet yang dipimpinnya itu adalah Kabinet Presidential.

Dengan naiknya Hatta sebagai pemimpin pemerintahan, tentulah diharapkan terwujudnya sebuah pemerintahan yang kuat, karena figur pemimpin ini sangat disegani dan dihormati oleh semua pihak, juga malah oleh golongan komunis. Karena itu maka dapat dimengerti jika kabinet pimpinan Hatta ini mendapat dukungan yang cukup kuat dari golongan-golongan besar seperti Masyumi dan PNI. Kabinet pimpinan Hatta bekerja dengan berpegang pada 4 buah program yaitu: (1) menyelenggarakan persetujuan Renville dan tetap akan melaksanakan perundingan-perundingan dengan pihak Belanda berdasar atas landasan-landasan yang telah disepakati; (2) mempercepat terbentuknya Negara Indonesia

45). Nugroho Notosusanto, (ed) *Markas Besar Komando Djawa*, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1973, hal. 3-4.

Serikat (NIS); (3) mengadakan rasionalisasi ke dalam, dan (4) pembangunan.⁴⁶⁾ Di dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kabinet Hatta juga menghadapi hambatan yang tidak mudah diatasi dan ini tetap bersumber pada sikap Belanda. Penerimaan isi perjanjian Renville oleh pihak Belanda tidaklah dapat mengubah sikap mereka untuk menghilangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diproklamasikannya itu. Untuk menciptakan perdamaian di antara kedua belah pihak, Marle Cochran yaitu wakil baru Amerika Serikat di KTN, mengambil langkah-langkah yang diharapkan dapat menerobos kemacetan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak; usaha ini dikenal dengan *plan Cochran*. Kedua belah pihak kembali menerima ketentuan yang diusulkan melalui *plan Cochran* itu. Namun demikian agaknya suasana genting ketika itu setiap hari memuncak juga. Keadaan yang demikian itu tercermin dalam kata-kata:

"Kita menghadapi saat-saat sekarang ini bersamaan halnya seperti di dalam menghadapi agresi kolonial Belanda yang pertama (21 Juni 1947). KTN berusaha mengatasi krisis ini tetapi tidak berhasil."⁴⁷⁾

Berdasarkan atas keterangan-keterangan di atas nampaklah kepada kita, bahwa semua hasil keterlibatan PBB agaknya menghadapi kegagalan karena sikap Belanda yang mendua, yaitu di satu pihak mereka menerima hasil usaha itu tetapi di lain pihak justru mereka yang tidak pernah mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Nasib *plan Cochran* ini pun demikian pula adanya.

Di balik pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap hasil-hasil PBB itu, Belanda telah membuat rencana-rencana sendiri untuk menguasai kembali bekas jajahannya ini. Demikian pula halnya dengan pelanggarannya terhadap *plan Cochran*. Pada tanggal 11 Desember 1948 pihak Belanda telah mengirimkan pemberitahuannya kepada KTN. Di dalam pemberitahuannya itu mereka mengatakan bahwa perundingan dengan pihak Republik di bawah naungan KTN sudah tidak ada gunanya lagi pada taraf sekarang

46). Amiruddin Yunus, *Garis Politik Hatta*. Penabur, Bukittinggi 1950, hal. 73.

47). Nugroho Notosusanto, *op. cit.* hal. 21.

ini. Diberitahukannya bahwa mereka akan membentuk pemerintah federal sementara tanpa mengikut-sertakan Republik.⁴⁸⁾ Pemberitahuan Belanda itu kemudian disusul oleh sebuah ultimatum kepada pihak Indonesia, yaitu agar Republik segera menerima semua usul rencana Belanda yang pernah disampaikannya dalam rangka penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kemudian pada tanggal 18 Desember Cochran menerima sebuah surat dari Belanda yang mengatakan bahwa mereka telah membatalkan persetujuan gencatan senjata yang telah disetujui bersama dengan persetujuan Renville.

Penolakan Belanda untuk melakukan perundingan dengan perantara KTN, itu rupanya dilatar-belakangi oleh rangkaian rencana yang telah dibuatnya sebelum pemberitahuan dan ultimatum mereka yang telah disampaikannya terlebih dahulu. Sebagai buktinya ialah tindakan mereka yang dilakukannya pada tanggal 19 Desember 1948. Pada hari itu sekitar jam 5.30 pagi pesawat-pesawat terbang pembom Belanda telah melakukan serangkaian serangan di atas ibukota Republik, Yogyakarta. Dengan itu mulailah serangan agresi Belanda yang kedua kalinya terhadap Republik Indonesia. Tindakan Belanda ini dimaksudkannya untuk melumpuhkan kekuatan Republik. Mereka telah menangkap Bung Karno dan Bung Hatta serta sekian banyak pemimpin-pemimpin teras lainnya. Penangkapan itu rupanya memang telah direncanakan oleh Belanda dengan anggapan bahwa dengan penangkapan para pemimpin ini, maka dengan sendirinya perlawanan Republik Indonesia tidak dapat lagi dilanjutkan. Juga dengan didudukinya ibukotanya yang merupakan pusat perlawanan, tentu saja diperkirakan oleh mereka akan dapat menghancurkan kekuatan perlawanan Republik Indonesia. Dugaan ini sama sekali tidak benar, karena para pemimpin Republik seperti Jenderal Sudirman, Kolonel Simatupang, Kolonel Nasution, Letkol. Suharto telah melanjutkan perlawanan bergerilya. Di Sumatera, Syafruddin Prawiranegara telah memimpin pemerintahan sesuai dengan mandat yang diterimanya dari Presiden Sukarno.

⁴⁸⁾ Ali Sastroamidjojo, *op. cit.*, hal. 239.

Jika kita memperhatikan situasi ketika penyerangan agresi Belanda kedua kalinya itu, maka sungguh sangat menyulitkan pemerintah Republik Indonesia. Karena pada waktu itu pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) juga telah melakukan pemberontakannya di Madiun. Namun dengan keberanian moril dari para pemimpin kita, semua itu dapat diatasi bersama. Demikianlah Republik Indonesia tetap dapat berdiri sebagai negara di tengah-tengah negara lainnya di muka bumi ini.

Ketika peristiwa agresi kedua Belanda ini terjadi, Mgr. Sugiyoprana bertempat tinggal di Pastoran Bintaran. Sebagai seorang pemimpin yang aktif menghayati situasi yang dihadapi oleh negaranya, maka beliau pun telah mengambil pelbagai tindakan yang dapat membantu sejauh mungkin. Sebagai contoh tindakannya dalam rangka perayaan hari besar Natal. Sebagaimana diketahui bulan Desember adalah bulan yang suci bagi ummat Kristen karena pada bulan inilah mereka akan merayakan hari besar mereka, yaitu hari Natal. Jadi ketika tindakan agresi Belanda ke II itu dilakukannya, para pengikut agama Kristen sudah bersiap-siap menanti kedatangan hari Natal, yaitu pada tanggal 25 Desember. Hari Natal tentu oleh mereka akan dilaksanakan semeriah mungkin, karena hanya sekali setahun. Tetapi perayaan yang meriah dilarang oleh Mgr. Sugiyoprana sebagai tanda ke-ikutsertaan menghayati penderitaan akibat serangan "membabbuta" dari kolonialis Belanda itu. Kepada semua ummat Katolik diperintahkan agar melaksanakan perayaan Natal itu secara sederhana. Hal ini antara lain disampaikan pula kepada pastor Sandiwan Brata yang ketika itu datang menjumpai beliau di Bintaran, dengan kata-kata, "Jangan mengadakan Natal yang meriah, perayaan Natal harus yang sederhana sekali."⁴⁹⁾

Situasi sulit yang sedang dihadapi, biasanya dapat menumbuhkan perasaan persahabatan yang dalam. Sering situasi itu mendorong orang lain untuk mengulurkan tangan pertolongan kepada

49). Wawancara dengan Pastor Sandiwan Brata, *loc. cit.*

sesamanya. Demikianlah dalam situasi yang serba tidak menentu akibat serangan agresi Belanda itu, Mgr. Sugiyopranata menunjukkan rasa kesetia-kawanan dan rasa persahabatannya yang dalam kepada Bung Karno dan keluarganya. Ini ditunjukkannya dengan mengurus semua keperluan-keperluan keluarga Bung Karno ketika beliau sedang menjalani pembuangan pada tahun 1948 – Juli 1949.⁵⁰⁾

Usaha-usaha Mgr. Sugiyopranata tidak hanya menyangkut pada persoalan-persoalan kecil dan pribadi saja, akan tetapi ketika itu beliau pun melakukan tindakan-tindakan yang sangat penting artinya bagi Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, setelah tindakan agresi Belanda itu, yang berhasil menduduki ibukota Republik Indonesia, Yogyakarta, maka Belanda melakukan tindakan selanjutnya dengan melakukan blokade terhadap Republik Indonesia. Dalam hubungan inilah nantinya Mgr. Sugiyopranata melakukan tindakan yang sangat mengejutkan pihak kolonialisme Belanda. Beliau berhasil menembus blokade itu dan berhasil berhubungan dengan luar negeri, antara lain dengan Amerika Serikat dan Inggris. Ini terbukti dengan dimuatnya karangan beliau di dalam sebuah majalah Amerika Serikat, yaitu *Commonwealth*. Di dalam karangan itu beliau menggambarkan situasi pendudukan yang dilakukan oleh Belanda. Beliau antara lain berkata bahwa blokade bagi bangsa Indonesia itu juga berarti blokade pikiran. Ditegaskannya bahwa dengan pendudukan dan blokade Belanda di daerah Republik maka tidak ada pakaian dan makanan, pun juga tidak ada imbalan ideologis. Tidak ada susu, buku-buku, majalah dan ide-ide guna bahan informasi tentang apa yang terjadi di dunia luar Republik. Karena itu beliau berseru kepada redaksi dan para pembaca *Commonwealth*, supaya mereka memberi jalan guna mengirimkan bahan bacaan ke dalam daerah Republik, agar bangsa Indonesia tidak saja bebas dari komunisme, tetapi juga dari imperialisme.⁵¹⁾

50), M.P.M. Muskens Pr. op. cit, hal. 338.

51). *Ibid.*, hal. 337.

Sebagai seorang uskup, pemimpin agama Katolik, tentulah beliau adalah tempat mengadu, bertanya, meminta nasehat dari pelbagai pihak, baik tua maupun muda, bahkan juga dari mereka yang non Katolik. Di dalam menghadapi agresi Belanda itu, pemuda Katolik pun tidak mau tinggal diam. Sehubungan dengan itu, pada suatu hari datanglah serombongan pemuda Katolik menjumpai beliau di pastoran Bintaran. Maksudnya untuk bertanya kepada beliau tentang apakah mereka sebagai orang beragama Katolik bisa ikut berjuang untuk menghadapi Belanda. Dengan nada "agak marah" beliau menjawab, "Apa? Coba ulangi lagi pertanyaan itu; ayo! Segera berangkat." Bahkan beliau mengatakan kepada pemuda-pemuda Katolik itu, "dan kau baru boleh pulang kalau mati."⁵²⁾

Dalam masa yang gawat itu, hubungan beliau dengan Sultan Hamengku Buwono juga tetap berlangsung dan sering menyampaikan pelbagai hal kepada Sultan. Beliau sering mengirimkan utusannya untuk menjumpai Sultan dan utusan itu ialah Pak Suwandi.

Demikianlah gambaran perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Kemerdekaannya di mana Mgr. Sugiyopranata juga telah ikut terlibat di dalamnya. Dan agaknya tidak begitu keliru jika dikatakan bahwa selama dalam masa perjuangan itu, beliau juga telah memberikan sumbangannya yang "cukup berarti".

52). Wawancara dengan Pastor Tentara Kodam VII/Diponegoro Let.Kol. Dr. Harsono-susanto Pr, yang dilakukan di kediamannya di Semarang, pada tanggal 20 Januari 1977. Dr. Harsonosusanto adalah sekretaris pribadi Uskup Agung Sugiyopranata dan dia berada di samping Mgr. Sugiyopranata ketika beliau mangkat.

BAB VI

KEMBALI KE SEMARANG MELANJUTKAN KERJA DI DALAM NEGARA YANG MERDEKA

Setelah melintasi liku-liku perjuangan yang memakan waktu yang cukup lama dan yang telah menimbulkan korban yang tidak sedikit, demikian pula bentuk perjuangan fisik dan diplomasi, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Belanda pada akhirnya tidak mampu mempertahankan penolakannya untuk mengakui kedaulatan bangsa Indonesia atas negerinya. Karena itu mereka telah bersedia memberikan pengakuan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) dan yang diwujudkan sejak tanggal 27 Desember 1949.

Dengan itu bangsa Indonesia pun memasuki babakan baru dalam sejarah kehidupannya sebagai bangsa merdeka di tengah-tengah bangsa-bangsa lainnya di muka bumi ini. Demikian pula, itu berarti terbukanya kesempatan yang lebih luas lagi bagi bangsa Indonesia untuk menata kehidupan mereka di dalam negaranya. Di balik itu tentulah pengakuan kemerdekaan itu membawa serta pelbagai permasalahan yang harus dihadapi, baik itu di bidang sosial, ekonomi maupun politik dan kebudayaan. Penataan masalah-masalah yang dimaksud tidaklah semudah seperti yang mungkin pernah dibayangkan ketika masih di dalam alam perjuangan merebut kemerdekaan itu sendiri.

Dimasukinya babakan baru kehidupan bangsa Indonesia itu, telah memberikan pula peluang yang lebih luas kepada Mgr. Sugiyoprana untuk melanjutkan kerja beliau sebagai tokoh yang kreatif; tidak hanya di bidang agama (Katolik) akan tetapi juga di bidang-bidang lainnya, seperti di bidang sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik. Untuk itulah maka beliau kembali ke Semarang untuk menjalankan tugasnya yang dibebankan kepadanya di dalam rangka masa yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yaitu di dalam masa kemerdekaan. Dengan demikian kembalinya beliau ke Semarang, berarti pula adalah untuk kembali menghadapi pelbagai permasalahan yang meminta ketekunan kerja dan kejera-

nihan pikiran. Ketekunan kerja dan kejernihan pikiran itu makin dituntut dari dirinya, karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu adalah cukup sulit karena mengandung sifat kompleks pada dirinya.

Sebagai pimpinan ummat Katolik dengan sendirinya beliau sangat memperhatikan usaha perkembangan ummatnya, termasuk bidang pendidikan imamnya. Salah satu usahanya di dalam bidang ini ialah diterimanya desakan beliau untuk membuka pendidikan imam praja di Indonesia. Seminari tinggi ini dapat berkembang dengan baik walaupun sering disertai oleh pelbagai rintangan yang tidak mudah diatasi; bahkan juga lembaga pendidikan ini pernah mengalami kepindahan tempat ke daerah lainnya, sebelum menetap di Kentungan sekarang ini.

Hasil yang pertama dari Seminari tinggi ini dikeluarkan pada tahun 1942. Tamatan yang pertama ini ditahbiskan sendiri oleh Mgr. Sugiyoprana. Dengan itu beliau telah menyaksikan buah asuhannya dan itu membawa arti tersendiri baginya. Dikatakan demikian karena berkembangnya Seminari Tinggi ini tidaklah dapat dilepaskan dari ketekunan beliau. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, beliau telah berusaha untuk mempertahankan hidup lembaga pendidikan ini, terutama di dalam masa-masa yang sulit seperti masa pendudukan Jepang dan di masa revolusi fisik. Dengan sikapnya yang terbuka beliau dengan tekun memberikan bimbingan kepada para calon imam yang sedang menjalani pendidikannya itu. Untuk itu beliau dengan rela bersedia mendatangi mereka untuk melakukan dialog-dialog yang intim; juga dalam hal ini beliau tidak melupakan pembicaraan-pembicaraan tentang masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapi para calon imam ini. Sehubungan dengan cara beliau yang seperti di atas itu, pastor Sandiwan Brata mengatakan bahwa cara beliau melakukan hubungan-hubungan intim dengan para

1). M. Henricia Muryantini CB, *Mgr. Sugiyoprana SJ*, Nusa Indah Ende Flores, 1975, hal. 35.

calon imam itu jelas bersifat "ke-jawaan".²⁾

Tentu saja lembaga pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, tidaklah mudah pengasuhannya untuk dengan segera memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan. Tentulah ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Kita lihat misalnya, hasil yang pertama dari lembaga pendidikan ini baru keluar pada tahun 1942, jadi memakan waktu enam tahun (1936–1942). Setelah itu pertumbuhannya pun agak berjalan lambat. Barulah sejak tahun 1950 perkembangan yang lebih cepat mulai nampak. Enam tahun kemudian, yaitu pada tahun 1956 ditahbiskanlah imam pribumi yang ke-100; dan sampai tahun 1956 itu telah ditahbiskan 37 imam praja, 36 imam Sarekat Yesus, 14 imam Karmelit, 5 imam Fransiskan, 4 imam misionaris Hati Kudus, seorang imam Lazaris, seorang imam Salib Suci, seorang imam Sarekat Hati Yesus dan seorang imam dari missionaris Keluarga Kudus.³⁾

Sebagai seorang Uskup tentulah usaha pembinaannya tidaklah terbatas pada para rohaniawan saja tetapi juga meliputi seluruh ummat Katolik. Karena itu beliau juga selalu berusaha langsung untuk berhubungan dengan umat awam Katolik. Beliau selalu memberikan pedoman-pedoman hidup kepada mereka dalam segala segi kehidupan. Diperhatikannya pendidikan anak-anak ummat Katolik, kehidupan sosial-ekonomi mereka dan lain-lain.

Kepada para orang tua Katolik beliau selalu menganjurkan untuk anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; baik dengan tujuan untuk menjadi orang Katolik yang baik, maupun untuk menjadi seorang nasionalis yang baik. Sehubungan dengan itu beliau pernah berpesan sebagai berikut:

"Anak-anakku, pemuda dan pemudi Katolik kusuma bangsa, harapan gereja. Lihatlah sawah-sawah di sekitarmu dengan mata hatimu yang terbuka bagaimana gelombang lautan padi yang serba putih gading melambai-lambai menantikan kedatanganmu sebagai pengetam. Memang mewah meriahlah panennya, sedang jumlah pengetam adalah sedikit sahaja.

- 2). Wawancara dengan pastor Sandiwan Brata Pr. pada tanggal 26 Januari 1977, di pastoran Pugeran Yogyakarta.
- 3). M. Henricia Muryantini CB, *loc. cit.*

Berdoalah supaya pemilik panenan berkenan mengirimkan pengetam yang secukupnya. Berdoalah dengan rendah dan gerak hati, supaya kita memperoleh Imam, Bruder dan Suster aseli, yang benar-benar berkenan kepada Tuhan, bangsawan dan muliawan menurut hati dan hatinya, cukup cakap, cerdik pandai, berbudi bahasa dan berbudi bicara, berjiwa senang dan tenang, cinta akan nusa dan bangsanya dengan kebutanyaannya.”⁴⁾

Tetapi kegiatan beliau tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan, namun juga menyangkut bidang-bidang lainnya, termasuk bidang sosial ekonomi. Akan tetapi sebenarnya kegiatannya di bidang ini bukanlah hal baru baginya. Karena jauh sebelum menduduki jabatan Uskup, beliau telah memperhatikan secara seksama hal-hal tersebut. Beliau memang selalu menekankan bahwa kerasulan sosial itu penting karena kehidupan sosial ekonomi merupakan dasar kehidupan rohani.⁵⁾ Karena itu jika di dalam jabatannya sekarang ini, yaitu sebagai Uskup, masih dan selalu memperhatikan persoalan-persoalan yang bersifat sosial ekonomi, itu sebenarnya hanyalah merupakan kelanjutan dari usaha-usahanya yang sejak lama telah dirintisnya. Dan dalam kedudukannya sebagai Uskup itu, tentulah beliau mempunyai wewenang yang lebih besar sehingga dapat menerapkan ide-idenya yang sejak lama dipunyainya itu. Karena sebagai Uskup, tentulah pula beliau akan lebih didengar, lebih dipercaya dan lebih dari itu, tentulah perintah-perintahnya akan dijalankan oleh bawahannya dan ummatnya.

Pada tahun 1950-an suatu hal yang cukup mencemaskan ialah bangkitnya kembali kekuatan komunisme melalui partai komunis, yaitu PKI. Agaknya Mgr. Sugiyoprana melihat juga gejala buruk ini, apalagi nampak dengan jelas bahwa PKI telah berhasil menarik simpati rakyat ”kecil” dan sebagian daripada mereka telah menjadi pendukung yang aktif dari PKI. Rakyat

4). Isi surat Gembala tertanggal 6 Februari 1956, dikutip dari M. Henricia CB. ”Peranan Monsignore Albertus Sugiyoprana SJ. Dalam rangka Usaha Membina Kehidupan Gereja di Vikariat Apostolik Semarang Antara 1950–1960” Skripsi Untuk Gelar Kesarjanaan Pada IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta, 1973, hal. 28.

5). M. Henricia Muryantini CB. *op. cit.*, hal. 58.

"kecil" ini sebagian besar berpenghasilan rendah dengan pekerjaan mereka sebagai buruh, petani, nelayan dan lain-lain. Sebagian dari mereka ini sebenarnya tertarik oleh janji-janji PKI yang membayangkan kepada mereka bahwa PKI akan memberikan "perbaikan hidup materil" kepada mereka. Mgr. Sugiyopranata melihat ini semua dengan mata hatinya dan dia mengerti akan permasalahan yang dihadapi oleh rakyat yang "miskin" ini. Karena itu beliau mengambil langkah-langkah untuk mencegah makin me luasnya bahaya komunisme ini, beliau berusaha mencegah agar rakyat "miskin" itu tidaklah makin terperosok ke dalam liang yang telah dipasang oleh PKI. Beliau berusaha agar dari kalangan Katolik muncul pula usaha-usaha untuk mendirikan organisasi-organisasi buruh tani dan nelayan dan lain-lainnya. Organisasi seperti itu akan dapat menjadi alat perjuangan kaum awam Katolik; malah juga diharapkannya akan dapat terbuka bagi orang-orang yang "bukan" Katolik.

Ketika itu di wilayah Vikariat Semarang yang dipimpinnya, memang terdapat orang-orang awam Katolik yang bergiat menanggapi perkembangan masalah-masalah sosial-ekonomi. Hal ini sejalan dengan keinginan Mgr. Sugiyopranata dan karena itu dengan sepenuh hati memberikan dorongan kepada mereka ini untuk mewujudkan usaha-usahanya itu. Demikianlah pada tanggal 19 Juni 1954 terbentuklah sebuah organisasi buruh yang diberi nama: Organisasi "Buruh Pancasila".⁵⁾

Sejak itu telah berkembang pelbagai organisasi sosial yang dibentuk oleh warga Katolik di seluruh Vikariat Semarang. Suatu hal yang "unik" dari organisasi-organisasi sosial warga Katolik itu ialah digunakannya kata "Pancasila" sebagai nama organisasinya dan bukan kata Katolik. Usaha yang dimulai dari Vikariat Semarang itu nampak memberikan titik-titik terang di dalam perkembangannya.

5). M. Henricia Muryantini CB. *op. cit.*, hal. 58.

6). *Ibid.*, hal. 61.

Agaknya ini membuka jalan untuk melebarkannya ke seluruh Indonesia.

Pada tahun 1955 MAWI (Maielis Wali Gereja Indonesia) mengadakan sidangnya dan antara lain membicarakan pelbagai hal tentang kegiatan-kegiatan di bidang sosial. Sidang MAWI ini menghasilkan antara lain panitia-panitia untuk pelbagai bidang; untuk bidang sosial, Mgr. Sugiyopranata ditunjuk sebagai ketuanya.⁷⁾ Penunjukan dirinya itu tentulah tepat sekali karena beliau memang mempunyai minat yang besar di bidang ini, sebagaimana dikatakan di atas. Sejalan dengan itu, pada setiap kesempatan beliau selalu menganjurkan kepada umat Katolik untuk senantiasa mengembangkan karya-karya sosialnya di masyarakat. Beliau mengatakan bahwa beliau menginginkan agar golongan pegawai, pekerja, buruh, petani dan pedagang Katolik berusaha untuk menciptakan suatu front sosial yang kuat yang mampu berkarya dan meliputi semua golongan dan lapisan yang dilandasi oleh keadilan dan cinta kasih Katolik.⁸⁾

Bidang lain yang mendapat perhatiannya ialah pendidikan generasi muda. Generasi muda sebenarnya mempunyai kedudukan sentral di dalam kelangsungan dan kelanjutan hidup sesuatu bangsa, juga sekaligus merupakan pelanjut gereja dan karya misi. Demikianlah dapat dimengerti jika beliau berpendapat bahwa generasi muda sangat penting dan tidak hanya bagi suatu bangsa tetapi juga untuk gereja.⁹⁾ Karena itu untuk setiap kesempatan beliau selalu berusaha untuk mengadakan kontak dengan generasi muda. Juga kepada orang tua beliau banyak memberikan petunjuk agar mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Beliau selalu mendorong kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi generasi muda, baik untuk tingkat sekolah lanjutan maupun untuk tingkat maha-

⁷⁾. Y.Wietjens SJ,"Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan agung Semarang", dalam *Sejarah Gereja Katolik Indonesia Wilayah-wilayah Keuskupan dan Majelis Agung Wali Gereja Indonesia Abad ke-20*, (jilid 3b,), Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Jakarta, 1974, hal.1465.

⁸⁾ M. Henricia Moeryantini CB. *op. cit.*, hal. 63.
⁹⁾ *Ibid.*, hal. 78.

siswa. Beliau selalu mengharapkan agar pendidikan generasi muda dapat membentuk watak mereka dan pendidikan itu haruslah dilandasi oleh semangat agama dan kebangsaan. Dengan itu diharapkannya akan tercipta watak generasi muda yang selalu bersedia mempertahankan dan membela nilai-nilai luhur yang telah diwarisi dari nenek moyangnya.¹⁰⁾

Dalam pandangan Mgr.Sugiyoprana pendidikan itu haruslah menyangkut pada pendidikan, tidak hanya yang formal yang berupa pendidikan di sekolah akan tetapi juga menyangkut pendidikan di lingkungan keluarga. Sehubungan dengan masalah pendidikan itu, bagi Mgr.Sugiyoprana bukanlah hal yang baru. Beliau memulai pendidikannya dari sekolah guru dan dari sinilah beliau merintis jalannya untuk mendapatkan pendidikan immamatnya melalui bimbingan pastor van Lith.

Usahanya di bidang pendidikan ini bukanlah tanpa rintangan, terutama di masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan kita. Tetapi setelah beliau kembali menjadikan perhatiannya yang utama. Secara berangsur-angsur, tetapi agaknya cukup cepat, perkembangan pendidikan di Vikariat Semarang berjalan seperti di Yogyakarta, Surakarta, Magelang dan di tempat-tempat lain. Kemajuan perkembangan itu meliputi semua tingkat pendidikannya dari sekolah dasar sampai ke sekolah perguruan tinggi; juga semua jurusan diusahakan ada pada sekolah-sekolah yang diasuh oleh yayasan-yayasan Katolik, dari jurusan umum sampai ke kejuruan. Jadi ada SMP/SMA, SGB/SGA, SPG, SKP/SKKA demikian pula ada Universitas dan ada IKIP. Di Jawa Tengah pada permulaan tahun 1949 Yayasan Kanisius mempunyai 126 sekolah dasar, 4 SKP, 16 SMP dan lain-lain Demikian pula setelah dibuka IKIP Sanata Dharma dan sejak 1955 ia telah mendidik guru-guru untuk pengajaran tingkat sekolah menengah. Juga pelbagai kursus telah dibuka, seperti kursus pertanian di Salatiga dan kursus tukang kayu di Semarang.

Di Yogyakarta telah dibuka pula Pusat Katekatik sejak tahun 1960, dan lembaga ini bertujuan untuk memperhatikan dan mem-

¹⁰⁾ *Ibid.*

perkembangan masalah-masalah katekese. Selanjutnya pada tahun 1962 Akademi Katekatik Katolik Indonesia (AKKI) telah dibuka. Pembukaan AKKI sejalan dengan usaha-usaha untuk melakukan pembaharuan dan menciptakan guru-guru agama Katolik yang bermutu. AKKI kemudian berkembang dengan baik dan karena itu peranannya ditingkatkan untuk mendidik murid-murid doktoral selama dua tahun. Karena itu pada tahun 1969 AKKI diganti namanya dengan Sekolah Tinggi Katekatik *Pradnya-widya*.¹¹⁾

Laju perkembangan yang disebutkan di atas bukanlah tanpa rintangan, baik yang bersumber dari dalam diri pengasuh pendidikan itu sendiri maupun yang lahir dari luar lingkungan mereka. Sebagai salah satu contoh, ialah apa yang terjadi pada tahun 1953; pada tahun ini pemerintah melalui Departemen Agama mengeluarkan sebuah peraturan yang melarang missionaris asing untuk masuk ke Indonesia. Keadaan makin sulit pada tahun 1959 karena adanya larangan bagi bangsa/warga negara Belanda untuk mengajar pada sekolah-sekolah di Indonesia. Larangan ini jelas merupakan suatu pukulan yang tidak ringan akibatnya bagi perkembangan pendidikan yang diasuh oleh yayasan-yayasan Katolik. Karena ketika itu jumlah bangsa/warganegara Belanda yang bekerja pada sekolah-sekolah Katolik cukup banyak jumlahnya.¹²⁾ Sengketa Indonesia dan Belanda yang menyangkut wilayah Irian Barat merupakan penyebab dari tindakan-tindakan tersebut.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut Mgr.Sugiyoprana telah menempuh kebijaksanaan yang cukup wajar, yaitu mengusahakan agar persoalan kewarganegaraan warga Katolik berkebangsaan asing segera diselesaikan; untuk ini beliau telah mengirimkan surat ke pengadilan negeri.¹³⁾ Yang menarik juga sebagaimana yang telah disebut di atas, ialah bahwa cara pendidikan

¹¹⁾. Y.Weintjens SJ, *op. cit.*, hal. 893.

¹²⁾. M.Henricia Moeryatini CB, *op. cit.*, hal. 113

¹³⁾ *Ibid.*, hal. 113

dikan yang selalu dianjurkannya ialah penekanannya pada pendidikan spiritual tetapi sekaligus juga kecintaannya kepada bangsanya; jadi generasi muda dianjurkan untuk menjadi seorang hamba yang taat kepada Tuhannya di balik itu juga dianjurkannya untuk menjadi seorang patriot/nasionalis. Ini agaknya dimaksudkannya juga untuk menghadapi arus pengaruh kebudayaan luar (asing).

Bahwa beliau memperhatikan hal itu adalah suatu hal yang wajar mengingat pesatnya pengaruh luar itu, yang menyebabkan banyaknya "generasi muda" yang terlalu jauh terpengaruh oleh arus pengaruh kebudayaan asing itu. Mereka malah terkadang lebih bangga terhadap kebudayaan asing, tetapi hal ini juga tidak jarang menjangkiti "generasi tua", dari pada kebudayaan mereka; mereka malah sinis terhadap orang-orang yang tidak mengikuti arus kebudayaan asing itu. Mereka menuduh dengan sinis bahwa orang-orang tersebut adalah orang ketinggalan zaman, orang kolot dan semacamnya. Orang-orang semacam ini terkadang bertingkah laku "lucu" dengan sikap mereka yang kebelanda-belandaan, kebarat-baratan; mereka lupa bahwa tingkah lakunya tidak lebih dari menampakkan sikap seorang yang berjiwa "budak".

Usahanya untuk menanamkan jiwa kebangsaan/kecintaan tanah air kepada generasi muda itu, sebenarnya hanyalah merupakan penampakan dari sikap pribadi beliau selama ini. Karena sebagaimana yang selalu dinampakkannya beliau sendiri adalah seorang yang sangat cinta kepada bangsa dan tanah airnya. Hal ini misalnya nampak dengan jelas ketika beliau memutuskan untuk menetap di Yogyakarta ketika bangsanya sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya (periode 1946 – 1949). Beliau telah bersedia menerima semua resiko akibat tindakannya itu, yang jelas-jelas menunjukkan sokongannya kepada perjuangan bangsanya.

Selama beliau menduduki jabatan Uskup (Agung) Semarang, beliau juga telah melakukan beberapa perubahan di dalam lingkungan/upacara gereja. Usaha semacam ini sebenarnya tidak hanya untuk melakukan adaptasi gereja ke dalam masyarakatnya, tetapi lebih dari itu cara untuk tetap mempertahankan nilai-nilai budaya

setempat. Sejalan dengan itu pada tahun 1956, beliau telah memberikan izin kepada semua pastor yang berada di dalam wilayahnya untuk mempergunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia ketika mereka menerima sakramen permandian.¹⁴⁾ Juga beliaulah yang menganjurkan penggunaan *gamelan* di dalam pelaksanaan liturgi. Pada mulanya tindakannya ini mendapat tentangan dari pelbagai pihak.¹⁵⁾ Hal seperti ini tidak harus diperlakukan untuk warga Katolik bangsa Indonesia, tetapi juga di kalangan warga Katolik berbangsa Cina. Sehubungan dengan itu, di dalam sidang MAWI yang diadakan pada tahun 1955 beliau membela hak bagi orang Cina untuk memelihara bahasa dan kebudayaan bangsa Cina sebagaimana halnya suku-suku lainnya di Indonesia ini.¹⁶⁾

Dalam kehidupan masyarakat Jawa (Tengah) ada dua bentuk kesenian (tradisional) yang sangat penting artinya, sehingga keduanya tidaklah dapat diabaikan, yaitu wayang dan ketoprak. Karena itu kedua bentuk kesenian ini selalu mendapat perhatian dari tokoh-tokoh karya missi gerejani. Hal ini dapat kita lihat pada tahun 1950-an dengan apa yang dilakukan oleh Bruder Thimos teus FIC, yaitu dengan mengusahakan suatu bentuk permainan wayang yang isinya bersifat kristiani; bentuk ini dikenal dengan nama "*wayang wahyu*". Demikian pula halnya di dalam ketoprak, karena ada pula gubahan yang mengandung ajaran kristiani, misalnya seperti "*Daud dan Goliath, Kisah Esther*".¹⁷⁾ Sehubungan usaha-usaha semacam itu, terdapat suatu tindakan yang lebih unik yaitu pelaksanaan *slawatan*. Sebenarnya bentuk upacara ini merupakan kebiasaan yang biasanya hanya terjadi di kalangan golongan Islam. Walaupun demikian, di Ponorogo telah diintroduksi suatu bentuk slawatan yang disesuaikan dengan ajaran Kristen.¹⁸⁾ Sikapnya untuk selalu menyesuaikan agama Katolik dengan kondisi masyarakat Indonesia selalu disebarluaskan. Sehubungan dengan itu beliau pernah berkata, bahwa agama Katolik (di Indonesia) berangsur harus bertambah banyak menyesuaikan

¹⁴⁾ *Ibid.*, hal. 54

¹⁵⁾ Wawancara dengan Pastor Sandiwan Brata, *loc. cit.*

¹⁶⁾ Y. Weittjens SJ, *op. cit.*, hal. 1463.

¹⁷⁾ M. Henricia Muriantini CB, *op. cit.*, hal. 54

¹⁸⁾ *Ibid.*

diri dengan kebudayaan Indonesia, kalau ingin merupakan bagian yang harmonis dan berpengaruh dari kehidupan Indonesia. Namun beliau pun mengakui pula bahwa kadang-kadang para imam Katolik membawakan agama kepada rakyat dalam bungkusan Eropa. Dalam penglihatan beliau hal yang demikian, atau ajaran yang demikian itu mungkin akan diterima oleh rakyat selama rakyat belum dewasa.

Selanjutnya beliau juga agaknya tertarik dalam bidang politik dan memang beliau tidak jarang terlibat dalam "politik praktis". Keterlibatannya dalam bidang ini menyebabkan beliau harus bersedia untuk menerima pelbagai kritik dari berbagai pihak, juga terutama dari ummat Katolik sendiri. Agaknya mereka beranggapan bahwa adalah kurang pada tempatnya jika beliau sebagai uskup melibatkan diri dalam bidang politik praktis. Tentu saja beliau tidak mengabaikan kritik-kritik yang juga ada yang berasal dari rekan-rekan dekatnya, sebaliknya itu semua menjadi bahan-bahan pertimbangannya. Agaknya beliau beranggapan bahwa keterlibatannya di dalam politik praktis itu adalah wajar, apalagi keterlibatannya itu adalah dalam kedudukannya sebagai warganegara dan juga sama sekali bukan untuk mendapatkan kedudukan bagi pribadinya. Bahkan keterlibatannya itu sebenarnya juga berkaitan dengan usahanya untuk membuka dan meningkatkan peranan aktif warga Katolik di dalam ikut membangun bangsa dan negaranya. Sehubungan dengan itu, dengan bekerja sama dengan I.J.Kasimo, beliau memprakarsai sebuah kongres untuk ummat Katolik di seluruh Indonesia, yaitu Kongres Ummat Katolik Seluruh Indonesia (KUSKI ke I) dilaksanakan di Yogyakarta pada 7 – 12 Desember 1949. Kongres ini mendapat perhatian yang besar juga oleh mereka yang bukan Katolik demikian pula oleh pemerintah; Presiden Sukarno dan Wakil Presiden/Perdana Menteri Hatta datang pula menghadiri pembukaan kongres ini. Bung Karno di dalam sambutannya telah berpesan kepada para peserta kongres agar mereka (dan juga ummat Katolik) tidak hanya mengejar kepentingannya sendiri di atas kepentingan

umum negara.¹⁹⁾ Salah satu hasil terpenting dari KUKSI I ini ialah dibentuknya sebuah Partai Katolik untuk masyarakat Indonesia. Resolusi pendirian Partai Katolik untuk masyarakat Indonesia ini berkata,

"Kami ummat Katolik seluruh Indonesia, sejak dua puluh lima tahun yang lalu senantiasa berusaha untuk mengadakan satu partai Katolik saja, yang meliputi seluruh daerah Tanah Air kita, hal mana ternyata dari riwayat perkembangan beberapa perkumpulan Katolik, yang bergerak di lapangan politik, pada tanggal 12 Desember 1949 berkumpul dalam Kongres Ummat Katolik Seluruh Indonesia di Yogyakarta dengan berkat dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa menyatakan dengan suara bulat, bahwa saat untuk mendirikan satu partai saja buat seluruh Indonesia telah tiba; memutuskan menjelaskan :

1. Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) didirikan pada tanggal 8 Desember 1945 di Surakarta.
2. Partai Katolik Rakyat Indonesia (PKRI) yang didirikan di Flores.
3. Partai Katolik Rakyat Indonesia (PKRI), yang didirikan di Makasar.
4. Partai Katolik Rakyat Indonesia Timur (PARKIT) yang didirikan di Timor.
5. Persatuan Politik Katolik Flores (PERPOKAF), yang didirikan di Flores.
6. Permusyawaratan Majelis (PEMAKAT), yang didirikan di Menado.
7. Partai Katolik Indonesia Kalimantan (PARIKA), yang didirikan di Kalimantan.

menjadi satu partai kesatuan untuk ummat Katolik seluruh Indonesia dengan nama : Partai Katolik.²⁰⁾

Guna menciptakan suatu partai (Katolik) yang dapat berfungsi dengan baik sebagaimana yang diharapkan, perlu diadakan kon-

^{19).} Pipitsaputra, *Beberapa Aspek Dari Sejarah Indonesia Aliran Nasionalis Islam-Katolik sampai akhir zaman perbedaan paham*. Nusa Indah, Ende-Flores, 1973, hal. 341.

^{20).} Ibid, hal. 342.

solidasi. Untuk maksud itu pada tahun 1950 Partai Katolik mengadakan kongresnya yang pertama di Semarang. Di dalam amanatnya di depan peserta kongres, Mgr.Sugiyopranata berpesan agar mau bekerja keras guna kepentingan-kepentingan sosial. Ditegaskannya pula bahwa jika gereja di Indonesia mau hidup, maka seluruh ummat Katolik Indonesia hendaknya bersedia untuk bekerja dan berkorban. Ajakan beliau itu sangatlah tepat kiranya, karena sebagai bangsa yang baru saja lepas dari perjuangan pisik tentulah dapat diselesaikan jika kita semua mempunyai tekad untuk bekerja keras seperti yang diperintahkan oleh Mgr.Sugiyopranata itu.

Perkembangan Partai Katolik cukup menggembirakan karena di dalam percaturan politik negara, cukup banyak tokoh-tokoh muncul dan berperanan, bahkan sampai mampu menduduki jabatan-jabatan tinggi, juga tingkat menteri.²¹⁾ Peranan penting yang dimainkan oleh tokoh-tokoh Katolik itu, agaknya cukup unik; karena sebagai sebuah partai yang sebenarnya hanya "kecil" di tengah-tengah partai besar. Apalagi jika dilihat dari penganutnya yang sangat kecil di tengah-tengah golongan mayoritas yang beragama Islam.

Antara pemerintah/bangsa Indonesia dengan pemerintah Belanda telah timbul kembali sengketa yang saling menjauahkan kedua belah pihak ini. Ini bersumber pada persoalan daerah Irian Barat (sekarang bernama Irian Jaya) yang di dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tidak berhasil diputuskan nasibnya, yaitu tentang apakah daerah ini akan masuk wilayah Republik Indonesia atau tidak. Masalah ini merupakan salah satu "batu" penghalang di dalam KMB dan yang disepakati hanyalah ketentuan bahwa status Irian Barat akan dirundingkan kembali setelah setahun kemudian dari penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun setelah tiba waktunya untuk membicarakan status Irian Barat itu, pemerintah Belanda mengelak dengan

²¹⁾. Untuk mengetahui tokoh-tokoh Katolik yang pernah duduk di pelbagai lembaga kenegaraan kita, seperti Konstituante, DPR, MPR, DPA, Kabinet dan lain-lain, lihat : *ibid.*, hal. 497 – 507.

pelbagai cara dan alasan. Setiap perundingan yang diadakan untuk membicarakan persoalan Irian Barat itu mengalami kegagalan karena sikap pemerintah Belanda. Penolakan pemerintah Belanda untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia didasarkan atas pelbagai alasan, baik yang bersifat etnologis maupun politis. Mereka misalnya berpendapat bahwa penduduk Irian Barat tidaklah sama dengan penduduk ras Melayu, jadi secara etnologis mereka bukanlah bangsa Indonesia. Dilihat dari segi kemampuan bernegara, rakyat Irian Barat sama sekali belum mampu; mereka belum pernah mendapatkan pendidikan berne-gara. Karena itu sebelum mereka memperoleh tingkat pendidikan seperti itu, Belanda merasa berkewajiban untuk mendidik mereka. Juga wilayah ini tidak dapat secara langsung dimasukkan dalam wilayah Republik Indonesia, karena mungkin mereka tidak meng-hendakinya; mereka mungkin malah mau mendirikan negara sendiri. Karena itu rakyat haruslah diberi kesempatan untuk memilih, yaitu apakah mereka akan tetap tinggal sebagai bagian dari kerajaan Belanda atau mereka mau bergabung dengan wilayah Republik Indonesia; ataukah mereka akan mendirikan negara mereka sendiri yang tidak terikat, baik oleh Republik Indonesia maupun oleh kerajaan Belanda.

Untuk memperoleh penyelesaian damai telah diambil langkah-langkah oleh pemerintah Indonesia dengan jalan membawa persoalan ini ke forum internasional, antara lain juga ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Akan tetapi jalan ini pun tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Belanda tetap pada pendiriannya untuk tidak mau mengakui hak Indonesia atas daerah Irian Barat.

Dengan adanya sengketa Indonesia dengan Belanda ini, maka kedudukan Mgr.Sugiyoprana cukup sulit. Sebagai seorang Uskup, yang berarti adalah kepala pemerintahan gerejani di Vikariat Semarang, tentulah beliau mempunyai hubungan-hubungan yang luas dengan bangsa Belanda, khususnya yang beragama Katolik. Di lain pihak, sebagai warganegara Indonesia beliau jelas menyokong tuntutan pemerintah/bangsa Indonesia atas wilayah Irian

Barat itu. Kedudukan Mgr.Sugiyopranata makin sulit karena adanya kenyataan bahwa Partai Katolik Belanda (KVP) adalah partai yang gigih membela politik kolonialisme Belanda.

Meningkatnya suhu pertentangan yang menyangkut masalah Irian Barat memberikan pula akibat langsung terhadap karya misi di Indonesia, terutama mereka yang berbangsa Belanda. Antara lain karena pada tahun 1953 Sekjen Departemen Agama mengeluarkan suatu peraturan yang melarang missionaris Asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia. Peraturan ini agaknya terutama sekali ditujukan kepada para missionaris berkebangsaan Belanda. Hal ini telah melahirkan perselisihan paham antara Departemen Agama dengan Gereja Katolik.²²⁾

Demikian pula Menteri PDK Priyono telah mengeluarkan suatu peraturan yang melarang missionaris Asing untuk mengajar pada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia; juga termasuk yang diasuh oleh yayasan-yayasan Katolik. Kedua peraturan pemerintah itu jelas merupakan pukulan bagi karya misi, karena di dalam tubuh karya misi terdapat sekian banyak orang-orang warganegara Belanda baik sebagai imam, suster, dan bruder; di samping itu juga tidak sedikit yang mengajar di sekolah-sekolah asuhan yayasan-yayasan Katolik.

Di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang lahir sebagai akibat peraturan itu beliau tetap bertindak bijaksana; beliau mencari jalan keluar dengan sebaik-baiknya. Antara lain cara yang ditempuhnya ialah mendorong tenaga-tenaga asing (terutama Belanda) yang sudah memenuhi syarat untuk segera mengambil kewarganegaraan Indonesia. Untuk itu beliau sendiri membantu kelancaran pengalihan kewarga-negaraan itu dengan jalan mengirimkan surat ke pengadilan negeri Semarang, yang isinya memintaikan penyelesaian kewarga-negaraan orang-orang asing tenaga misi itu.²³⁾

Sementara itu diadakan pula usaha untuk mengkonsolidasikan

²²⁾. M.Henricia Muryantini CB, *op. cit.*, hal. 83.

²³⁾. Lihat *lampiran A*.

ummata Katolik melalui suatu kongres pada tahun 1954; kongres ini dikenal dengan KUKSI II dan di dalam pelaksanaannya sempat dihadiri oleh ± 2000 orang utusan. Di dalam kongres itu juga nampak ada persatuan umat Katolik Indonesia guna menghadapi pemilihan Umum yang akan diadakan pada tahun 1955. Walaupun demikian masalah politik tidaklah begitu menonjol di dalam kongres ini, karena kongres ini lebih menekankan pembicaraannya pada masalah-masalah persamaan aksi sosial di Indonesia.²⁴⁾

Di dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan September 1955, Partai Katolik juga ikut serta dan berhasil memenangkan beberapa buah kursi, 6 buah kursi dari 260 kursi keseluruhan di Parlemen, kursi-kursi itu diperoleh dari daerah Jawa Tengah. Selanjutnya di dalam pemilihan umum itu, nampak gejala yang cukup membahayakan negara Pancasila, yaitu munculnya PKI sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Kemunculan PKI ini agaknya cukup mengkhawatirkan kalangan-kalangan tertentu, juga termasuk kaum Katolik; ini terbukti dari pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 2 Nopember 1955 yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Dalam inti sarinya tuntutan nasional bangsa Asia itu bermaksud menghancurkan sistem imperialisme kolonialisme kuno, yang biasanya mengaya-rayakan diri sendiri dengan mengorbankan atau sekurang-kurangnya dengan tiada memperdulikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Asia, yang berjuta-juta jumlahnya.

Akan tetapi pada dewasa ini pergerakan nasional itu yang harus sadar dan waspada, jangan sampai dijajah oleh kolonialisme model baru yang ingin merajai dunia dengan ideologinya, yang monopolistik itu. Tepat seperti mereka itu sudah berjuang melawan plutokratis imperialisme komunisme internasional, yang berusaha memperalat tuntutan nasional itu untuk menyelenggarakan cita-cita hatinya sendiri, yang akan melenyapkan harta benda rohani dan abadi, yang melekat di jiwa bangsa Asia.

²⁴⁾ M.P.M. Muskens Pr, Sejarah Gereja Katolik Indonesia Pengintegrasian Di Alam Indonesia, (jilid IV), Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Jakarta, 1974, hal. 402–405.

Pancasila dalam arti kata yang murni dan sejati, apalagi yang hidup beragama sebagai keyakinan dalam budi dan hati, dapat mencegah meresapnya ilmu Marxisme Materialisme.

Dalam segala pembangunan sosial yang harus diutamakan ialah kepentingan rakyat pada umumnya, yang sebagian besar tergantung dalam petani, buruh dan pekerja. Padahal pemerintah diwajibkan memperhatikan kesejahteraan rumah tangga, kesejahteraan masyarakat desa dan kampung. Industrialisasi yang terlalu amat besarnya dan memproletarisir petani haruslah dicegah; anti sosial kapitalisme yang memperbudak buruh patutlah ditolak.

Milik perorangan dan kebebasan untuk mempergunakan hasil pekerjaannya sendiri hendaknya dijamin oleh negara dalam prinsipnya. Hendaknya bangsa-bangsa Asia memelihara dan mempertinggi semangat gotong-royong dan persaudaraan, yang lazim berkembang dalam masyarakat Indonesia untuk mengerjakan kepentingan umum, seperti mendirikan koperasi. Negara hendaknya selalu siap-sedia untuk membantu dalam membuka hutan-belukar, mengeringkan rawa, menyelegarkan perairan dan membentuk gaya elektrik dengan memberi subsidi dan kredit.

Pemerintah haruslah membimbing usaha partikelir dari rakyat dan tak boleh mengenyampingkannya.”²⁵⁾

Pernyataan tersebut ditanda-tangani oleh Mgr. Sugiyopranata atas nama para uskup yang menghadiri sidang itu.

Nafas pernyataan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa para uskup berusaha untuk menghempang perkembangan komunisme di Asia, termasuk di Indonesia, yang pada waktu itu menunjukkan perkembangan pesat sebagai sesuatu kekuatan politik yang makin besar. Nampak juga bahwa para uskup itu percaya bahwa Pancasila dapat menjadi keyakinan bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi arus perkembangan komunisme itu. Mereka menganjurkan untuk tetap mempertahankan sistem-sistem kehidupan mereka yang asli seperti gotong-royong, yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakat khususnya di desa-desa. Ditunjuk-

²⁵⁾). *Ibid.*, hal. 405 – 406.

kanhja pula salah satu cara lain, ialah melalui koperasi di samping persediaan fasilitas kesejahteraan lainnya.

Dengan sendirinya usaha para uskup untuk membendung arus perkembangan golongan/ajaran komunisme di Asia, khususnya di Indonesia, tidaklah dapat terwujud dalam waktu yang singkat. Hal ini nampak dengan tetap mampunya PKI memenangkan sekian banyak kursi di dalam Konstituante, karena tentu saja usaha para uskup untuk mempengaruhi para pemilih dalam waktu yang begitu singkat, tidak akan berarti banyak. Di dalam pemilihan umum untuk anggota Konstituante, Partai Katolik memenangkan 10 buah kursi dari 250 kursi jumlah keseluruhannya. Untuk ini kembali Nusa Tenggara Timur menunjukkan *Kekatolikannya* yaitu dengan memberikan tujuh buah kursi kepada Partai Katolik; sedangkan Jawa Tengah berhasil juga menambah kemenangannya dari 1 kursi menjadi 2 kursi dan Jawa Timur tetap memberikan satu kursi kepada Partai Katolik.²⁶⁾

Sementara itu sengketa Irian Barat tetap tak teratas karena Belanda tetap pada pendiriannya untuk tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Irian Barat. Demikian pula Partai Katolik Belanda tetap pada pendiriannya yaitu menyokong pemerintah Belanda yang tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Hal yang demikian ini tidaklah sejalan dengan pendirian beliau karena sebenarnya beliau mengharapkan agar supaya Partai Katolik Belanda memberikan suaranya yang lebih menguntungkan pihak Republik Indonesia. Tetapi di dalam kenyataannya harapan itu tak terwujud. Beliau memberikan kritiknya yang cukup pedas atas sikap Partai Katolik Belanda itu. Dituduhnya Partai Katolik Belanda sebagai salah satu faktor penyebab meruncingnya hubungan Indonesia dengan Belanda. Pernyataannya ini dimuat dalam: *News Service National Catholic Welfare Conference* yang terbit di Amerika Serikat.²⁷⁾ Kecamannya tidak sampai di situ saja; beliau juga menyatakan bahwa sistem

²⁶⁾). *Ibid.*

²⁷⁾). *Ibid.*, hal. 407.

kolonialisme Belanda-lah yang mengacau-balaukan kehidupan bangsa Indonesia, juga di dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dituduhnya pula para pembesar Belanda bahwa mereka hanya memperhatikan golongan-golongan kecil seperti suku Ambon dan sebaliknya melalaikan golongan terbesar bangsa Indonesia yaitu suku Jawa. Menurut beliau di bawah kekuasaan kolonial Belanda hanya segolongan kecil orang Jawa yang diperkenankan menempuh pendidikan dengan tujuan untuk digunakan sebagai pegawai-pegawai pemerintahan kolonial. Sejalan dengan itu, timbullah di dalam masyarakat mental "pegawai negeri" yang terasing dari lingkungan kebudayaannya sendiri. Di samping kecamannya terhadap bangsa Belanda, ada juga kecamannya terhadap bangsa-bangsa Kapitalis Barat hanya bersedia memberikan bantuannya atas dasar kebutuhan yang bersifat egoistik. Juga menurut beliau perlambang kuatnya komunisme di Indonesia mendorong mereka (negara-negara Barat) untuk tidak memberikan bantuannya dan banyak orang (waktu itu) memilih Partai Komunis Indonesia karena menjanjikan kemajuan bangsa, demikian menurut beliau melalui wawancaranya pada surat kabar Amerika Serikat itu.²⁸⁾

Wawancara beliau dengan media Amerika Serikat itu telah mendapat tanggapan dari pelbagai pihak, juga di negeri Belanda. Reaksi itu antara lain dari Prof.Romme seorang tokoh partai Katolik negeri Belanda yang kurang setuju dengan pendapat Mgr.Sugiyopranata seperti yang diberitakannya pada media Amerika itu. Mendengar reaksi Prof.Romme itu beliau menyatakan bahwa partai Katolik sebagai partai terbesar di negeri Belanda dapat berbuat banyak untuk lebih memperbaiki hubungan Indonesia – Belanda. Selanjutnya beliau berkata, kalau Romme menghendaki agar ditunjuk suatu kekurangan yang harus diperbaiki dari pihak Belanda dalam hubungannya dengan Indonesia, maka ada satu hal yang mesti mereka perbaiki yaitu sikap mereka yang "merendahkan" Indonesia. Dikatakannya pula bahwa karena sikap yang merendahkan itu maka hampir semua pemberitaan mengenai

28). *Ibid.*, hal. 407 – 408.

Indonesia adalah dengan kata-kata "*menyerikkan hati*". Siapa pun di Indonesia akan suka menerima kritik yang baik, asal dilancarkan dengan kata-kata yang wajar.²⁹⁾

Sementara itu usaha-usaha untuk mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia makin diperhebat; ofensif dilakukan dengan menempuh dua jalan sekaligus, yaitu jalan kekerasan dan jalan diplomasi. Ofensif dalam bentuk kekerasan tercermin dengan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang diumumkan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961; isinya ialah: (1) gagalkan negara Papua, (2) kibarkan Sang Merah Putih di seluruh Irian Barat, dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum. Di bidang diplomasi, muncullah seorang diplomat kawakan Amerika, yaitu Ellsworth Bunker, sebagai perantara dan ini semua atas persetujuan PBB. Sementara kegiatan diplomasi dilaksanakan, maka kegiatan di bidang militer juga diintensifkan. Salah satu kejadian yang terjadi dalam rangka itu ialah yang dikenal dengan "pertempuran laut Ara Furu" yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1962. Di dalam insiden itu gugurlah seorang perwira tinggi Angkatan Laut, deputy KASAL Yos Sudarso; Perwira ini adalah penganut agama Katolik yang taat; dia adalah seorang perwira yang cukup berwibawa dan mempunyai bakat pemimpin yang cukup menonjol.

Akhirnya usaha pengembalian wilayah Irian Barat itu berhasil dan daerah Irian Barat diakui masuk wilayah Republik Indonesia sejak tahun 1963. Pelaksanaan pengembalian itu sepenuhnya dilakukan oleh PBB.

Di balik usaha-usaha kegiatan pengembalian daerah Irian Barat itu, terjadi juga pelbagai persoalan kenegaraan yang mengundang pemikiran serius dari pemimpin kita waktu itu; hal ini mau tidak mau juga melibatkan pula diri Mgr.Sugiyopranata. Salah satu persoalahan berat yang dihadapi ketika itu ialah masalah *dasar negara*. Sejak terbentuknya Konstituante hasil pemilihan umum 1955

^{29).} Mgr.Sugiyopranata: Belanda Harus Robah Sikap Merendahkan Bangsa Indonesia Dan Djangan Gunakan Kata-kata Jang "*Menyerikkan*" di dalam Suara Merdeka, Semarang, 12 Juli 1958.

persoalan dasar negara ini makin hangat diperdebatkan oleh pelbagai pihak, terutama di kalangan politisi. Masalah yang timbul ketika itu ialah persoalan apakah Pancasila yang "tetap" dipertahankan sebagai dasar negara atau tidak, karena di lain pihak terdapat juga golongan kuat yang menghendaki ajaran Islam yang dijadikan sebagai dasar negara. Perdebatan di antara pendukung Pancasila yang terdiri dari golongan-partai-partai nasionalis (tetapi juga termasuk partai-partai Katolik dan Kristen) dengan pendukung golongan Islam (terdiri dari Partai-partai Islam) tidak dapat mempertemukan pendapat mereka. Sidang-sidang Konstituante berjalan secara bertele-tele dengan tidak membawa hasil yang memungkinkan terpecahannya persoalan dasar negara itu.

Menghadapi kenyataan-kenyataan yang demikian itu Presiden Sukarno mencanangkan konsepsinya yang terkenal dengan *Konsepsi Presiden* yang diumumkan pada tahun 1957. Inisiatif Presiden melalui konsepsinya itu juga melahirkan perdebatan di kalangan politisi atau partai-partai politik. Hal yang demikian itu juga terjadi di kalangan golongan Katolik atau Partai Katolik. Di dalam tubuh golongan Katolik/Partai Katolik terjadi perpecahan, yaitu pihak yang menerima dan yang menolak Konsepsi Presiden itu. Perpecahan ini di dalam kongres Partai Katolik di Solo; pihak yang menerima Konsepsi Presiden dipimpin oleh Mgr.Sugiyopranata, sedang yang menolak Konsepsi Presiden dipimpin oleh I.J.Kasimo. Pihak Mgr.Sugiyopranata disokong penuh oleh Partai Katolik cabang Yogyakarta.³⁰⁾

Sebagai kelanjutan dari Konsepsi Presiden itu dibentuklah sebuah lembaga dengan nama: *Dewan Nasional*. Partai Katolik juga mendapat beberapa buah kursi. Untuk kedudukan itu Mgr. Sugiyopranata diminta juga oleh Presiden untuk duduk di dalam Dewan Nasional itu. Akan tetapi oleh beliau karena beliau tidak bersedia duduk di dalam Dewan Nasional itu, maka beliau akan menunjuk wakil-wakil pribadinya. Tetapi di lain pihak Partai Katolik sendiri tidak bersedia untuk menduduki kursi-kursi Dewan Nasional yang disediakan baginya. Mgr.Sugiyopranata mengambil

^{30).} M.P.M.Muskens Pr, loc. cit.

jalan lain untuk mendudukkan "orang-orang" Katolik di dalam Dewan Nasional itu. Beliau menyurat kepada Menteri Mulyadi Joyomartono agar dapat diusahakan duduknya "wakil pribadi" beliau di dalam Dewan Nasional; surat itu bertanggal 7 September 1957.³¹⁾ Untuk kedudukan di dalam Dewan Nasional itu beliau setuju dan memberikan restunya kepada Ir. Supardi dan juga R.E. Suwandi.³²⁾ Tindakan-tindakannya yang seperti itu mengundang kritik orang-orang lain, juga dari rekannya Mgr. Jayaseputra, terhadap dirinya. Bahkan Mgr. Jayaseputra meminta kepada beliau untuk tidak meneruskan usahanya, karena menurut Mgr. Jayaseputra hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi golongan Katolik di Indonesia.³³⁾

Selanjutnya, di dalam kenyataannya Konstituante tidak berhasil menciptakan Undang-Undang Dasar baru dan juga tidak berhasil mencapai sepakat untuk menerima anjuran Presiden guna kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Melihat kejadian ini, akhirnya Presiden mengambil tindakan dengan jalan mendekritikan kembalinya bangsa Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukannya pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini juga dilatar-belakangi oleh suatu dukungan kuat dari Angkatan Darat; bahkan sebenarnya usaha kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bersumber dari Angkatan Darat sendiri. Pada tanggal 28 Oktober 1958 oleh Presiden telah diberikan persetujuan definitif usul KSAD untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 itu.³⁴⁾

Kembalinya kita ke UUD 1945 berdasar Dekrit Presiden itu juga melahirkan pelbagai perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju dengan tindakan itu. Di dalam tubuh Partai Katolik pun hal itu terjadi pula. Da Costa seorang tokoh muda Katolik waktu itu tidak setuju dekrit untuk kembali ke UUD 1945, sedang

^{31).} M. Henricia Moeryantini CB, *op. cit.*, hal. 122.

^{32).} Lihat *lampiran B*.

^{33).} Lihat *lampiran C*.

^{34).} A.H. Nasution, *Dua Ceramah*, Gunung Agung, 1973, hal. 19.

^{35).} MPM. Muskens, *op. cit.*, hal. 411.

I.J.Kasimo dan Beng Mang Reng Sai menerima Dekrit Presiden itu.³⁵⁾

Di atas telah kita lihat bahwa Mgr.Sugiyoprana telah menerima Konsepsi Presiden dan juga demokrasi terpimpin, bahkan dengan mempertaruhkan kepercayaan dirinya di kalangan ummatnya; juga bahkan telah mengundang kritik "pedas" terhadap dirinya. Akan tetapi dukungannya kepada Presiden itu sama sekali bukan karena beliau "membeo" saja kepada Presiden. Hal yang demikian ini nampak ketika Manipol telah diintroduksi dan diterimanya NASAKOM sebagai unsur kehidupan politik di dalam rangka pelaksanaan Manipol/demokrasi terpimpin. Ketika itu beliau telah melihat adanya ancaman yang lebih serius terhadap Pancasila sebagai unsur negara Republik Indonesia. Karena itu beliau menyurat kepada Presiden dan menyatakan kekhawatirannya terhadap gejala perkembangan suasana politik di negeri kita; juga dengan terus terang dikatakannya bahwa NASAKOM berarti perongrongan terhadap gagasan nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam rangka itu dikatakannya pula bahwa beliau tidaklah *komunistophobia*, akan tetapi komunisme dan dengan orang-orang komunis memang tidak dapat memenuhi cita-cita nasional negara kita. Diingatkannya kepada Presiden bahwa apabila kaum komunis mengatakan bahwa mereka dapat menerima Pancasila, ucapan mereka itu hanyalah suatu gerak tipu taktis belaka dan bukan karena keyakinan sejati yang murni.³⁶⁾

Demikianlah di atas telah diberikan gambaran selintas tentang liku-liku persoalan yang dihadapi oleh Mgr.Sugiyoprana dan dengan itu nampaklah kepada kita bahwa untuk mengatasi persoalan itu, tidak sedikit kesulitan yang dihadapinya. Nampak pula kepada kita bahwa beliau telah menghadapi kesulitan-kesulitan itu dengan segala kemampuannya, dengan segala kejujurannya, walaupun tidak semua orang bersedia menerimanya. Beliau telah menanggung pelbagai resiko. Namun itu semua diterima dengan sikap yang berwibawa, wibawa dari seorang "bapak pengasuh".

³⁶⁾ M.Henricia Moeryantini CB, *op. cit.*, hal. 117.

BAB VII PENUTUP

Menjelang saat-saat terakhir dari hidupnya Mgr. Sugiyopranata masih saja sibuk dengan pelbagai kegiatan kemanusiaan. Beliau harus menghadiri sidang-sidang ke-2 konsili Vatikan ke II dan kemudian juga untuk melakukan pengumpulan dana bagi kegiatan-kegiatan misi untuk daerah keuskupannya. Di samping itu kepergiannya ke luar negeri itu juga dimaksudkan untuk melanjutkan pengobatan dirinya. Selama menghadiri sidang-sidang Konsili Vatikan di Roma itu para Uskup Indonesia juga mengadakan pelbagai kegiatan berupa diskusi tentang pelbagai permasalahan yang menyangkut kegiatan-kegiatan mereka. Diskusi/rapat-rapat para uskup di Roma itu dipimpin oleh Mgr. Sugiyopranata. Ketika beliau berada di Roma, beliau sempat bertemu dengan Presiden Sukarno yang ketika itu sedang dalam perjalanan menuju Perancis untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden de Gaulle. Di dalam suatu pertemuan Presiden Sukarno menyatakan kepada beliau,

"Rama Agung, kulo bade dateng Paris perlu rerembagan perkawis ingkang penting sanget kalian Presiden de Gaulle, pramila kulo nyuwun donga pangestunipun Rama Agung."

Kemudian Mgr. Sugiyopranata menjawab pula dalam bahasa Jawa,

*"Kulo bade memuji mugi-mugi pepanggihan kaliyan Presiden de Gaulle mangke sukses inkang murakabi kita sedoyo."*¹⁾

Percakapan antara kedua tokoh ini, yang agaknya dapat dikatakan sebagai dua orang yang "berteman akrab", memang selalu dilakukan dalam bahasa Jawa.

Pada saat-saat terakhirnya itu beliau telah menunjukkan tindakan-tindakan yang mengandung nilai manusiawi, yaitu "menghargai" orang lain, juga terhadap bawahannya. Sebagai contoh ialah ketika beliau akan berangkat ke negeri Belanda,

1). Wawancara dengan Pastor Tentara Kodam VII/Diponegoro, Letkol Dr. Harsosusanto Pr, yang dilakukan di kediamannya di Semarang, tanggal 20 Januari 1977.

dari Roma beliau harus naik kereta api. Ini dilakukan karena menyangkut dengan pertimbangan-pertimbangan kesehatannya. Beliau tidak boleh naik pesawat terbang karena penyakit jantung yang dideritanya. Karena pertimbangan kesehatannya itu pulalah maka sekretaris pribadinya, Dr. Harsosusanto mencari cara agar selama dalam perjalanan itu beliau akan dapat beristirahat. Untuk itulah maka Dr. Harsosusanto membeli bantal dengan tujuan agar jika kereta api berjalan dan jika sudah tiba saatnya beliau istirahat, maka Dr. Harsosusanto akan berdiri dan mempersilakan beliau untuk berbaring dan istirahat. Akan tetapi tujuan sekretaris pribadinya itu tidak disetujuinya dan ketika sudah agak larut malam maka berdirilah Dr. Harsosusanto untuk kemudian mempersilakan beliau untuk beristirahat dengan berbaring. Beliau menolak untuk istirahat dengan berbaring karena itu berarti akan mengambil tempat duduk sekretaris pribadinya itu. Beliau kemudian berkata bahwa Dr. Harsosusanto itu juga manusia biasa, akan capek juga. Beliau menyuruh sekretaris pribadinya itu untuk tetap duduk saja di sampingnya, sambil istirahat sebagaimana dilakukan oleh beliau sendiri. Dan akhirnya kedua orang itu duduk semalam suntuk sebelum sampai di tujuannya yaitu negeri Belanda.²⁾

Sesampai beliau di negeri Belanda, beliau masih berusaha untuk mengunjungi beberapa orang yang dianggapnya telah berjasa di dalam membantu usaha pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah negara Indonesia, seperti Prof. Duynstee. Juga beliau bermaksud untuk mengunjungi keluarga-keluarga dari pada beberapa orang imam yang bertugas di Indonesia. Akan tetapi maksud itu tidak dilaksanakan karena larangan dokter yang merawatnya ketika itu.³⁾

Walaupun beliau mendapat perawatan yang sangat teliti, akan tetapi rupanya penyakitnya sudah cukup parah. Akhirnya pada tanggal 22 Juli 1963 beliau pun menerima panggilan Tuhan untuk menghadap kepada-Nya untuk selama-lamanya; beliau mangkat, tidak di tanah air yang dicintainya tetapi di negeri

^{2).} *Ibid.*

^{3).} *Ibid.*

Belanda. Akan tetapi rupanya Presiden Sukarno tidak menghendaki "teman karibnya" itu dimakamkan di tanah air bangsa lain, karena itu diperintahkan untuk membawa jenazah almarhum ke Indonesia untuk dimakamkan di Taman Pahlawan Semarang.

Sebelum jenazah beliau diterbangkan ke tanah airnya, di negeri Belanda juga telah diadakan upacara-upacara penghormatan terakhir terhadap jenazah beliau. Upacara itu mendapat perhatian yang sangat besar, tidak hanya dari masyarakat Indonesia yang berada di negeri Belanda akan tetapi juga yang berasal dari masyarakat negeri Belanda sendiri. Penyelenggaraan missa dipimpin oleh Kardinal Alfrink dan juga sekaligus memberikan khotbah duka citanya atas kemangkatan Uskup Agung Sugiyopranata dari Indonesia itu. Di dalam khotbahnya Kardinal Alfrink juga telah menyebutkan jasa-jasa almarhum di dalam usahanya untuk mengintegrasikan karya missi di tengah-tengah kebudayaan pribumi.

Setelah semua persiapan pemberangkatannya ke Indonesia telah selesai maka jenazah beliau pun diberangkatkan ke Indonesia dan tiba pada tanggal 28 Juli di lapangan terbang Kemayoran Jakarta. Di lapangan terbang telah datang menjemput jenazah beliau sejumlah tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dan handai taulan beliau; juga sejumlah besar warga Katolik di Jakarta. Penyambutan jenazah beliau dilakukan secara resmi sesudahnya kemudian jenazah beliau diantarkan ke Gereja Katedral Jakarta. Di Gereja inilah dilaksanakan upacara *tuguran* untuk jenazah beliau. Pada jam 2 malam, Presiden Sukarno datang ke Gereja Katedral Jakarta untuk memberikan penghormatan terakhirnya kepada jenazah rekan akrabnya itu; kedatangannya tanpa jemputan resmi dari panitia.⁴⁾

Keesokan harinya, yaitu tanggal 29 Juli diadakan lagi upacara resmi keagamaan dan pemberian misa di sini dipimpin oleh Mgr. Jayaseputra, Uskup Agung Jakarta. Setelah upacara itu selesai

4). M. Henricia Moeryantini CB, Mgr. Albertus Sugiyopranata Sj. Nusa Indah Ende-Flores, 1975, hal. 32

maka jenazah beliau pun diterbangkan ke Semarang untuk kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dari Jakarta ikut pula mengantar jenazah almarhum beberapa orang tokoh pemerintahan dan masyarakat, seperti Menteri Pertama Kesejateraan Mulyadi Joyomartono yang ditunjuk oleh Presiden untuk mewakili beliau, Ibu Fatmawati, juga ikut serta Uskup Agung Jakarta, Mgr. A. Jayaseputra, Uskup Bogor, demikian pula Duta Besar Vatikan di Indonesia. Mgr. Dr. Ottavia de Liva dan lain-lain. Setibanya di lapangan terbang Kalibanteng, jenazah beliau disambut oleh catur tunggal pemerintahan propinsi Jawa tengah. Dari lapangan terbang kemudian jenazah beliau diantar ke Katedral Randusari dan diterima oleh pihak Gereja secara resmi yang diwakili oleh pastor J. Darmoyuwono Pr, selaku *Vikaris Capitularis*; kemudian jenazah beliau disemayamkan di altar untuk beberapa jam lamanya.

Setelah melalui berbagai upacara untuk menghormati jenazah beliau, maka pada tanggal 30 Juli 1963 dimakamkanlah jenazah beliau di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal dengan disertai suatu upacara kebesaran militer. Dengan itu "pergilah" seorang pahlawan patriot yang selama hidupnya telah memberikan segala kemampuan untuk memajukan kehidupan bangsanya. Sebagai penutup bab ini, penulis ingin mengutip pendapat Dr. Y. Weit jens yang antara lain berkata,

"Sulit untuk menentukan jasa-jasa Mgr. Sugiyoprana bagi Gereja di Indonesia. Memang ada segi-segi lemah dalam cara beliau membimbing Keuskupannya, akan tetapi dapat dikatakan bahwa berakarnya Gereja Katolik di tanah Indonesia . . . hal itu sebagian terbesar adalah berkat karya Uskup Agung ini.⁵)

Seorang Pahlawan Nasional, seorang patriot, seorang pemimpin agama (Katolik) telah pergi namun jasanya tetap abadi karena karya-karyanya kini untuk sebagiannya masih dirasakannya oleh kita yang kini masih sempat menikmati hidup di Republik Indonesia.

Lampiran A^{x)}

No. : 758+A/X a/6/59

Lamp. :

Hal. : Permohonan Kewarganegaraan
para pastor, bruder dan suster.

Kepada

Paduka Tuan Ketua Pengadilan
Negeri Semarang
di Semarang

Dengan hormat,

Untuk dapat mencegah adanya kemungkinan akan terhambatnya pekerjaan Missi Katolik dalam bidang sosial khususnya, dan pula mengingat betapa pentingnya arti kewarganegaraan bagi pengabdian Missi terhadap masyarakat pada umumnya.

Dengan ini kami mohon dengan rendah hati agar Paduka Tuan berkenan menyelesaikan permohonan-permohonan kewarganegaraan para pastor, bruder dan suster dalam bulan Desember ini dan kemudian dengan segera pula berkenan meneruskannya kepada Departemen Kehakiman di Jakarta.

Atas perhatian Paduka Tuan, dengan ini kami mengucapkan terima kasih banyak.

Hormat kami,

Vikaris Apostolik Semarang

(A.Soegiyopranata S.J.)

Tindasan kepada:

1. Kantor Waligereja Indonesia bhg.B

Taman Tjut Mutiah 10 Jakarta II/14

2+3 Arsip

X). Lampiran ini dikutip dari: M.Henricia CB, *Sekripsi, op. cit*, hal. 115.

Lampiran B x)

Panti Rapih, 10 September 1957.

Confidentieel.

Kepada ananda yang tercinta
Prof. Ir. Soepardi,
Sagan,
Yogyakarta.

Ananda yang tercinta,

Untuk menghindarkan segala salah faham dan kesyakwasangkaan, yang mungkin akan timbul dari pihak manapun juga mengenai maksud ananda akan berusaha untuk duduk dalam Denas, maka dengan rendah hati kami menyampaikan beberapa hal kepada ananda seperti yang berikut di bawah ini:

1. Ananda duduk dalam Denas tersebut tidak sebagai wakil salah satu golongan yang menunjuk ananda, akan tetapi selaku orang perseorangan yang beragama Katolik dan merdeka, yang atas kemauan sendiri, atas kesadaran dan keyakinan sendiri, pun atas tanggung jawab sendiri dengan maksud sekedar mengabdikan diri kepada kepentingan Nusa, Bangsa, Negara dan Gereja.

2. Keinginan ananda akan duduk di Denas itu ternyata timbul dari kehendak hati ananda sendiri yang merdeka, meskipun tak bebas dari tawaran atau permohonan handai taulan ananda.

3. Kami memberi fiat kepada maksud ananda, oleh karena kami tak beralasan untuk menekannya atau melarangnya tetapi berharapan agar kedudukan ananda di Denas tersebut baik positif maupun negatif sungguh bermanfaat bagi kepentingan umum dan kepentingan gereja.

4. Hendaknya ananda selama duduk dalam Dewan ini bersatu padu dengan anggota-anggota lainnya yang berigama Katolik, memelihara hubungan yang baik dengan Partai Katolik, jikalau mungkin dan perlu, secara diam-diam atau menampak sesuai dengan kebijaksanaan anggota-anggota yang lain yang berigama Katolik menggalang dan menyelenggarakan kerja sama yang erat dengan seluruh golongan yang bertuhan. Demikianlah ananda akan mampu bertindak tegas, jelas dan gagah berani, bijaksana dan tekun dan tubi.

5. Dalam perkara yang sukar dan sulit hendaknya ananda berunding lebih dulu dengan para penasehat awam yang akhli dalam teori dan praktek, tambahan pula bertukar fikiran dengan para penasehat rohani yang akhli dalam ketatanegaraan, kemasyarakatan, kesusilaan, iman dan ilmu, keigamaan dan kegerejaan.

6. Dalam menunaikan tenaga di Denas, ananda mungkin akan timbul tenggelam dalam pekerjaan. Semoga dengan rahmat kurnia Tuhan yang serba mewah, ananda tak pernah keliabisan kekuatan, bahkan selalu berkelebihan daya dan gaya untuk mengurus memelihara dan memperkembangkan rumah tangga, yang merupakan dasar masyarakat, Negara dan Gereja yang terpenting.

Sekian pesan kami.

Wassalam dengan berkat,
ttd.

(A. Soegiyopranata)

x). Lampiran ini dikutip dari M.Henricia CB *Sekripsi*, op.cit., hal. 116 - 117.

Lampiran Cx)

Vikariat Apostolik Jakarta

No.375/A3-17/57

Jakarta, 18 September 1957.

J.M.Mgr.A.Soegiyopranata.

**Rumah Sakit Panti Rapih
Yogyakarta.**

Rama Kanjeng P.X.ti

Gandeng kalijan kasanggahanipun Rama Kanjeng wonten Lawang, ingkang bade ambudi-daya, supados wontena saderek Kat limrah (leek) ingkang purun linggih ing kursi Denas ingkang kasediyakaken kangge Umat Kat (agama Kat) saking karsanipun Rama Kanjeng Internantius, supados kulo nyaosi prikan bab 2 ing ngandap puniko :

1. Nitik Wah-wahing Mu Nas (Musyawarah Nasional).
 - a. Kerjasama Soekarno-Hatta pulih, nanging boten kados rumijin (presiden – wakil presiden).
 - b. Bade dipun antepi dasar Pantjasila lan konstitusi. Kabinet Kerja, Dewan Nasional iss dipun anggep in-konstitusional.
 - c. Idenipun Bung Karno "gotong royong" (tjampur aduk) dipun tilar.
2. Dados ingkang tjeta kemawon:
 - a. Pamanggihipun Hatta unggul.
 - b. Creatienipun Bung Karno mojak-majik.
 - c. Bade wonten ewah-ewahan.Nanging kados pundi tjaranipun ewah lan bade dados punapa, "wait and see".
3. Partai Kat samenika gadah nama sae sanget: mergi anggenipun tegas, integre, disiplinair. Makaten ugi umat Kat ing umumipun: margi anggenipun consgezind. Boten kados golongan sanesipun, ngantos wonten ingkang purun mlebet ing kabinet kerja utawi dewan nasional menapa.

Salah satunggaling tilas-menteri (Masyumi) ngakeni kanti ngalem, bilih wonten ing konperensi 2 internasional gol Kat ageng sanget prabawanipun, margi wakil 2 nasional ingkang Kat, sami saeka praja tur tjatjahipun.

4. Ingkang punika, manawi ing salebetipun kawontenan (situasi) ingkang boten tetap kados mekaten, ladjeng wonten saderek Kat purun linggih ing kursi dewan nasional kanggo umat (agami) Kat, mangke saged "op een verkeerd paard wedden" tur ingkang sampun tjeta: mitunani no. 3.

Amin ing wekdal samanika prajoginipun : wait and see. Andadosna kawuningan.

Salam taklim kulo.

abdi ing S. Kr

ttd.

(A.Djajasepoetra S.J.)

Vik.Ap.Djakarta

=) Lampiran ini dikutip dari: Sdr. M.Henricia CB.Sepripsi, *op.cit.*, hal.118 – 119

Tri Saring Offset – Jakarta